

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

KOMINFO next

SYUKUR & REFLEKSI

10

20

PROVINFO

Edisi 33
September 2021



9 772655 993006



TIM REDAKSI

Pengarah:
Mira Tayyiba

Wakil Pengarah:
Phillip Gobang

Pemimpin Redaksi:
Ferdinandus Setu

**Wakil
Pemimpin Redaksi:**
Daoni Diani Hutabarat

Redaktur Pelaksana:
Helmi Fajar Andrianto

**Wakil Redaktur
Pelaksana:**
Viskayanesya

Redaktur:
Frans Bambang Irawan
M. Taufiq Hidayat
Verawati
Annisa Bonita P.
Walbertus Natalius W.
Primus A Latu B.

Reporter:
Yusuf
Ahmad Irso Kubangun
Meita Pusparini
Emild Kadju

Fotografer:
Agus Yudi Harsono
Doni Paulus Sumule
Sri Indrati Novinarsari
Indra Kusuma

Desain & Layout:
Adista Winda Rizka
Rahma Aulia Indroputri
Lamdza Rachmattunisa
Dhenty Febrina Sahara

Produksi:
Fahmie Trihatin J.

Alamat Redaksi:
Biro Humas Kementerian
Komunikasi dan Informatika

Jl. Medan Merdeka Barat
No. 9, Jakarta Pusat

Syukur & Refleksi

Puji syukur kepada Tuhan atas karena atas segala penyelenggaraanNya, Kementerian Komunikasi dan Informatika bisa terus berkontribusi untuk Indonesia selama 20 tahun terakhir. Perayaan dua dekade kementerian ini dilihat secara sederhana pada 28 September 2021. Tajuk acaranya adalah Syukur & Refleksi. Acara benar-benar dibuat sederhana mengingat masih di masa Pandemi Covid-19. Hanya 75 pejabat yang diundang ke lokasi acara di Lapangan Anantakupa, selebihnya mengikutinya via Zoom dan Youtube Kemkominfo TV.

Tiga mantan Menteri Kominfo hadir dalam segmen Temu Wicara Mantan. Bapak Sofyan Djalil (Menkominfo 2004-2007), Prof M Nuh (Menkominfo 2007-2009) dan Chief RA (Menkominfo 2014-2019). Pak Tifatul Sembiring (Menkominfo 2009-2014) sejatinya hadir namun terakhir mengabarkan pada jam yang sama ternyata masih dalam perjalanan udara dari Medan ke Jakarta.

Sekjen Kominfo Ibu Mira Tayyiba dalam sambutannya yang selalu menarik, mengutip Sydney J. Harris: *The two words 'information' and 'communication' are often used interchangeably, but they signify quite different things. Information is giving out; communication is getting through.* Pernyataan Harris ini mengafirmasi betapa pentingnya komunikasi dan informasi dalam membangun peradaban manusia. Melalui komunikasi dan informasi kita

bisa memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator dan kompleksitas persoalan dalam seluruh aspek kehidupan.

Setelah menyapa civitas Kominfo di 6 (enam) lokasi berbeda melalui *video call*, Ibu Sekjen menempatkan doa dan harapan terbaik untuk Kominfo dalam segmen acara Time Capsule.

Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Johnny G. Plate menutup perayaan dengan pidato transformasi digital. Kominfo bergerak dari tagline sebelumnya Menuju Masyarakat Informasi ke semangat baru: Indonesia Terkoneksi Makin Digital Makin Maju.

Menkominfo mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik itu internal Pemerintah termasuk keluarga besar Kementerian Kominfo, sektor swasta, masyarakat dan komunitas, para akademisi, serta rekan-rekan media yang selama 20 tahun terakhir telah berjuang bersama Kementerian Kominfo dalam mengakselerasi transformasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.

"Mari kita bersinergi dan bekerja bersama membangun akses informasi dan komunikasi digital yang inklusif dan memberdayakan, sehingga visi besar Indonesia Maju pada tahun 2045 mendatang bisa terwujud. Terus tingkatkan optimisme dan kolaborasi bersama, menuju Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju," ucap Menteri Johnny di akhir pidato.

Melalui Surat MMB9 edisi ini juga saya menyampaikan pamit kepada seluruh pembaca Majalah Kominfo Next. Per hari ini 30 September 2021, tugas saya sebagai Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo yang dipercayakan kepada saya sejak Agustus 2018 berakhir dengan dilantikannya Kepala Biro Humas Ibu R. Rhina Anita Ernita Martono. Dengan demikian saya mengawal penerbitan majalah ini selama 33 edisi sejak pertama kali terbit pada Januari 2019.

Terima kasih dan mohon maaf jika ada tulisan dan sajian majalah selama ini belum memenuhi ekspektasi para pembaca sekalian.

Selamat membaca!

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Pemimpin Redaksi Majalah Kominfo Next

 @FSetu
  @FSetu
  FSetu TV



Daftar

Isi

2 Surat dari MMB 9

6 Resensi Buku

16 Liputan Utama

58 Jurnal Foto:
Syukur & Refleksi

30 Liputan Khusus

74 TokTok
Kominfo

78 Perspektif
Sivitas

120 Wajah Sivitas

114 KomEvent

130 Postel dalam
Balutan Sejarah

138 Bahasa

140 Lintas Kominfo

146 Top 10 Hoaks



Perpustakaan Kominfo



Lantai 1 Gedung B
Kementerian Kominfo

Senin s.d Jumat
08.30 s.d 15.30

Rak Buku



Penulis :
Ali Akbar

Digital Ekosistem

Modal bagi usaha rintisan itu bukan sekadar uang. Fasilitas kantor, dukungan laporan keuangan, arahan dari mentor, akses menuju perbankan, koneksi menuju pembiayaan, sampai *executive coaching*, semuanya adalah sumber modal berharga bagi usaha rintisan. Proses dalam membangun sebuah usaha rintisan (*startup*) tidaklah sulit, meskipun tidak dapat pula dikatakan mudah. Memiliki pengetahuan dasar atas berbagai komponen yang dapat mempercepat pertumbuhan usaha, sangat penting diketahui oleh kamu, para calon dan pemilik bisnis yang ingin cepat berhasil di tengah ketatnya persaingan. Ali Akbar, sang penulis yang juga seorang tokoh yang telah berkecimpung selama bertahun-tahun dalam dunia digital, memuat segala informasi yang penting agar sebuah bisnis tak patah sebelum berkembang.

Rak Buku



Penulis :
Kasdin Sihotang

Berpikir Kritis Kecakapan Hidup di Era Digital

Selain perilaku yang baik, cara berpikir menjadi bagian dari penilaian terhadap kualitas seseorang. Dewasa ini, cara baru berpikir yang sangat dibutuhkan adalah berpikir kritis. Cara berpikir ini bahkan menjadi kebutuhan mendasar dalam menghadapi situasi global yang sarat dengan kompleksitas dan perubahan yang begitu cepat di era digital ini. Dalam situasi demikian, seseorang yang mampu bertahan hidup adalah yang mampu memilah-milah mana yang baik atau tidak baik, di antara sekian kenyataan yang dihadapkan padanya. Sebaliknya, mereka yang tidak bersikap selektif akan hanyut di tengah perubahan dan menjadi objek di dalamnya.

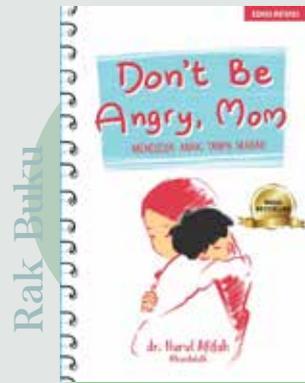


Penulis :
Jubilee Enterprise

Bikin Konten Youtube untuk Anak, Remaja, dan Keluarga

Siapa yang tidak kenal dengan Youtube. Siapapun Anda, bisa membuat video di Youtube. Anak-anak, remaja, dan keluarga bisa berpartisipasi membuat video berkualitas di situs layanan Youtube. Menjadi Youtuber sudah bukan lagi sekadar hobi melainkan profesi. Pergeseran sosial ini terjadi karena sudah banyak terbukti kalau dengan memanfaatkan Youtube, para content creator menjadi kaya raya. Apa itu content creator? Di dunia Youtube, orang yang mengunggah video hasil karyanya sendiri ke Youtube disebut dengan istilah content creator. Fenomena ini menguntungkan bagi siapa pun yang tertarik membuat video karena hasil kerja keras mereka tidak hanya sekadar bisa dinikmati orang lain saja, tapi juga menghasilkan cash flow yang deras.

Meilawati ,
Pustakawan Ahli Muda
Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal



Penulis :
dr. Nurul Afifah

Don't Be Angry Mom : Mendidik Anak Tanpa Marah

Apakah Anda adalah orang tua yang sering kelepasan membentak anak? Gampang terpancing mengomel, marah, bahkan memukul anak? Padahal, Anda sudah bertekad untuk bersabar. Jika jawabannya IYA, Don't Be Angry, Mom menjawab kegalauan Ayah dan Bunda. Ditampilkan dengan penjelasan yang tidak menggurui maupun menghakimi, tetapi mengajak Ayah Bunda belajar bersama agar tidak menodai masa perkembangan anak dengan bentakan dan kemarahan. Dokter Nurul Afifah yang telah lama berkecimpung dan mendengar curhatan orang tua tentang cara mengasuh anak, mengajak Anda untuk menerapkan pola asuh yang sehat sekaligus menyenangkan, dengan penjelasan lugas yang melibatkan berbagai disiplin ilmu serta sudut pandang Islam.

Jangan Minta Maaf!

Public Speaking and Communication Skills

Meilawati ,

Pustakawan Ahli Muda

Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal

Daftar Isi

Bab 1 : The Power of Speaking

Bab 2 : Jangan Minta Maaf!!!

Bab 3 : Waktu Sudah Habis dan Bisa Anda Jelaskan?

Bab 4 : Andalah yang Pegang Kendali

Bab 5 : The Power of Smile

Bab 6 : Senyum Ala Mas Wawiek

Bab 7 : Bung Karno, SBY, dan Jokowi

Bab 8 : MakeUp-nya Mana...?

Bab 9 : Wawancara atau Interogasi?

Bab 10 : Pakai Bumbu Cinta

Bab 11 : Belajar Komunikasi

Bab 12 : Kemasan atau Isi?

Bab 13 : Membangun Ikatan Tulus

Bab 14 : "EE ... EE ... Anu ... EE"

Bab 15 : Obrolan di (Warung) Angkringan

Bab 16 : Kesan Pertama Begitu Menggoda

Bab 17 : Konspirasi Kata

Kemampuan public speaking atau berbicara di depan umum wajib dimiliki setiap orang dan profesi apa pun. Dengan memiliki kemampuan public speaking, maka seseorang dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas profesinya, termasuk dalam berinteraksi dengan orang lain. Melalui kemampuan ini seseorang mampu menyampaikan isi di dalam pikirannya dalam presentasi lisan yang luar biasa. Seseorang mungkin memang mampu berkomunikasi lewat tulisan dengan baik, namun tidak dapat menyampaikan secara lisan dengan baik. Di sinilah nilai komunikasi makin terasa, lebih lagi dengan pemilihan kata yang tepat, cara penyampaian yang powerful, dan intonasi yang pas karena audiens akan lebih dulu menilai bagaimana cara penyampaian dibandingkan isi yang disampaikan.

Buku yang berjudul *Jangan Minta Maaf! Public Speaking and Communication Skills* ini menjelaskan hal-hal yang harus dipelajari dalam menguasai teknik public speaking yang baik beserta tips yang sangat berguna. Mengetahui tema acara dan di mana tempat kita berbicara, siapa audiensnya, efektivitas kata yang digunakan, sikap yang diambil ketika melakukan kesalahan, hingga ekspresi yang ditampilkan kepada audiens atau lawan bicara adalah hal penting dalam public speaking.



Book Review



Jangan Minta Maaf!

Public Speaking and Communication Skills

Penulis :

Donny Perdana de Keizer

Penerbit :

Salemba Humanika

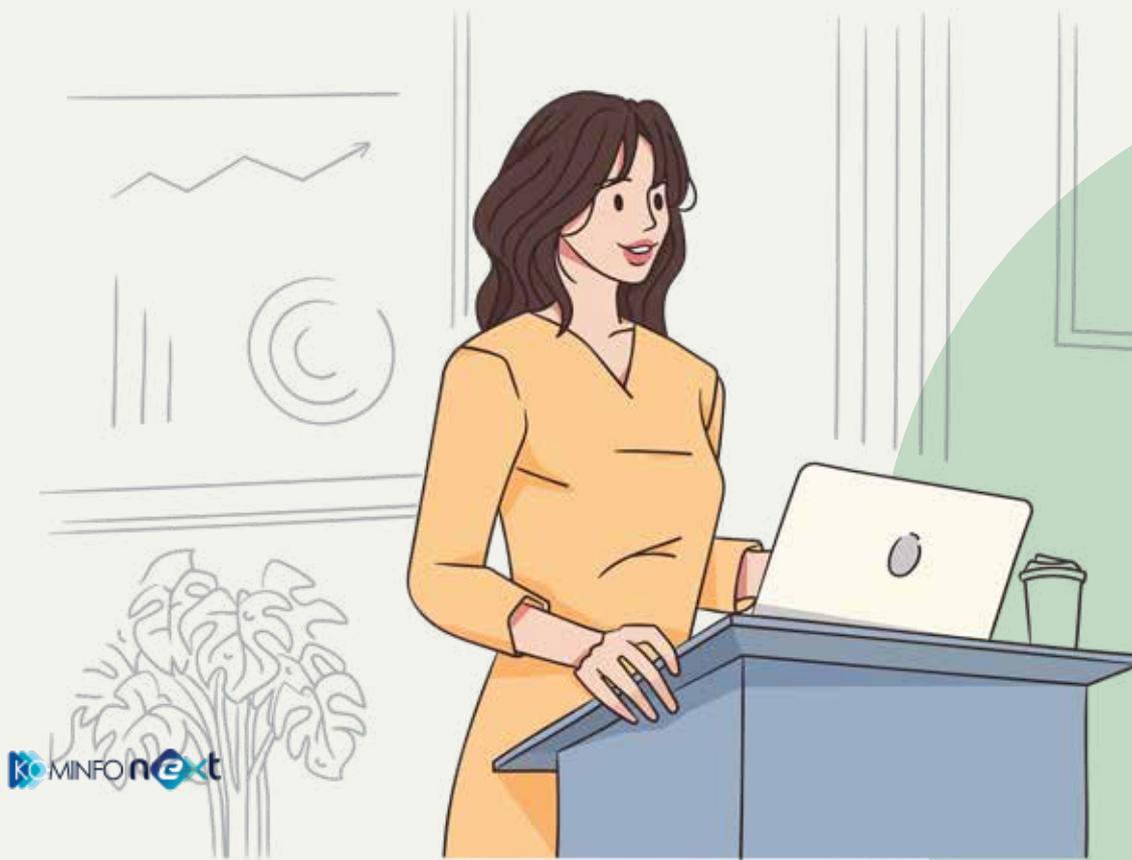
Buku ini mengajarkan, sebelum menjual apa yang ingin disampaikan, seseorang harus terlebih dulu “menjual dirinya” agar lawan bicara tertarik dan penyampaian informasi berjalan lancar. Menjual diri di sini berarti kita harus membuat diri kita dapat dipercaya oleh lawan bicara kita sehingga mereka dapat menerima pesan yang kita sampaikan. Sebesar apapun kesalahan yang dilakukan ketika tampil menjadi pembicara atau tengah menyampaikan presentasi di hadapan publik, jangan pernah mengucapkan kata maaf. Hal yang harus dilakukan adalah meralatnya dengan kata “... maksud saya..”. Untuk lebih merendahkan hati, kata “saya” bisa diganti menjadi “kami”.

Menjadi pembicara yang baik tentu impian semua orang. Dalam banyak hal kemampuan berbicara dapat memberikan peluang kesuksesan lebih besar dalam profesi apa pun. Kemampuan bicara yang baik dan tulus akan menimbulkan trust atau rasa percaya dari lawan bicara kita. Setiap materi yang baik apabila disampaikan dengan cara yang baik pula tentu akan memberikan efek yang lebih dahsyat jika dibandingkan dengan menggunakan cara yang biasa-biasa saja. Dalam buku ini, penulis menyampaikan bahwa selain belajar untuk menjadi orang yang pandai bicara, kita juga perlu untuk belajar menjadi pendengar yang baik, karena pada hakikatnya komunikasi tidak hanya tentang berbicara, tetapi juga mendengarkan lawan bicara kita.

Sebagai seorang pembawa acara ada beberapa hal yang harus dilakukan dan tidak perlu dilakukan. Intonasi dan gesture adalah hal yang sangat mempengaruhi respon lawan bicara kita. Saat menjadi seorang pewawancara, penulis menjelaskan bahwa kita tidak perlu menanyakan beberapa pertanyaan yang tidak penting dan yang terkesan memojokkan lawan bicara. Tentu saja kedua hal tersebut dapat membuang waktu serta membuat lawan bicara menjadi tidak nyaman. Kunci sukses wawancara di TV adalah riset dan persiapan yang dilakukan. Dalam buku ini, penulis memberikan tips untuk dapat membangun kepercayaan serta hubungan yang baik dengan lawan bicara, karena keamanan dan kenyamanan adalah faktor dominan terbentuknya komunikasi antarpersonal yang efektif.

Pada salah satu bab dalam buku ini dijelaskan bahwa, dalam dunia public speaking, kesan pertama adalah hal yang sangat penting. Penulis mengatakan bahwa seseorang hanya memiliki waktu 5-10 detik untuk menciptakan kesan pertama yang baik bagi audiens atau teman bicara. 5-10 detik ini menjadi waktu emas untuk dapat menciptakan citra yang positif dan menarik kepercayaan orang lain, salah satunya dengan memberikan senyuman yang tulus. Senyuman yang tulus berasal dari hati yang paling tulus serta dilakukan dengan sepenuh hati dan wajar. Saat kita memberikan senyuman tulus kepada lawan bicara atau orang di sekitar kita, tentu saja akan menimbulkan kesan yang baik terhadap kita. Oleh karena itu, kesan pertama ini sangatlah penting dan dapat menentukan bagaimana nasib kita di hadapan orang lain.

Ketika tampil di hadapan publik, terlalu sering mengucapkan kata yang tidak ada artinya bisa dianggap sebagai kebiasaan buruk bagi seorang pembicara. Misalnya saja kata "Ee.. dan Anu..". Selain mengganggu audiens, kebiasaan ini juga membuat kita dianggap sebagai orang yang tidak siap untuk tampil di hadapan publik. Hal ini membuat audiens menjadi ragu dengan apa yang kita sampaikan. Jika anda memiliki kebiasaan ini ketika berbicara dengan orang lain, maka hal tersebut perlu untuk dihilangkan. Anda tidak khawatir karena dalam buku ini penulis membagikan beberapa tips untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Di samping kebiasaan tersebut, grogi, takut, dan tidak percaya diri dalam presentasi atau berada di panggung adalah hal wajar, namun juga perlu untuk diminimalisasi. Dalam buku ini, penulis juga memberikan beberapa tips untuk meminimalisasi grogi atau tidak percaya diri ketika berada di atas panggung dan berhadapan dengan banyak orang. Salah satunya adalah dengan senyuman tulus dan persiapan yang matang sebelum acara dimulai.





Persiapan sebelum melakukan presentasi atau pidato memegang peranan yang penting. Bahkan bisa dikatakan sebagai kunci sukses dalam presentasi atau pidato. Jangan sampai tampil tanpa persiapan. Tidak hanya persiapan terkait dengan materi, tetapi juga persiapan terhadap diri sendiri seperti pakaian, make up, dan aksesoris yang akan digunakan. Pria ataupun wanita wajib untuk di-make up ketika tampil di hadapan kamera dan di bawah sinar lampu studio. Selain sebagai bentuk untuk menambah kepercayaan diri, menggunakan make up ketika tampil di hadapan kamera juga berguna agar audiens tidak gagal fokus pada kilapan yang ada di pipi, kening, dan hidung kita sehingga dapat lebih fokus pada apa yang kita sampaikan. Penulis juga mengungkapkan, selain make up, seorang presenter atau pembicara juga harus wangi dan berpakaian rapi serta sesuai yang akan menjadi pelengkap dalam mempersiapkan diri sebelum kegiatan dimulai.

Tujuan dari presentasi atau pidato adalah membuat audiens dapat menangkap dan memahami apa yang kita sampaikan. Jika audiens dapat memahami apa yang kita maksud maka presentasi atau pidato kita bisa dikatakan berhasil. Sangat penting memahami dan mengenal siapa audiens kita. Sikap yang tulus serta rasa empati dapat digunakan untuk membangun hubungan baik dengan audiens. Serta dapat menggunakan bahasa yang ringan dan sederhana untuk menyampaikan maksud kita agar mudah dipahami oleh audiens. Juga tidak perlu berbasabasi sehingga waktu tidak terbuang percuma, karena seorang public speaker yang cerdas adalah yang mampu menjelaskan suatu hal yang panjang lebar menjadi pendek sehingga lebih mudah untuk dipahami. Buku ini bisa menjadi pilihan yang tepat bagi anda yang ingin meningkatkan kemampuan public speaking dan komunikasi, karena disampaikan secara ringan dan mudah dipahami.



Kelebihan

Kelebihan dari buku ini adalah ditulis oleh seorang ahli dalam bidang public speaking dan komunikasi. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadi penulis sehingga banyak tips (saran-saran) yang dapat dijadikan rujukan oleh pembaca dalam upaya meningkatkan kemampuan komunikasi dan public speaking. Ditambah dengan beberapa cerita pengalaman penulis serta ilustrasinya sebagai gambaran bagi pembaca. Selain itu, pembahasan dalam buku ini dikemas dengan kalimat yang sederhana sehingga mudah dimengerti oleh pembaca. Buku ini dapat menjadi pilihan yang tepat untuk dibaca saat waktu luang, karena termasuk buku yang ringan dan sangat cocok dibaca oleh semua kalangan.

Kekurangan

Meskipun pembahasannya ringan dan menggunakan kalimat yang sederhana, terdapat pengulangan beberapa kalimat yang ditemukan pada beberapa bab buku ini. Padahal seharusnya hal tersebut tidak perlu dilakukan, karena sudah disebutkan dalam bab sebelumnya, sehingga tidak membingungkan pembaca.



Donny de Keizer

Tentang Penulis

Donny Perdana de Keizer atau dikenal sebagai Donny de Keizer adalah seorang speakerpreneur dan TV broadcaster yang memulai karir di TVRI Yogyakarta saat masih kuliah. Hijrah ke Jakarta sebagai reporter dan news anchor di TVRI Nasional dan juga dipercaya menjadi Produser di Current Affairs TVRI Nasional. Sejak 2011 hingga saat ini, Donny menjadi news anchor di Berita Satu News Channel.

Pada 2009 mendirikan Binus TV, yaitu televisi komunitas pertama berbasis streaming di Indonesia. Sejak saat itu juga aktif mendirikan beberapa televisi lokal dan televisi komunitas di tanah air. Donny de Keizer dipercaya sebagai Master Penguji MC oleh Menteri Pendidikan Nasional sejak 2012 hingga saat ini dan menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Master of Ceremony Indonesia (AMCINDO) pada 2012-2014. Saat ini dipercaya sebagai Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Presenter dan Pembawa Acara Seluruh Indonesia (ASPRINDO).

Selain aktif mengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara Jakarta, Donny juga aktif menjadi pembicara dalam berbagai seminar dan pelatihan untuk bidang komunikasi dan penyiaran. Saat ini Donny dipercaya sebagai Direktur Utama PT Media Dreyasa Komunitama, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang media, rumah produksi, dan mengelola stasiun penyiaran televisi. Ia juga adalah CEO Communicasting Academy, sebuah Lembaga pelatihan profesi bidang komunikasi dan penyiaran terkemuka di tanah air.

Tata Cara Pendaftaran Ruang Buku Kominfo

Ruang Buku Kominfo adalah Akses Koleksi Digital Perpustakaan Kementerian Kominfo

1



Kirimkan nama, NIP, e-mail, & satuan kerja ke:

perpustakaan@mail.kominfo.go.id

Subjek Email :
Pendaftaran Ruang
Buku Kominfo

2

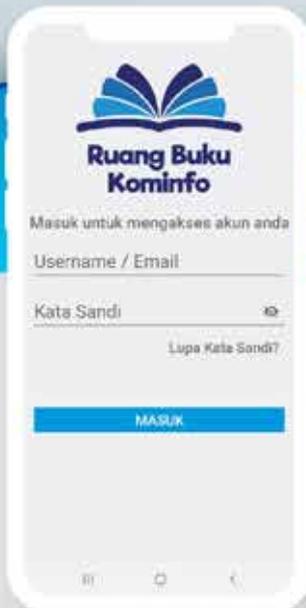


Akan ada e-mail
balasan dari
perpustakaan
kominfo berupa
username/email
dan password

3



Unduh "Ruang
Buku Kominfo"
di playstore/
appstore



4 Masukan
username/email
dan password



5 Klik buku yang
ingin anda pinjam
lalu klik pinjam



6 Selamat
menikmati layanan
EPerpustakaan

Unduh Ruang Buku Kominfo di sini :



Contact Person :
Agung (0813-8336-4421)



CALENDAR OF EVENT

Rabu

Kamis

20TH
KOMINFO
Indonesia Terkoneksi
Semakin Digital, Semakin Maju

Selasa

Rabu

Kamis

Senin

Selasa

KOMINFO
TALK

Kamis

Senin



Rabu

Kamis



20TH
KOMINFO
Indonesia Terkoneksi
Semakin Digital, Semakin Maju

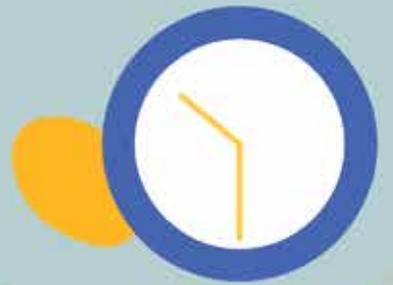
Rabu





Sabtu

Minggu



Sabtu

Minggu



Sabtu



Jumat

Sabtu

Minggu

SEPTEMBER 2021





JUMAT, 3 SEPTEMBER 2021

**LIVE KUIS
DI TIKTOK**

**TOKTOK
KOMINFO**

**LAUNCHING
LOMBA INTERNAL
20 TH KOMINFO**

**LAUNCHING
LOMBA
EKSTERNAL
20 TH KOMINFO
DI MEDIA
SOSIAL**

SENIN, 6 SEPTEMBER 2021

KAMIS, 30 SEPTEMBER 2021

**PUNCAK
AJK 2021**



**TOWN HALL &
ACARA PUNCAK**

**20TH
KOMINFO**
Indonesia Terkoneksi
Semakin Digital, Semakin Maju

SELASA, 28 SEPTEMBER 2021

SENIN, 27 SEPTEMBER 2021



**UPACARA
HARI BHAKTI
POSTEL**

CALENDAR OF EVENT



JUMAT, 10 SEPTEMBER 2021



**LIVE KUIS
DI INSTAGRAM**

**LIVE STREAMING
KOMINFO TALK**

IFAST FEST

RABU, 15 SEPTEMBER 2021

JUMAT, 17 SEPTEMBER 2021

Hoaks

**MISS
LAMBE HOAKS
EDISI SPESIAL**

SELASA, 21 SEPTEMBER 2021

**LIVE KUIS
DI YOUTUBE &
PENGUMUMAN
PEMENANG
LOMBA**

**FINAL
LOMBA
E-SPORTS**



MINGGU, 19 SEPTEMBER 2021

**SEPTEMBER
2021**



01



Syukur dan Refleksi 20 Tahun Kominfo Menteri Johnny: Kawal Transformasi Digital secara Progresif dan Visioner

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memasuki usia ke-20 tahun, tepat di tanggal 13 September 2021. Rasa syukur diiringi dengan refleksi atas jasa dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara harus terus digelorakan. 20 tahun usia Kominfo tentu saja dilewati dengan berbagai capaian kinerja, sukses mengawal visi dan misi pemerintahan dari masa ke masa, hingga membangun komitmen bersama mengawal Indonesia memasuki era transformasi digital.

Selama 20 tahun pula, Kementerian Kominfo dikawal dan dipimpin oleh putra-putra terbaik bangsa, dari Syamsul Muarif hingga saat ini dinakhodai Johnny G. Plate. Terlepas dari upaya bersama mengawal era transformasi digital, Kementerian Kominfo sebagai *leading sector* telah dan akan terus bertransformasi secara progresif dan visioner. Oleh karena itu, Menteri Johnny dalam momentum perayaan 20 Tahun Kominfo mengatakan, lembaga negara ini tetap eksis melayani masyarakat tidak terlepas dari para mantan menteri pada era sebelumnya.

Kementerian Kominfo merumuskan moto baru untuk menyambut era baru transformasi digital, yaitu Makin Digital, Makin Maju. Sejatinya, perubahan-perubahan tersebut merupakan respons yang simultan terhadap geliat perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan berbangsa



“Penghargaan kami sampaikan untuk Bapak-Bapak Menteri semenjak kementerian ini masih mengemban tugas mulia dari awal reformasi, yakni Bapak Syamsul Muarif (almarhum), Bapak Sofyan Djalil, Bapak Muhammad Nuh, Bapak Tifatul Sembiring, dan Bapak Rudiantara,” ujarnya dalam Acara Syukur dan Refleksi 20 Tahun Kominfo, di Lapangan Anantakupa Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (28/09/2021).

Menkominfo mengapresiasi pengabdian, gagasan, visi besar, dan *leadership* dari Menteri Kominfo sebelumnya dalam

memimpin hingga saat ini menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Seluruh perubahan dan kemajuan yang diwariskan oleh para Menteri Kominfo sebelumnya, tentu menjadi pencapaian yang patut kita syukuri. Sehingga hari ini Kominfo dapat melanjutkan pekerjaan-pekerjaan besar untuk mengantar Indonesia menjadi bangsa digital, Indonesia as a *digital nation*,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny pada awal perjalanan Kementerian Kominfo memiliki moto “Menuju Masyarakat Informasi”. Seiring dengan dinamika perkembangan zaman, motto yang diusung pun berubah sesuai dengan dinamika teknologi.

“Kementerian Kominfo merumuskan moto baru untuk menyambut era baru transformasi digital, yaitu Makin Digital, Makin Maju. Sejatinya, perubahan-perubahan tersebut merupakan respons yang simultan terhadap

geliat perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan berbangsa,” tandasnya.

Akselerasi Transformasi Digital

Menurut Menkominfo, sebagai *leading sector* transformasi digital, Kementerian Kominfo terus mendorong implementasi *major project* transformasi digital, sembari meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital di seluruh penjuru Indonesia.

Oleh karena itu, Kementerian Kominfo melakukan akselerasi transformasi digital, dengan mengacu pada lima arahan strategis Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada Agustus 2020 lalu.

“Yakni pertama, mempercepat perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital; kedua, menyiapkan peta jalan atau *roadmap* transformasi digital di sektor-sektor strategis; ketiga mempercepat integrasi pusat data nasional; keempat, menyiapkan sumber daya manusia (SDM) talenta-talenta digital yang kompeten; dan kelima, menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital,” ujarnya.

Menteri Johnny menjelaskan untuk menjalankan lima arahan tersebut, Kementerian Kominfo telah merancang Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024, yang meliputi pembangunan digital di empat sektor strategis.



“Yang pertama infrastruktur digital, yang kedua ekonomi digital, yang ketiga pemerintah digital, dan keempat masyarakat Digital. Keempat sektor strategis itu adalah sektor-sektor yang saat ini menjadi kebutuhan masyarakat, sektor-sektor yang harus kita lakukan dan harus kita laksanakan,” jelasnya.

Menurut Menkominfo, dari berbagai gerak langkah transformatif, Kementerian Kominfo juga terus merealisasikan perannya dalam orkestrasi komunikasi publik bagi masyarakat. Menurutnya, tanpa komunikasi publik yang baik dinilai bisa bekerja dalam senyap.

“Saat ini bekerja harus transparan dan terbuka, sehingga tugas komunikasi publik pemerintah juga diemban oleh Kominfo dalam rangka melakukan orkestrasi dan amplifikasi kebijakan-kebijakan, termasuk yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional,” tandasnya.

Menteri Johnny menegaskan Kementerian Kominfo terus berjuang untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara holistik, konsisten, dan terarah.

“Kominfo pun terus berjuang menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi-informasi yang baik, informasi yang berkualitas kepada masyarakat sehingga menumbuhkan optimisme publik,” jelas Menteri Johnny.

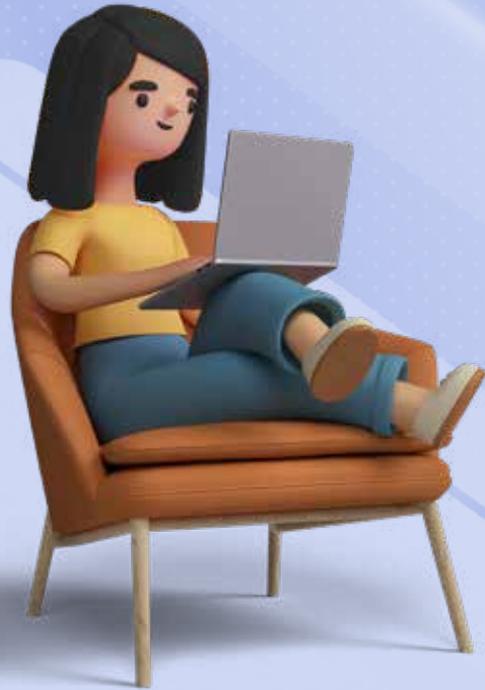
Syukur dan Refleksi 20 Tahun Kominfo dihadiri seluruh pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama serta sivitas Kementerian Kominfo di pusat dan daerah yang tergabung secara virtual.



002



Transformasi Digital dan Mata Air Pendidikan Papua



Oleh:

JH Phillip Gobang
Staf Khusus Menkominfo Bidang Komunikasi Politik

Perjalanan 20 tahun Kementerian Kominfo menorehkan momentum sangat penting terkait transformasi digital, terutama pada masa pandemi Covid-19 saat ini. Disrupsi atau perubahan besar dan fundamental telah mengakselerasi transformasi digital dengan sangat cepat, tidak hanya dialami oleh masyarakat di kota-kota besar tetapi juga memicu inisiatif perubahan di berbagai sektor kehidupan hingga ke pelosok Tanah Air, termasuk di wilayah perbatasan Papua.

Secara umum transformasi digital dipandang sebagai agregasi alat dan proses modern yang dimanfaatkan untuk memecahkan masalah bisnis dan sosial serta melayani kebutuhan pelanggan/konsumen. Secara lebih detail, transformasi digital adalah proses dalam menggunakan teknologi digital untuk menciptakan hal baru atau memodifikasi proses bisnis, budaya, dan pengalaman pelanggan/konsumen yang ada untuk memenuhi perubahan model bisnis dan kebutuhan pasar.

Praktik transformasi digital melalui pengenalan teknologi digital telah memicu penciptaan model bisnis baru dan aliran pendapatan. Lahirnya disrupsi teknologi seperti *cloud computing*, *internet of things*,

artificial intelligence, *big-data analytics*, *advanced robotics*, hingga *virtual reality* telah membawa perubahan di semua bidang kehidupan.

Kendati demikian, transformasi digital bukan hanya tentang teknologi. Itu terjadi dalam perjumpaan antara orang, bisnis dan teknologi, dan dipandu oleh strategi bisnis yang lebih luas. Keberhasilan dalam perjumpaan itu dicapai ketika organisasi dapat secara efektif menggunakan manajemen data dan analitik atau melalui teknologi dengan cara yang memungkinkan perubahan bisnis dan sosial terjadi secara dinamis.

... transformasi digital bukan hanya tentang teknologi. Itu terjadi dalam perjumpaan antara orang, bisnis dan teknologi, dan dipandu oleh strategi bisnis yang lebih luas.

Peran Strategis Kominfo

Mengutip catatan *Marketeers.com*, dalam studi *East Ventures* dan *Katadata Insight Centre*, menyebutkan proses digitalisasi yang meningkat secara cepat selama pandemi Covid-19 ini telah mendorong daya saing digital antarprovinsi di Indonesia makin merata. *East Ventures* adalah perusahaan *venture capital* yang memelopori investasi pada berbagai *startup* digital di Indonesia. Studi bertajuk *East Ventures Digital Competitiveness Index (EV-DCI 2021)* ini untuk memetakan dampak

yakni 7,5 poin menjadi 54,3 poin pada tahun 2021. Sejumlah indikator yang menopang kenaikan skor ini adalah rasio desa yang mendapatkan sinyal 3G dan 4G, rasio rumah tangga yang memiliki sambungan telepon tetap, serta tingkat gangguan listrik.

Kedua, peningkatan pengeluaran untuk teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mengindikasikan bahwa penduduk Indonesia di seluruh provinsi makin banyak menggunakan layanan dan transaksi berbasis digital. Pilar pengeluaran TIK dalam indeks EV-DCI naik 6,3 poin. Sejumlah indikator yang menopang kenaikan skor ini adalah peningkatan rasio rumah tangga yang memiliki pengeluaran untuk TIK, pengeluaran rata-rata rumah

BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) telah memainkan peran yang sangat strategis. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo tentang perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital; *roadmap* transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, sektor penyiaran; integrasi Pusat Data Nasional; penyediaan SDM talenta digital; dan kesiapan regulasi, serta skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital.

Dalam implementasinya, Menteri Kominfo Johnny G. Plate memastikan Rencana Strategis Kominfo 2020-2024 akan dapat dijalankan maksimal dengan tersedianya pendanaan yang signifikan sesuai kebutuhan program. Fokus Renstra Kominfo yakni: membangun dan mengembangkan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses dan konektivitas *broadband* di seluruh wilayah Indonesia; mendorong transformasi digital pada sektor ekonomi dan pemerintahan serta mempersiapkan ekosistem digital dan SDM talenta digital; dan memperkuat ketahanan nasional dan stabilitas Polhukhankam melalui akses informasi dan komunikasi publik dalam kerangka konsolidasi demokrasi.

Fokus Renstra Kominfo yakni: membangun dan mengembangkan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses dan konektivitas broadband di seluruh wilayah Indonesia; mendorong transformasi digital pada sektor ekonomi dan pemerintahan serta mempersiapkan ekosistem digital dan SDM talenta digital; dan memperkuat ketahanan nasional dan stabilitas Polhukhankam melalui akses informasi dan komunikasi publik dalam kerangka konsolidasi demokrasi.

perkembangan ekonomi digital di seluruh penjuru Indonesia.

Pemerataan tersebut tampak dari kenaikan skor median indeks daya saing digital (EV-DCI) dari 27,9 pada 2020 menjadi 32,1 pada 2021. Berdasarkan temuan dari perhitungan indeks EV-DCI, ada dua faktor utama yang mendorong perkembangan dan pemerataan daya saing digital di Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

Pertama, pembangunan infrastruktur digital yang makin merata, tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Infrastruktur digital merupakan pilar EV-DCI dengan kenaikan skor tertinggi,

tangga untuk TIK, serta balas jasa dan upah pekerja di sektor TIK.

Perkembangan signifikan pada kedua pilar EV-DCI tersebut melengkapi kekuatan daya saing Indonesia dalam hal penggunaan TIK. Dengan kenaikan 'hanya' 2,7 poin pada 2021, penggunaan TIK di Indonesia tercatat sebagai pilar EV-DCI dengan daya saing paling tinggi dan memiliki skor yang paling merata dibandingkan dengan pilar lain.

Dalam pencapaian pemerataan daya saing digital di Indonesia, Kementerian Kominfo melalui

Bersamaan dengan percepatan pembangunan infrastruktur digital di setiap desa/kelurahan di seluruh Indonesia, terutama wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan Perbatasan, juga didorong bertumbuhnya ekosistem digital melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya agar sektor-sektor strategis di berbagai daerah dapat dikembangkan dengan adopsi teknologi dan implementasinya pada kawasan-kawasan prioritas (pertanian, maritim, pariwisata, logistik, pendidikan, dan kesehatan) sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan produktivitas sektor strategis.

● Transformasi Pendidikan Papua

Peluang pengembangan sektor strategis di daerah ini misalnya ditangkap oleh Pemda Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, dengan merintis transformasi pendidikan tinggi melalui pendirian Universitas Okmin Papua. Peresmian Universitas Okmin di Oksibil yang dilakukan secara virtual pada Perayaan Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia ini menjadi komitmen kehadiran negara untuk memastikan layanan pendidikan dan akses digital dapat dinikmati anak-anak muda bangsa di mana pun.

Pegunungan Bintang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang dikukuhkan sejak 2002. Secara topografis, kabupaten yang terdiri dari 34 distrik dan 277 desa/kampung ini merupakan wilayah pegunungan dan perbukitan yang terisolir dengan keterbatasan infrastruktur, telekomunikasi, dan akses jalur darat untuk transportasi dan distribusi. Satu-satunya penghubung dengan wilayah lain mengandalkan akses transportasi udara dengan pesawat berukuran kecil.

Oleh karena itu, kehadiran Universitas Okmin Papua sebagai kampus digital juga menjadi momentum untuk membuka keterhubungan dengan dunia luar, sekaligus menjadi sumber 'mata air' pendidikan dan peningkatan kualitas SDM di kawasan Pegunungan Bintang dan sekitarnya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua New Guinea. Inilah sumber harapan untuk mendorong kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini Kementerian Kominfo melalui BAKTI tengah berupaya melakukan pembangunan infrastruktur TIK di setiap titik layanan terdepan pemerintah yaitu desa-desa untuk mengikis kesenjangan akses telekomunikasi. Hingga 2022, akan dibangun 4.380 BTS 4G di wilayah Papua dan Papua Barat, juga menyediakan akses wifi internet untuk pelayanan publik seperti di sekolah, kantor pemerintahan desa dan Puskesmas.

Selain membangun tower-tower BTS, peletakan VSAT dan *power supply* guna menghasilkan *coverage sinyal*, juga melakukan penggelaran *fiber optic*, *microwave link* maupun *ground segment* untuk satelit dan akses-akses internet. Inilah sebagian langkah dari perjalanan 20 tahun Kementerian Kominfo untuk memastikan proses transformasi digital terjangkau ke seluruh penjuru Nusantara.



*) Data diolah dari berbagai sumber: dikti.kemdikbud.go.id, ekon.go.id, kominfo.go.id, marketeers.com.

03



20 Tahun Kominfo: Refleksi, Peluang dan Tantangan



Kominfo harus berbenah diri secara internal, merapikan pola pikir, memperkuat kolaborasi dan mengasah empati. Di masa menantang seperti ini Kominfo harus hadir sebagai solusi bukan sebagai bagian dari masalah



Kementerian Komunikasi dan Informatika memasuki usia ke-20 pada September 2021 tahun ini. Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba menyatakan momentum peringatan ini menjadi refleksi untuk menjemput peluang dalam menghadapi tantangan, juga merupakan saat yang tepat untuk mensyukuri semua yang telah dicapai guna mengambil langkah ke depan.

“Kominfo harus berbenah diri secara internal, merapikan pola pikir, memperkuat kolaborasi dan mengasah empati. Di masa menantang seperti ini Kominfo harus hadir sebagai solusi bukan sebagai bagian dari masalah,” ujarnya ketika membuka acara “Syukur dan Refleksi 20 Tahun Kominfo” yang diselenggarakan secara *hybrid*, dari Lapangan Anatakupa, Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (28/9/2021) pagi.

Beragam proses dan dinamika yang dihadapi telah menghantar Kominfo hingga menembus usia 20 tahun hari ini. “Sejenak menoleh ke belakang, Kominfo yang kita kenal saat ini tidak terlepas dari lahirnya kementerian negara komunikasi dan informasi. Munculnya lembaga ini berawal dari pembentukan Kabinet Gotong Royong yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 288/M tanggal 9 Agustus 2001,” kata Sekjen Mira mengenang kembali sejarah pembentukan Kementerian Kominfo kala itu.

Eksistensi Kominfo kemudian dipertegas dengan melengkapinya seluruh perangkatnya melalui Keputusan Presiden Nomor 101 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara yang ditetapkan pada tanggal 13 September 2001.

Dari awal berdirinya, Kominfo pun telah mengalami perubahan nama. Bermula dari Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi tahun 2001 sampai 2005, lalu dilanjutkan dengan nama Departemen Komunikasi dan Informatika pada kurun waktu 2005-2009 dan kemudian menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika dari 2009 s.d saat ini.

Mengutip sebuah ungkapan *‘What’s in a name? That which we call a rose. By any other name would smell as sweet’* yang sangat populer dari drama romantis *‘Romeo & Juliet’* mahakarya William Shakespeare, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo mengatakan, meski terus mengalami perubahan dalam perjalanan sejarahnya termasuk nama kementerian, Kominfo tetap menorehkan beragam prestasi di setiap periode kepemimpinan.

“Seperti *quote* yang disampaikan Shakespeare, memiliki arti kalaupun bunga



mawar diberi nama lain selain mawar, maka wanginya akan tetap sama. Begitu juga dengan nama Kominfo, bila dianalogikan dengan kutipan tersebut, tetap menorehkan beragam prestasi di setiap periode kepemimpinan walaupun terus mengalami perubahan nama seiring dengan perjalanan sejarahnya,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Sekjen Mira pun memaparkan berbagai contoh dari kebijakan (bersifat *ground breaking*) yang berhasil dilahirkan dari program Kominfo.

“Sebut saja pengaturan pertama *e-Government* di Indonesia pada masa almarhum Pak Samsul Muarif, lelang 3G di masa Pak Sofyan Djalil, pengesahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di masa Pak Nuh, kebijakan pusat data di periode Pak Tifatul dan penyelesaian Palapa Ring di masa kepemimpinan Pak Rudiantara,” paparnya.

● Akses Digital jadi Kunci Masyarakat Pulih di Tengah Pandemi

Selain memaparkan soal kebijakan Kominfo di tahun-tahun sebelumnya, Sekjen Mira juga menyampaikan sejumlah langkah yang telah dilakukan kementerian tempatnya bekerja selama pandemi yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini. Ia mengatakan, salah satu potensi dampak dari pandemi yang harus kita segera respon adalah digital paradoks yang menyebabkan melebarnya kesenjangan di berbagai sektor.

“Jadi, harus disikapi dengan tepat dan cepat. Dengan demikian, kehadiran akses digital di masa pandemi menjadi sangat penting

dan bahkan menjadi kunci penentu kecepatan pulih. Bagi masyarakat yang dapat mengakses dan memanfaatkan layanan digital secara produktif, akan pulih dari pandemi lebih cepat dari mereka yang tidak dapat mengakses," tuturnya.

Oleh karena itu, Kementerian Kominfo saat ini berupaya menjawab kebutuhan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan kualitas layanan digital untuk mempermudah akses pelayanan publik.

"Kualitas layanan kesehatan atau pendidikan misalnya, diharapkan lebih merata di seluruh Indonesia dengan bantuan konsultasi jarak jauh ataupun pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan akses digital. Di era pandemi di mana mobilitas dan interaksi fisik sangat dibatasi, kegiatan perekonomian sangat terbantu melalui pemanfaatan teknologi digital," jelas Sekjen Kementerian Kominfo.

Berdasarkan catatan Bank Indonesia, Sekjen Mira mewnyampaikan, pemanfaatan *e-commerce* di Indonesia saat pandemi dalam kurun waktu tiga bulan pertama di tahun ini telah mencapai 548 juta transaksi dengan jumlah nominal mencapai Rp88 triliun. Sedangkan transaksi sepanjang semester 1 atau enam bulan pertama mencapai Rp186,7 triliun dan hingga akhir tahun ini transaksi diperkirakan mencapai Rp395 triliun.

Dalam merespons tindak masyarakat yang belum bisa bahkan tidak dapat mengakses platform digital saat ini, Mira mempertegas Kemenkominfo akan mempercepat penyediaan akses internet di seluruh Indonesia.

"Dengan memahami kondisi ini, kita, Kementerian Kominfo, meresponnya dengan mempercepat penyediaan akses internet. Antara lain melalui program BTS 4G, Satelit SATRIA-I, Palapa Ring, integrasi *farming* dan *refarming* spektrum frekuensi radio, digitalisasi penyiaran, serta memperkenalkan kebijakan infrastruktur dan *spektrum sharing*," tegasnya.

Selain itu, peningkatan literasi dan keahlian digital juga diupayakan bagi masyarakat maupun yang lebih

segmented.

"Kita juga menjaga ruang digital agar dapat digunakan secara produktif. Sebagai bentuk pemenuhan pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945, kita juga senantiasa mengkomunikasikan kebijakan dan program pemerintah ke masyarakat yang bersamaan dengan itu kita terus berusaha menciptakan ekosistem media yang sehat, berprinsip *fair level playing field* dengan adanya media baru dalam bentuk platform digital," jelas Sekjen Mira.

Selain itu, Kominfo juga menggunakan berbagai forum global sebagai platform dalam memperjuangkan kepentingan dan pandangan Indonesia.

"Di mana mulai 1 Desember, jadi hanya beberapa bulan lagi hingga 1 tahun ke depan, Kementerian Kominfo dipercaya untuk memimpin Digital Economy Working Group pada presidensi Indonesia di G20 Summit tahun depan," tuturnya.

Sekjen Mira menyatakan, beragam prestasi yang telah ditorehkan Kominfo selama 20 tahun merupakan bagian dari wujud memperjuangkan transformasi digital. Menurutnya, transformasi digital bukanlah masalah teknologi.

"*Digital transformation is not about technology. It's about strategy, leadership, and a new way of thinking.* Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Kominfo, kepada kita semua. Semoga apa yang telah kita lakukan berkah dan membawa manfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Syukur dan refleksi kita lakukan untuk 20 tahun kita melangkah, kita ambil peluang dan hadapi tantangan untuk Kominfo Tangguh, Kominfo Tumbuh," tandasnya.

Turut hadir secara fisik dalam acara itu Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate; Menkominfo periode 2004-2007, Sofyan Djalil; Menkominfo periode 2007-2009, Mohammad Nuh; dan Menkominfo Kabinet Kerja 2014-2019, Rudiantara.

Juga para pejabat di tingkat Eselon 1, yaitu Dirjen SDPPI sekaligus Plt. Dirjen PPI, Ismail; Dirjen IKP, Usman Kansong; Kepala Balitbang SDM Kominfo, Hary

Budhiarto; Dirut BAKTI, Anang Latief; Inspektur Jenderal Kominfo, Doddy Setiadi; Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Widodo Muktiyo; serta Staf Ahli Menkominfo Bidang Hukum Henri Subiakto.

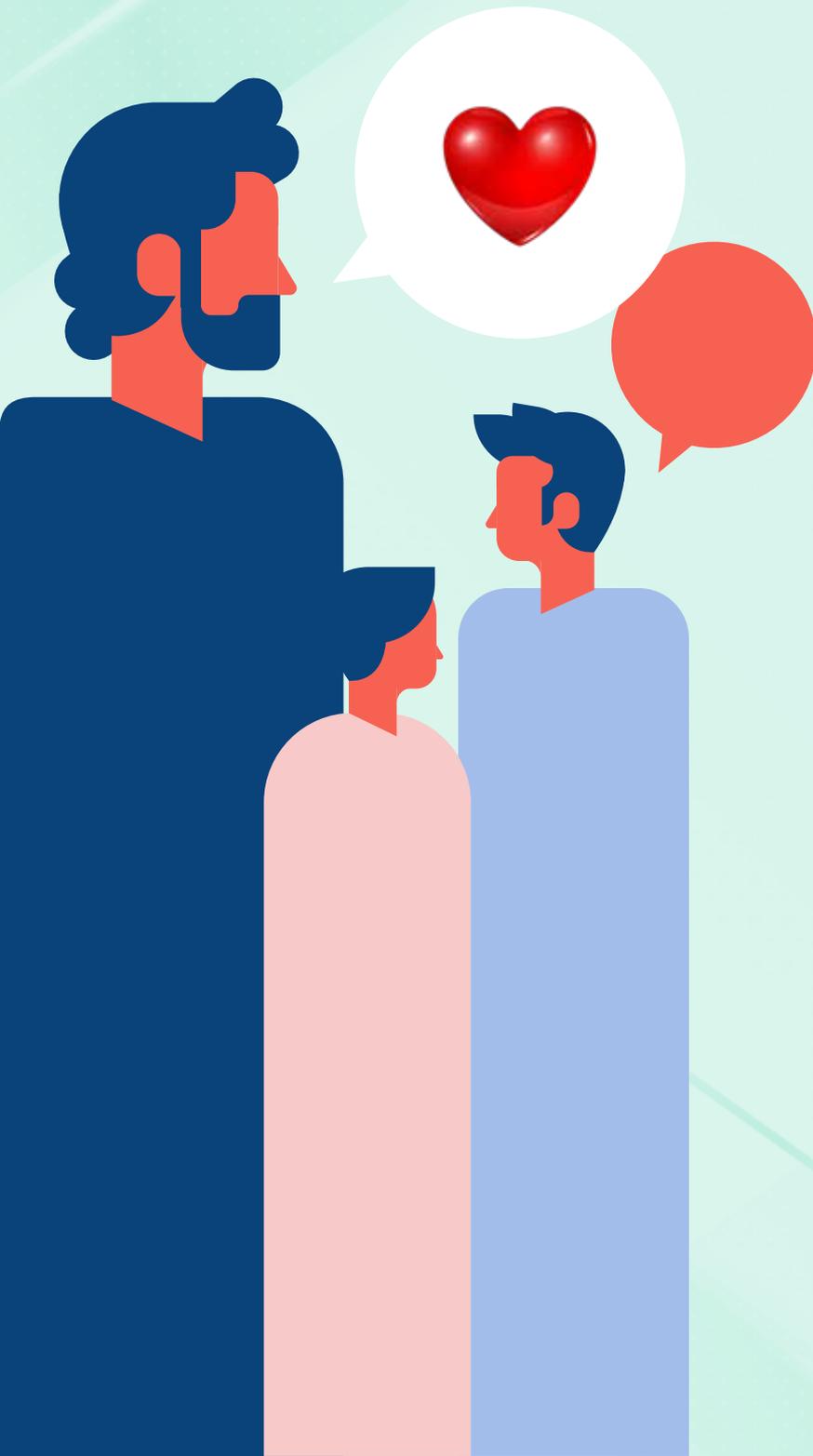
Termasuk pula perwakilan Kominfo dari berbagai daerah yang bergabung secara daring, yakni Kepala STMM Yogyakarta, Noor Iza; Kepala Monpers Ditjen IKP, Widodo; Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Ditjen SDPPI, Tony Tovik Hidayat; Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo, Hamzah; dan Sub Koordinator Layanan Aduan Masyarakat dan Institusi Ditjen Aptika, Taruli.



0044



Bincang Para Mantan Terindah



Tepat pada tanggal 28 September 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika menginjak usia 20 tahun. Usia yang produktif, bila diasosiasikan pada umur hidup manusia.

Oleh karena itu, melalui tema 'Syukur dan Refleksi,' Peringatan 20 Tahun Kementerian Kominfo ditujukan sebagai momentum reflektif untuk melihat peluang dan menghadapi tantangan zaman yang semakin disruptif ini.

Dalam upaya mewujudkan akselerasi transformasi digital, Kementerian Kominfo tidak hanya melihat ke depan, tetapi juga berusaha melihat ke belakang untuk belajar dari pengalaman masa lalu.

Inilah alasan mendasar yang membuat Kementerian Kominfo, dalam puncak acara 20 tahun, mengundang para Menteri Kominfo terdahulu untuk berbincang-bincang santai dalam Talkshow Temu Wicara Mantan Menteri.

Talkshow yang berlangsung sekitar 1 jam tersebut menghadirkan tiga mantan menteri yang hadir yaitu: Dr. Sofyan A. Djalil yang menjadi Menteri Kominfo periode 2004-2007, Prof. Mohammad Nuh yang menjadi Menteri Kominfo periode 2007-2009, dan Rudiantara yang menjadi Menteri Kominfo periode 2014-2019.

Saya merasa bahwa saya bisa duduk di sini, menjadi Menteri Koinfo dan lain-lain karena seseorang menyekolahkan saya waktu itu. Saya diberikan kesempatan. Memberikan kesempatan kepada orang, kemudian itu membuka jalan

Cerita Dr. Sofyan

Dr. Sofyan Djalil yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), menyatakan bahwa perjalanan kariernya di pemerintahan dimulai sejak menjabat sebagai Menteri Koinfo dalam Kabinet Indonesia Bersatu I periode 2004-2007.

Dalam temu wicara tersebut, Menteri Sofyan mengaku bahwa dirinya memiliki begitu banyak pengalaman *memorable* saat memimpin Koinfo. Ia juga mengatakan bahwa dirinya bukan seorang yang ahli dalam bidang ICT. Bahkan untuk membuat *background* Zoom saja dirinya tidak bisa.

"Mungkin saya satu-satunya Menteri Koinfo yang tidak paham ICT. Bahkan, untuk membuat *background* Zoom melalui *handphone* saja tidak bisa," ujar Menteri Sofyan.

Namun, bagi seorang Sofyan Djalil, untuk menjadi Menteri Koinfo tidak harus ahli ICT, melainkan harus mampu membuat *good policy* yang memiliki *added value* kepada bangsa dan negara. "Tiga hal penting untuk mewujudkan *good policy* menurut Menteri Sofyan adalah menjadi pendengar yang baik, *common sense*, dan *management leader*," imbuhnya.

Menteri Sofyan juga mengaku bahwa dirinya memiliki tiga staf khusus yang kompeten dari sisi ICT yang selalu memberikan input-input progresif kepadanya. Bahkan, Koinfo saat itu seolah memiliki empat menteri Koinfo, yaitu dirinya bersama tiga staf khususnya.

"Waktu itu Koinfo punya empat Menteri: saya, Pak Loso, pak Alexander Rusli, Bu Emiliana," kisah Menteri Sofyan dan menambahkan, "Karena kalau apa-apa kita selalu diskusi bareng dan hasil kebijakan pun bisa dikatakan lahir dari diskusi bersama tersebut."

Tentunya, keberhasilan Sofyan Djalil dalam sepek terjangnya menjadi pengisi posisi-posisi strategis tak

lepas dari peran orang-orang baik di sekitarnya.

Menurut pria yang dijuluki menteri Teh Botol yang sudah bolak-balik jadi menteri hingga saat ini, tidak mungkin dirinya bisa seperti saat ini tanpa kesempatan yang diberikan kepadanya pada masa lampau untuk melanjutkan sekolah hingga ke luar negeri telah membuka perjalanan karirnya.

"Saya merasa bahwa saya bisa duduk di sini, menjadi Menteri Koinfo dan lain-lain karena seseorang menyekolahkan saya waktu itu. Saya diberikan kesempatan. Memberikan kesempatan kepada orang, kemudian itu membuka jalan," ujarnya dalam kesempatan tersebut dan melanjutkan, "Saya sangat berhutang budi kepada pak Marzuki Usman yang memberikan kesempatan saya sekolah ke Amerika."

Sebagai bentuk rasa syukur, seraya meneruskan legasi, Sofyan Djalil mengisahkan bahwa isu SDM menjadi salah satu fokus utama di era kepemimpinannya sebagai Menteri Koinfo. Ia juga mulai memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bersekolah dengan harapan mereka yang terpilih akan semakin berkembang.

"Waktu saya sampai di sini, kita melakukan penataan frekuensi dan kemudian tender frekuensi. Saya bilang Menteri Keuangan waktu itu, tolong disiapkan, saya perlu mengirim 200 orang tiap tahun. Dengan visi yang sama, dalam rangka mendidik generasi muda, akhirnya dialokasikan," tuturnya.

Ia bersyukur karena Menteri Keuangan kala itu, yaitu Sri Mulyani Indrawati setuju untuk mendukung pendanaan kepada 200 orang Pegawai Negeri Sipil untuk kuliah di luar negeri setiap tahunnya. "Bu Ani (Menteri Keuangan) juga punya visi yang sama dalam rangka mendidik generasi muda, akhirnya dialokasikan," ujarnya.

Menurut Menteri Sofyan Djalil, pemerintah dituntut untuk mencari generasi penerus bangsa yang potensial dan memiliki keinginan untuk maju. "Makanya waktu itu,

pokoknya siapa saja yang bisa sekolah dan diterima di universitas terbaik kita biayain, gak peduli apakah orang Kominfo atau bukan," jelasnya.

Setelah memberikan kesempatan untuk bersekolah, Sofyan A. Djalil juga mencari orang-orang paling potensial dan memiliki keinginan untuk maju. Dalam hal ini, ia juga menerapkannya saat membuka rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Kominfo saat itu.

"Tahap pertama tidak perlu bawa apapun, yang penting ikut saja. Tahap kedua baru ditunjuk bahwa yang ikut benar yang bersangkutan. Tahap ketiga dipilih 10 kali dari yang dibutuhkan. Tahap keempat baru kemudian kita mengambil dua kali dari kebutuhan. Terakhir diwawancara. Dengan seleksi yang seperti itu saya yakin kita mendapat orang-orang yang terbaik," tegasnya.

Ia juga bersyukur karena para penerima beasiswa generasi pertama di Kominfo kala itu justru telah menjadi pejabat pemerintahan saat ini.

"Alhamdulillah generasi pertama yang dulu sekolah dapat waktu saya dulu di sini, sekarang hebat-hebat itu. Saya percaya dengan apa yang tadi anda kemukakan, bapak-bapak ini juga punya visi yang sama, karena inilah sumber daya yang paling penting untuk memajukan negara. Orang-orang pintar yang punya semangat, punya komitmen, karakter, ini adalah orang-orang yang akan memimpin Indonesia ini menjadi lebih baik ke depan," tambah Sofyan.

Dalam acara tersebut, ia juga berkisah bahwa salah satu pengalaman menarik lainnya ialah saat Ditjen Postel ditarik dari Kementerian Perhubungan ke Kementerian Kominfo pada tahun 2005.

Kendati ada begitu banyak tarikan politik, Sofyan Djalil berhasil meyakinkan Presiden dan Wakil Presiden bahwa pemindahan payung besar Ditjen Postel ke



Kemenkominfo adalah pilihan terbaik, dalam rangka mewujudkan kebijakan pengembangan telematika (telekomunikasi, informatika dan media penyiaran) satu atap di Indonesia.

Menteri Sofyan juga mengisahkan tentang migrasi sinyal 2G ke 3G bagi penyedia layanan telekomunikasi yang sifatnya tender. Karena sistem tender sebelumnya dirasa bersifat monopolistik, Menteri Sofyan pun melakukan diskresi atas kebijakan yang ada sehingga masing-masing penyedia mendapat blok sinyal frekuensi yang sama.

Tidak tanggung-tanggung, Menkominfo, Sofyan Djalil kala justru membuka ulang membuka tender pita frekuensi. Tender tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan penawaran harga spektrum secara terbuka dan transparan kepada masyarakat. Akhirnya, tender tersebut menghasilkan vendor yang kompeten dan progresif dengan harga spektrum yang *competitive value* secara fair.

Menteri Sofyan mengatakan bahwa kala itu, Telkomsel mendapatkan blok pertama karena bersedia membayar 250 miliar per tahun, selanjutnya Indosat mendapat blok kedua karena bersedia membayar 200 miliar per tahun, dan XL mendapatkan blok ketiga karena bersedia membayar 180 miliar per tahun. Kebijakan ini kemudian membuat tambahan pemasukan negara yang cukup besar.

Curhat Prof Nuh

Sementara itu, Menteri Kominfo periode 2007 – 2009 M. Nuh memberikan pandangan mengenai peran Kementerian Kominfo yang telah memasuki usia 20 tahun. Menurutnya, lembaga negara yang kini dipimpin Menkominfo Johnny G. Plate ini harus menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah.

“Kominfo punya peran sebagai jembatan itu, kalau sebagai jembatan maka dimana-mana ujungnya di dua bela pihak, kalau hanya satu titik tidak bisa dijembatani. Oleh karena itu, kalau saya boleh memberikan pandangan, perkuatlah dua titik masing-masing, baik titik dari sisi pemerintah tentunya, tapi juga titik yang ada di masyarakat,” ujarnya.

Menurut Prof. Nuh, tidak hanya sisi pemerintah yang perlu diperkuat, tetapi juga masyarakat dalam satu sinergitas, karena setiap persoalan akan muncul jika tidak terhubung secara baik atau *disconnect*.

“Kominfo bisa memperkuat jembatan antara kementerian sendiri di antara pemerintahan, juga jembatan dengan masyarakat, karena ujung-ujungnya ke negara.

Kalau negara kan kumpulan dari pemerintah dan masyarakat, demikian juga dengan pilar-pilar yang lain,” jelasnya

Prof. Nuh juga menjelaskan Kementerian Kominfo sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat tidak cukup hanya satu arah, melainkan dua arah di mana satu sisi diambil dan sisi lainnya dikasih.

“Pada saat mengambil atau mengasih, yang paling mahal temperaturnya harus dijaga. Sehingga Kominfo menjadi penyejuk di saat panas dan menjadi penghangat di saat dingin. Kalau itu bisa kita lakukan, maka tenang,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Nuh sedikit berkisah tentang keberhasilan Kominfo pada masa kepemimpinannya dalam merancang dan meng-gol-kan sejumlah regulasi penting bagi Indonesia di sektor Komunikasi dan Informatika.

Ada empat RUU yang berhasil digolkan menjadi UU kala itu, yakni: UU No 11/2008 tentang ITE, UU No 14/2008 tentang KIP, UU No 44/2008 tentang Pornografi, dan UU No.38/2009 tentang Pos. Keempat

UU tersebut merupakan beberapa agenda besar peninggalan Menteri Sofyan A. Djalil yang diamanatkan kepadanya.

Prof Nuh, dalam kesempatan tersebut juga mengatakan bahwa dalam membangun bangsa, paradigma yang harus dipakai adalah paradigma “dan” bukan “atau.”

“Kita perlu menggunakan *and paradigm*, bukan *or paradigm*,” tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa tugasnya bukan hanya untuk mendukung pemerintahan, tetapi lebih dari itu mendukung pembangunan bangsa. “Jadi paradigmanya harus digeser, dari sekedar untuk pemerintah, ke untuk negara. Kalau hanya untuk pemerintah, itu kecil dampaknya,” imbuhnya.

Landasan ini didasarkannya pada kesadaran bahwa pemerintahan hanya berlangsung selama lima tahun dan akan berganti. Tapi negara dan bangsa akan ada sepanjang waktu. “Kita tidak dihadapkan pada pilihan demi Pemerintah atau Negara, melainkan demi pemerintah dan lebih dari itu, demi negara,” imbuh Prof Nuh.



Pada saat mengambil atau mengasih, yang paling mahal temperaturnya harus dijaga. Sehingga Kominfo menjadi penyejuk di saat panas dan menjadi penghangat di saat dingin. Kalau itu bisa kita lakukan, maka tenang

"Pemerintah ya. Negara ya. Karena pemerintah hanya berlangsung selama lima tahun. Namun, negara akan ada sepanjang tahun. Jadi, Pemerintah dan Negara. Bukan Pemerintah atau Negara."

Prof. Nuh juga mengatakan bahwa dalam upaya membangun bangsa, harus ada kolaborasi yang simultan dari semua pihak, melampaui etnis, suku, ras, dan agama.

"Filosofi yang saya pakai adalah mengubah pandangan dari saya ke kami, dari kami ke kita," imbuhnya seraya menambahkan, "Maksudnya apa? Maksudnya ialah membangun kolaborasi dengan semua pihak dalam upaya membangun bangsa ini, yang adalah milik semua anak bangsa tanpa terkecuali. Karena, tidak ada saya atau kami, yang ada ialah kita semua dalam satu paradigma pembangunan bangsa."



Prof Nuh mengakui bahwa salah satu pengalaman yang menarik saat menjabat sebagai Menteri Kominfo adalah menurunkan tarif pulsa dari termahal kedua di dunia menjadi yang termurah.

Diceritakan bahwa pada tahun 2008, tarif interkoneksi telepon/pulsa antar layanan di Indonesia dan sambungan luar negeri cukup mahal. Salah satu konsekuensinya, hanya kalangan menengah ke atas yang bisa menggunakan telepon/handphone. "Ada datanya. Pada waktu itu, negara dengan tarif termurah adalah Hongkong, diikuti Thailand, India, Korea Selatan, dan Malaysia. Sedangkan Indonesia berada pada urutan kedua termahal setelah China," tutur Prof Nuh.

Melihat permasalahan ini, Menteri Nuh lantas memanggil Direktur Telkom kala itu, Renaldi untuk mendiskusikan ihwal tersebut. Di hadapan Direktur Telkom, Menteri Nuh meyakini dan membuat hitungan bahwa pihak Telkom tidak akan merugi bila menurunkan tarif interkoneksi. "Pak Rhein. Anda elektro dan saya

juga elektro. Tidak usah mengundang org lain yang ahli karena kita juga adalah ahli. Mari kita diskusikan hal ini," cerita Prof Nuh.

Kemudian dirinya merincikan di sebuah *white board* di ruang kerjanya terkait urusan kode akses, urusan interkoneksi, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari perincian tersebut adalah Telkom tidak akan rugi. Hal tersebut lantas membuat Direktur Telkom kala itu berkenan menerima saran Menteri Nuh untuk menurunkan tarif interkoneksi yang mana hal tersebut menghasilkan *win win solution* bagi Telkom di satu sisi, dan masyarakat di sisi lain.

Sebagai informasi, interkoneksi merupakan transaksi antar-operator yang memungkinkan terjadinya panggilan *offnet* atau antar-operator. Sementara tarif *on net* adalah tarif yang dibebankan pada penggunaan jaringan yang sama. Tarif *offnet* dibebankan pada penggunaan lintas jaringan, misalnya, antar-operator.



Saya bersyukur karena Indonesia tidak mengatur dari awal mengenai *apps*. Coba kalau dulu disetujui demo mengenai transportasi online. Apa yang terjadi? Kita di rumah, apalagi PPKM. Mau beli, mau lewat mana? Gofood tidak jalan. Semua Grab tidak jalan

Ucap Chief RA

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kominfo Rudiantara periode 2014 – 2019 menyatakan, Kementerian Kominfo di era kepemimpinan Menteri Johnny G. Plate lebih banyak dan lebih luas dalam membangun infrastruktur. "Jadi itu kesan saya, saya ucapkan selamat dua tahun ini lebih banyak yang dibangun, lebih luas yang dibangun dari sisi infrastrukturnya," imbuhnya.

Selain itu, pria yang akrab disapa Chief RA tersebut kemudian mengatakan bahwa saat ini dinamika di dunia teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang.

Ia mencontohkan tentang ekosistem NDA (*Network, Device, dan Apps*), di mana dari sisi *network* dilihat dari sisi operator seluler di Indonesia pendapatannya dalam setahun sekitar Rp200 triliun. Demikian juga dengan *device* seperti ponsel dan tablet berkisar Rp80 triliun dalam setahun.

"Tapi kalau kita bicara *apps* (aplikasi/platform), platform *e-commerce* saja seperti Bukalapak, Tokopedia atau Shoppe, satu bulan satu milyar. Jadi sudah jauh lebih besar ekosistem yang ketiga ini yang berbasis *apps* dibanding ekosistem *network* dan *device*-nya," tuturnya.

Chief RA pada acara tersebut juga bersyukur karena pemerintah tidak mengatur dari awal tentang *apps*, tetapi justru memfasilitasinya. Hal tersebut menurutnya sangat baik efeknya pada situasi Pandemi Covid-19 sekarang ini.

"Saya bersyukur karena Indonesia tidak mengatur dari awal mengenai *apps*. Coba kalau dulu disetujui demo mengenai transportasi *online*. Apa yang terjadi? Kita di rumah, apalagi PPKM. Mau beli, mau lewat mana? Gofood tidak jalan. Semua Grab tidak jalan," ujarnya.

Chief RA juga bersyukur karena saat ini, pemerintah tidak hanya mengurus soal izin, tetap memfasilitasi bahkan mengakselerasinya. Ia kemudian mengapresiasi upaya pemerintah lewat arahan Presiden Joko Widodo yang meminta untuk menjadikan 25 unicorn di Indonesia. Upaya tersebut menurutnya merupakan komitmen pemerintah dalam memfasilitasi ekosistem.

Acara Syukur dan Refleksi 20 Tahun Kominfo tersebut dihadiri oleh seluruh pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama serta sivitas Kementerian Kominfo di pusat dan daerah yang tergabung secara *online* dan *offline*.



05



Dedikasi Dua Dekade Kementerian Kominfo dalam Membangun Konektivitas Indonesia

Oleh:

Ismail
Direktur Jenderal SDPPI Kominfo
Plt. Direktur Jenderal PPI Kominfo

Selama dua puluh tahun ke belakang, Kementerian Kominfo telah memainkan peran penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Ada begitu banyak kontribusi yang telah Kementerian Kominfo berikan untuk Indonesia, salah satunya yaitu dalam proses menuju transformasi digital. Kementerian Kominfo berkomitmen untuk terus berupaya dalam mengakselerasi transformasi digital dengan empat sektor strategis, yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.

Pembangunan infrastruktur digital adalah unsur yang sangat penting dan strategis untuk dilaksanakan, terutama ketika hampir seluruh lini kegiatan masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini membutuhkan internet. Infrastruktur digital ini menjadi hal utama agar masyarakat dapat memperoleh berbagai akses mulai dari akses pendidikan, aktivitas ekonomi, dan bahkan akses untuk bersosialisasi.



Pembangunan infrastruktur digital adalah unsur yang sangat penting dan strategis untuk dilaksanakan

Akselerasi transformasi digital yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo ini pun harus dibarengi dengan semangat menjamin pengakuan dan penghormatan atas perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia

Oleh karena itu, Kementerian Kominfo mendorong infrastruktur digital yang berkualitas dan inklusif dalam rangka peningkatan konektivitas nasional. Hingga kini, tercatat lebih dari 70 ribu desa/ kelurahan di Indonesia yang telah terjangkau layanan 4G. Selain itu, Kementerian Kominfo mengharapkan infrastruktur 5G nantinya dapat dibangun oleh operator di daerah strategis seperti di lima destinasi wisata prioritas dan kawasan industri. Implementasi 5G di Indonesia ini pun telah mendapat dukungan dari sisi regulasi, yakni dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan fleksibilitas dengan adanya *spectrum sharing* dan juga fasilitas dari pemerintah daerah dalam rangka pembangunan infrastruktur digital.

Infrastruktur digital yang dibangun tentunya membutuhkan ketersediaan spektrum frekuensi yang memadai. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah berusaha memberikan yang terbaik untuk dapat menyediakan spektrum frekuensi yang efisien dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Berbagai usaha seperti *farming* dan *refarming* telah dilakukan agar layanan seluler 4G dapat sampai kepada masyarakat secara maksimal. Pengembangan ekosistem industri perangkat TIK pun juga terus dilakukan agar spektrum frekuensi yang telah disediakan dapat digunakan secara optimal dan juga Indonesia dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam industri TIK.

Perjalanan Kementerian Kominfo selama dua dekade ini tentunya tidak selalu berjalan mulus, melainkan diwarnai pula dengan berbagai tantangan. Sulitnya pencapaian sinyal selama ini bukanlah tanpa alasan, melainkan karena topografi Indonesia yang sulit dijangkau, sebaran penduduk rendah, serta tingkat komersial yang kurang dilirik. Namun demikian, hal ini tidak menghentikan perjuangan Kementerian Kominfo untuk mendorong keberpihakan terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan, terluar, dan

tertinggal (3T) demi mewujudkan pemerataan infrastruktur digital. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo telah membangun ribuan Base Transceiver Station (BTS) untuk daerah yang belum terlayani akses telekomunikasi seluler dan berkomitmen untuk menyediakan sinyal di seluruh kelurahan/desa di Indonesia yang akan diselesaikan pada tahun 2022.

Upaya mewujudkan digitalisasi pemerintahan juga menjadi fokus Kementerian Kominfo selama ini. Penyelenggaraan pemerintahan diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar dapat memberikan layanan prima kepada masyarakat. Kementerian Kominfo terus berupaya mengembangkan aplikasi dan data yang terintegrasi sehingga administrasi pemerintahan, pelayanan publik, serta biaya belanja TIK Pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dengan membawa harapan Indonesia untuk dapat memiliki perekonomian yang kuat dan berdaya saing di tingkat global, Kementerian Kominfo juga turut berkiprah dalam percepatan transformasi digital pada sektor bisnis. UMKM sebagai kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia tentunya perlu diberdayakan dan mendapat dukungan dari Pemerintah, salah satunya dengan mendorong UMKM Go Digital. Salah satu strategi Kementerian Kominfo untuk mewujudkan target UMKM Go Digital ini adalah dengan menyediakan akses internet sampai ke desa-desa. Adanya akses internet dapat membantu masyarakat

di seluruh wilayah Indonesia untuk berpartisipasi memanfaatkan dan memasarkan usahanya melalui platform digital.

Yang tidak kalah penting adalah masyarakat juga harus mendapatkan literasi digital secara berkelanjutan agar dapat memanfaatkan teknologi untuk peningkatan kualitas hidup. Kementerian Kominfo telah berhasil mengembangkan talenta-talenta digital dengan berbagai program pelatihan, antara lain yaitu Digital Leadership Academy, Digital Talent Scholarship, dan Gerakan Nasional Literasi Digital. Program literasi digital ini terbuka secara luas tanpa dipungut biaya dengan mengusung empat pilar dalam kurikulumnya, yaitu *digital ethics*, *digital safety*, *digital skills*, dan *digital culture*. Dengan adanya program pelatihan ini diharapkan masyarakat dapat memiliki kecakapan digital dan daya saing di sektor teknologi.

Akselerasi transformasi digital yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo ini pun harus dibarengi dengan semangat menjamin pengakuan dan penghormatan atas perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia. Sampai saat ini Kementerian Kominfo terus berupaya dalam merampungkan

penyusunan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Dengan demikian, Indonesia dapat memiliki ruang digital yang aman dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Semua pencapaian yang telah disebutkan di atas tidak kemudian membuat Kementerian Kominfo berhenti melangkah. Sebaliknya, Kementerian Kominfo menyadari bahwa masih banyak perubahan yang harus dilakukan khususnya dalam bidang teknologi dan informatika agar lebih baik ke depannya. Harapannya, tulisan tentang napak tilas dua puluh tahun Kementerian Kominfo ini dapat menjadi penyemangat dan inspirasi bagi generasi muda penerus bangsa agar terus konsisten berkontribusi untuk Indonesia.



05



Urgensi Pelatihan Kepemimpinan Digital dan Talenta Digital untuk Masyarakat Berbasis SKKNI

Oleh:

Hary Budiarto
Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan SDM Kominfo

Model kepemimpinan yang dibutuhkan di era digital setidaknya bercirikan: (1) memiliki komitmen yang kuat untuk efisiensi dalam menyelesaikan masalah publik sekaligus mampu menekan interes personal; (2) memiliki pemahaman dan apresiasi tinggi terhadap teknologi informasi; dan (3) mampu mengintegrasikan semua urusan publik dalam satu kesatuan sistem (Garcia, J.R.G., dan Moyano, I.J.M., 2007).

Bagi para pembuat kebijakan di Indonesia, saat ini terdapat empat tantangan kepemimpinan di era digital, yakni dalam: (1) mendorong transformasi digital sebagai perubahan cara hidup baru; (2) memfasilitasi tata kelola e-government dan bisnis digital; (3) menyusun kebijakan atau legislasi untuk mendukung transformasi digital; serta (4) meningkatkan kinerja melalui penyiapan dan pengembangan SDM di bidang digital.

Berdasarkan laporan AMROP Global Digital Practice, saat ini terdapat beberapa kendala organisasi di dunia dalam melihat para pimpinan eksekutifnya, yakni: a. 70% organisasi melaporkan bahwa para pimpinan mereka tidak cukup memahami tantangan era digital yang diemban oleh posisi kepemimpinan mereka; b. 60% organisasi memiliki kepemimpinan yang kurang menyisihkan cukup waktu serta masih terpaku pada dampak jangka

pendek dalam mewujudkan inisiatif digital; c. 50% organisasi memiliki kepemimpinan yang lebih berfokus pada pendapatan saat ini daripada keuntungan di masa depan, serta tidak memiliki kepemimpinan yang dinamis dan tangkas dalam memutuskan dan mewujudkan peluang digital; d. 40% organisasi memandang pemimpin mereka hanya melihat digitalisasi sebagai sesuatu yang mendukung atau meningkatkan kegiatan operasi semata

Kompetensi kepemimpinan digital mencakup proses: (1) penyusunan strategi; (2) pengembangan ekosistem digital yang solid antar pemangku kepentingan; (3) peningkatan kompetensi teknis di bidang digital; serta (4) penciptaan budaya, pola pikir, dan keterampilan digital guna menciptakan masyarakat yang lebih produktif dalam memanfaatkan teknologi digital (*productive adopter*). Saat ini, konsep pemimpin digital bisa disebut sebagai Chief Transformation Digital Officer (CTDO).

Peran CTDO telah mengalami perkembangan mengikuti peningkatan kemajuan teknologi digital yang semakin kompleks dan multidimensi. *Best practice* dari organisasi swasta, organisasi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah di belahan dunia, telah



banyak menunjukkan dan menempatkan posisi CTDO dalam jabatan strategis yang menentukan keberhasilan perencanaan, implementasi dan investasi teknologi digital. Menurut *Society of Information Technology Management (Socitm) Learning "taster session" Developing the new digital leadership role* bertanggung jawab sebagai agen pembawa perubahan untuk mentransformasikan pemanfaatan teknologi informasi dalam organisasi.

Peranan CTDO diantaranya adalah : 1). memastikan sumber daya informasi dikelola dan dipelihara dengan baik; 2). memastikan tata kelola informasi yang tepat dan aman; 3). membantu proses bisnis untuk mengenali potensi

teknologi informasi; 4). membangun kepercayaan dalam memfungsikan teknologi informasi; 5) sebagai ujung tombak dalam transformasi bisnis organisasi; 6). memastikan bahwa teknologi bekerja; 7). meningkatkan kemampuan teknologi dan memungkinkan terjadinya perubahan kapasitas.

Kepemimpinan digital merupakan salah satu kunci keberhasilan transformasi digital nasional mengingat para pemimpin semakin dituntut untuk memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang tangkas dan relevan dengan perkembangan era digital. Para pemimpin digital memerlukan: (1) pengetahuan substantif yang menstimulasi pemikiran-pemikiran segar, dinamis, dan visioner; serta (2) kesempatan untuk berinteraksi dan bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem digital nasional maupun global agar *ecosystem exposure* ini dapat bermuara pada penyusunan berbagai kebijakan maupun strategi yang dapat semakin mendukung pengembangan ekosistem digital di Indonesia.

Untuk itu diperlukan program pelatihan unggulan sebagai manifestasi dari kerjasama *triple helix* antara unsur Pemerintah, pelaku bisnis, serta akademisi, dalam mendorong akselerasi transformasi digital di Indonesia. Balitbang SDM hadir menginisiasi kerja sama tersebut dengan membuat pelatihan yang di juluki Digital Leadership Academy (DLA) yang pada tahun 2021 ini akan diberikan kepada 300 peserta di level pimpinan tinggi maupun Chief-Level dari sektor publik maupun sektor privat di Indonesia. Pelatihan ini berfokus untuk meningkatkan kepemimpinan digital sebagai titik kritikal dalam mendorong akselerasi transformasi digital nasional.

Pelatihan Talenta Digital

Dalam laporan World Economic Forum yang bertajuk "The Future of Jobs", saat ini industri tengah bergerak untuk mengubah operasionalisasi usaha, rantai nilai (*value chain*), lokasi kerja, hingga jumlah pekerja mereka, mengingat pada tahun 2025 mendatang, 43 persen pelaku industri tersebut terindikasi akan melakukan reduksi jumlah tenaga kerja



mereka sebagai konsekuensi dari pilihan integrasi teknologi, khususnya teknologi digital, yang akan mereka adopsi.

Perubahan ini berpotensi meningkatkan kesenjangan keterampilan di bidang digital (*digital skill gaps*), serta *soft-skill* terkait *critical thinking and analysis, problem-solving, dan self-management* seperti *active learning, resilience, dan flexibility*. 94 persen pemimpin industri mengharapkan agar para pekerja dapat mengambil pelatihan-pelatihan terkait keterampilan baru di bidang digital. Tidak hanya itu, para pekerja yang tetap bekerja dengan keterampilan eksisting tanpa melakukan *reskilling* juga akan terdampak, mengingat 40 persen keterampilan inti pekerjaan saat ini akan berubah dalam empat tahun ke depan sehingga 50% dari para pekerja tersebut membutuhkan *reskilling*, khususnya terkait keterampilan di bidang digital.

Balitbang SDM turut mendukung kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan talenta

di bidang digital di Indonesia seraya mengikis *digital skills gap* yang ada di masyarakat melalui upaya akomodasi kebutuhan keterampilan digital yang makin terdiversifikasi dalam dunia industri saat ini, seperti Big Data Analytics dan Cybersecurity. Selain itu, mempersiapkan kecakapan *soft-skill* 4C, yakni Critical Thinking, Creativity, Collaboration, dan Communication juga semakin dibutuhkan. Untuk itu, Kementerian Kominfo memfasilitasi pelatihan keterampilan tersebut guna mewujudkan Masyarakat Digital Indonesia yang andal dan resourceful.

Melalui Digital Talent Scholarship (DTS), Balitbang SDM memfasilitasi berbagai pelatihan kecakapan digital tingkat *intermediate* (menengah) yang dirancang untuk mengakselerasi produktivitas nasional. Sebanyak 100.000 peserta ditargetkan untuk dapat mengikuti DTS pada tahun ini, di mana target tersebut akan ditingkatkan mulai tahun depan menjadi 200.000 peserta setiap tahunnya, sehingga pada 2024 mendatang program DTS dapat menjangkau total 700.000 peserta

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SKKNI merupakan standar kompetensi yang berlaku secara nasional di Indonesia. SKKNI bukan standar kompetensi individual perusahaan, tetapi standar kompetensi yang bersifat lintas perusahaan. Dengan demikian, SKKNI harus dapat diterapkan dan berlaku untuk semua perusahaan sejenis. SKKNI, bukanlah standar kompetensi yang statis. SKKNI direviu secara periodik untuk mengetahui validitasnya terhadap perkembangan persyaratan pekerjaan. Periodisasi Reviu SKKNI berbeda untuk setiap bidang profesi. Hal itu tergantung pada tingkat kecepatan perubahan persyaratan pekerjaan, di masing-masing bidang profesi. Reviu SKKNI bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi misalnya, tentu lebih cepat dibanding dengan review SKKNI di bidang Logam Mesin.

SKKNI merupakan pondasi dari pengembangan pelatihan berbasis kompetensi. Posisinya sangat strategis, yaitu sebagai acuan untuk pengembangan program pelatihan maupun untuk acuan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi profesi. Oleh karena itu, pengembangan SKKNI haruslah menjadi "tugas bersama" semua *stakeholder* di semua sektor dan bidang profesi. Untuk itu pelatihan Kepemimpinan Digital maupun Talenta Digital yang semua berbasis *skill* dan kompetensi haruslah mengambil referensi atau skema yang ada dalam SKKNI sehingga bisa di standarisasi secara Nasional dan *outputnya* pun dapat 'dipertanggungjawabkan'. Langkahnya sebenarnya sederhana, misalnya kurikulum yang digunakan dalam pelatihan DLA dapat didaftarkan sebagai standar khusus yang nanti di kemudian hari akan dibuatkan skema SKKNI dengan nama Skema Jabatan Pimpinan Digital di Indonesia.

● Peta Okupasi untuk Talenta Digital

Peta Okupasi Nasional yang merupakan dokumen yang disusun untuk memetakan jenis-jenis jabatan/okupasi/profesi yang ada di berbagai bidang, sub bidang maupun area fungsi di semua jenis pekerjaan. Pengembangannya menggunakan pendekatan area fungsi dari proses kerja atau okupasi/jabatan/profesi suatu kegiatan usaha/industri/pekerjaan sejenis.



Unit kompetensi dalam suatu okupasi merupakan unit kompetensi yang diambil dari SKKNI dan standar internasional yang telah terelaborasi ke dalam komponen-komponen pembentuknya, terutama elemen kompetensi dan kunci unjuk kerja. Dari unit-unit kompetensi ini dapat disusun skema sertifikasi yang sesuai dengan okupasi atau jabatan tertentu.

Saat ini, Kemenkominfo menjadi fasilitator untuk penyusunan peta okupasi untuk talenta digital yang terdiri dari bidang Komunikasi, Teknologi Informasi dan Telekomunikasi. Skema sertifikasi untuk talenta digital dikembangkan mengacu kepada kemasam kompetensi beserta persyaratan spesifik terhadap kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.

Skema sertifikasi diklasifikasikan secara sama sebagai skema sertifikasi KKNI, skema sertifikasi okupasi nasional, atau skema sertifikasi klaster. Dalam mengembangkan skema sertifikasi KKNI dan okupasi nasional, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) harus berdasarkan kemasam KKNI dan/atau okupasi nasional yang terdapat didalam SKKNI atau kemasam yang telah ditetapkan oleh instansi teknis, atau menggunakan skema sertifikasi yang telah ditetapkan melalui

mekanisme Komite Skema Sertifikasi BNSP. Skema sertifikasi yang dikembangkan oleh LSP tersebut pada dasarnya adalah dalam rangka memberikan pelayanan sertifikasi kepada para pemangku kepentingannya.

Skema sertifikasi menetapkan metode uji kompetensi untuk menilai kompetensi secara tertulis, lisan, praktek, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.

Di Indonesia, sertifikasi kompetensi talenta digital berdasarkan SKKNI dilaksanakan oleh LSP baik LSP kategori P1, P2 maupun P3 yang terlisensi BNSP. Untuk bisa melakukan sertifikasi kompetensi LSP harus mengajukan pembuatan/ penambahan lingkup skema uji kompetensi kepada BNSP. LSP melaksanakan sertifikasi kompetensi sesuai dengan ruang lingkup lisensi dari BNSP dan selama lisensi dari BNSP tersebut masih berlaku. Untuk menuju Indonesia maju yang lebih digital dan menguasai ekonomi digital, diperlukan sertifikasi kompetensi talenta digital di berbagai area fungsi dan seluruh tingkatan dengan jumlah yang memadai untuk seluruh kebutuhan di Lembaga pemerintahan, swasta dan industri.



05



Membangun Itjen Sebagai Trusted Advisory dan *Strategic Partner*

Oleh:

Doddy Setiadi, Ak., M.M., CA., CPA., QIA
Inspektur Jenderal Kemenkominfo

Sebagaimana kita alami saat ini, kita masih dalam kondisi menghadapi pandemi Covid-19 sehingga kita masih bekerja menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Di lain sisi, kita juga mendapatkan hal yang positif di mana kehidupan berubah dengan mulai menggantungkan diri pada penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam menjalankan berbagai aspek dalam kehidupan kita. Dahulu kalau sebagian besar masyarakat "gapték" atas teknologi informasi, saat ini anak kecil pun sudah terbiasa dengan menggunakan perangkat teknologi informasi dalam mendukung aktivitasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mencanangkan bahwa ke depan, khususnya dalam periode 2021-2024, kita sedang dan akan memasuki era transformasi digital yang dilaksanakan sesuai dengan 5 Arah Presiden, yaitu:

- 1 **Mempercepat perluasan akses, peningkatan infrastruktur digital, dan penyediaan layanan internet**
- 2 **Mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis**
- 3 **Mempercepat integrasi Pusat Data Nasional**
- 4 **Menyiapkan talenta digital**
- 5 **Menyiapkan regulasi, skema-skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital**



Sesuai dengan arahan Presiden di atas tentunya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyelaraskan kebijakan, strategi, dan program/kegiatannya yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2024 sesuai dengan arahan tersebut. Termasuk dalam hal ini Inspektorat Jenderal harus menetapkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan mulai saat ini dan ke depannya. Peran Inspektorat Jenderal akan memastikan bahwa segala yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo akan dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Untuk itu, Inspektorat Jenderal harus menyesuaikan diri atas peran yang akan diambil ke depan guna mendukung peran Kementerian Kominfo sebagai *leader* dalam era transformasi digital ke depan.

Tugas Dan Fokus Pengawasan

Pada dasarnya Inspektorat Jenderal selama ini menjalankan peran sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang aktif dalam mewujudkan reformasi birokrasi guna tercapainya pemerintah yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*). Dalam melakukan pengawasannya, Inspektorat Jenderal berfokus pada 4 (empat) hal: Peningkatan Government System, Pengawasan Program Kerja Prioritas, Peningkatan Kapasitas Fiskal, dan Pengamanan Aset. Dalam konteks ini Inspektorat Jenderal memiliki peran strategis dalam memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Untuk melaksanakan tugasnya di atas, Inspektorat Jenderal melaksanakan 2 (dua) aktivitas utama, yaitu: Asuransi

Ke depan Kementerian Kominfo akan sebagai bagian dari pemerintahan yang akan menjalankan transformasi digital nasional, akan terlibat dalam pelaksanaan 4 (empat) sektor strategis, yaitu: Infrastruktur Digital, Pemerintahan Digital, Ekonomi Digital, dan Masyarakat Digital

(Assurance Activities) berupa kegiatan Audit, Reviu, Monitoring, serta Konsultasi (Consulting Activities) berupa berbagai kegiatan pembinaan dengan memberikan saran/rekomendasi yang konstruktif kepada seluruh satker yang menjadi mitranya. Inspektorat Jenderal dituntut untuk melaksanakan pengawasan intern yang bernilai tambah bagi Kementerian Kominfo melalui kegiatan asuransi dan konsultasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kominfo.

Kegiatan asuransi yang selama ini dilakukan telah menemukan berbagai hal yang masih menjadi kelemahan yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, sedangkan kegiatan konsultasi yang dilaksanakan telah memberikan masukan kepada satker terkait dalam memperbaiki berbagai tata kelola yang yang menjadi tanggung jawabnya.

Keberhasilan Inspektorat Jenderal agar pelaksanaan pengawasannya

berjalan dengan baik tentunya didukung dengan auditor yang profesional dan kompeten, hasil audit yang terjaga kualitas/mutunya, dan dipatuhinya standar yang ditetapkan.

Trusted Advisory dan Strategic Partner

Dalam memberikan nilai tambah atas kegiatan pengawasan yang dilakukan, Inspektorat Jenderal diharapkan merubah paradigma pengawasannya dari semula banyak berperan sebagai "watchdog" yang fokus pada pencarian kesalahan semata, menjadi lebih berperan sebagai Strategic Partner yang membantu pimpinan dan jajaran Kementerian dalam menyelesaikan berbagai permasalahan

penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana yang sudah kita singgung di muka, ke depan Kementerian Kominfo akan sebagai bagian dari pemerintahan yang akan menjalankan transformasi digital nasional, akan terlibat dalam pelaksanaan 4 (empat) sektor strategis, yaitu: Infrastruktur Digital, Pemerintahan Digital, Ekonomi Digital, dan Masyarakat Digital. Implementasi dari perannya tersebut akan dijabarkan dalam berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan oleh satker terkait.

Mengingat bahwa yang akan dilaksanakan merupakan program/kegiatan yang sifatnya strategis, maka tentunya seluruh jajaran yang ada di Inspektorat Jenderal harus memahami sepenuhnya atas keseluruhan bisnis proses dari program/kegiatan yang dilakukan oleh satker agar bisa memerankan dirinya sebagai Strategic Partner.

Bahkan, *best practice* terkini, mendorong unit Inspektorat Jenderal untuk menjadi penasehat yang dipercaya (Trusted Advisor) bagi seluruh jajaran di Kementerian dalam menghadapi permasalahan saat ini serta mengantisipasi berbagai risiko yang akan datang. Saran atau masukan yang konstruktif dan mudah untuk diimplementasikan yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal atas aktivitas pengawasannya kepada seluruh satker, akan memberikan dampak adanya respek dari satker kepada Inspektorat Jenderal sebagai penasehat yang dipercaya.

Peran sebagai Trusted Advisor dan Strategic Partner inilah yang sedang dan akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kominfo saat ini dan ke depannya.

Tantangan Ke Depan

Kondisi Pandemi Covid 19 yang masih terjadi saat ini dan era transformasi digital yang telah dicanangkan telah mendorong instansi pemerintah untuk terus melakukan inovasi dengan mengoptimalkan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan tugasnya. Kementerian Kominfo pun berusaha merespon perubahan organisasi yang semakin berbasis TIK dengan mengembangkan sistem informasi dalam berbagai proses bisnis dan layanannya.

Pemanfaatan TIK ini telah dan akan terus mengubah cara kerja instansi pemerintah, khususnya Kementerian Kominfo, yang semula *paper-based* menjadi semakin *computer* dan *internet-based*. Apalagi untuk menjalankan *new normal* di era pandemi, pemanfaatan TIK secara efektif menjadi keharusan bagi instansi pemerintah untuk tetap dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik.

Inspektorat Jenderal Kominfo pun juga sudah mulai menyesuaikan bisnis prosesnya dalam melakukan pengawasan dengan menggunakan teknologi informasi, di antara penggunaan Sistem Informasi Pengawasan, aplikasi Continuous Auditing Continuous Monitoring (CACM), Sistem Informasi Manajemen Risiko, dan lainnya yang saat ini sedang terus dikembangkan. Dokumen dukungan terhadap pelaksanaan pengawasan dan administrasi dari hasil pengawasan sudah mulai dikelola dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Apabila kita mau, kita bisa....
Demi NKRI tercinta....



Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan penerapan Flexible Working Space (FWS) sebagai bagian dari cara kerja *new normal* bagi ASN saat ini, harus membuat cara kerja Inspektorat Jenderal juga turut berubah dan menyesuaikan diri agar tetap relevan dan agile dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pencapaian tujuan pemerintahan di era digital. Dengan memanfaatkan TIK yang ada dalam melakukan pengawasan, teknik audit terkini seperti Continuous Auditing Continuous Monitoring (CACM) dan Data Analytic dalam pengawasan sedang dan terus dikembangkan bekerjasama dengan Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) Kementerian Kominfo. Diharapkan pengawasan terhadap perencanaan anggaran dan realisasi penggunaan anggaran sudah dapat dilakukan mulai tahun 2021 ini melalui pemanfaatan aplikasi yang sudah dikembangkan.

Penerapan FWS bagi pegawai Inspektorat Jenderal juga telah mendorong cara kerja pengawasan yang dilakukan agar dapat

dilaksanakan secara remote atau jarak jauh dengan memanfaatkan TIK. Pelaksanaan pengawasan dan pembahasannya dengan para mitra satuan kerja telah dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas Zoom *meeting* dan hasilnya sampai dengan saat ini dirasakan cukup efektif.

Koordinasi dan sinergi dengan aparat pengawasan serta lembaga-lembaga terkait lainnya seperti dengan BPK, BPKP, KPK, LKPP dan sebagai juga telah dilakukan melalui komunikasi secara daring dan alhamdulillah berjalan dengan baik dan efektif.

Semoga harapan untuk menjadikan Inspektorat Jenderal menjadi Trusted Advisor dan Strategic Partner bagi seluruh satker di lingkungan Kementerian Kominfo dapat dilaksanakan dengan baik. Kondisi masih pandemi Covid 19 dan memasuki era transformasi digital merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan senyatanya untuk mendorong kinerja yang semakin baik dari waktu ke waktu.

05



Gelandang Pengangkut Air

Refleksi 20 Tahun Kominfo

Oleh:
Anang Latif
Direktur Utama BAKTI Kominfo

Dalam sepak bola ada istilah “gelandang pengangkut air”. Istilah ini biasanya merujuk kepada pemain tengah alias gelandang yang kerjanya banyak, perannya penting untuk bertahan dan membangun serangan, tetapi tidak begitu menonjol namanya. Tidak tampil. Kerjanya “hanya” bolak-balik di sepanjang ruang tengah, tidak banyak ikut nimbrung ke area penalti lawan, hanya memberi umpan untuk dieksekusi sang *striker* atau penyerang. Namun, rajin dan aktif. Seperti tukang air galonan. Atau kalengan, di zaman dulu.

Kesan itulah yang saya refleksikan pada masa awal terbentuknya Kementerian Komunikasi dan Informatika 20 tahun lalu, sampai sekarang. Ada masa di mana Kominfo menjalankan peran sebagai regulator yang lebih banyak berkuat dalam pelayanan kepada industri, lembaga, dan masyarakat. Memberi umpan matang untuk dieksekusi pihak lain, atau bertahan di depan gawang menunggu datangnya para pengurus izin.

Don't get me wrong. Peran seperti itu bukanlah peran yang mudah dan bukan pula berarti malas-malasan. Tingginya kebutuhan masyarakat akan teknologi informasi dan komunikasi, ditambah dengan industri yang tumbuh pesat, Kominfo tidak bisa berlembang kungkung menikmati mitos keangkeran meja birokrasi. Kehadirannya boleh saja tak menonjol, namun kontribusinya vital. Bagaimana gelandang pengangkut air dalam jagad sepak bola.



Kontribusi

Bahkan dalam kaitan dengan pergulatan dalam bidang regulasi, ada persepsi di masyarakat bahwa Kominfo adalah "tukang blokir". Serem juga tuduhan ini, mirip-mirip dengan "tukang jagal". Hanya saja yang dijagal adalah konten internet yang tak senonoh dan membahayakan masyarakat. Padahal kan ini peran mulia, ya? Kominfo membantu jutaan



Seiring waktu pula peran Kominfo bukan lagi hanya sebatas gelandang pengangkut air, namun juga memainkan posisi striker alias tukang eksekusi serangan



orang tua menapis hantu pornografi dan negativisme lainnya. Agar orang tua tenang. Agar tidak banyak ujaran kebencian dan kabar bohong yang menguras tenaga masyarakat. Eh, dibilang tukang blokir. Sakitnya tuh di sini.

Tapi ya begitulah tugas pelayan masyarakat seperti kita ini. Tidak afdal jika tidak mendapat perundungan. Sabar. *Time will tell*. Waktu yang akan mengungkapnya.

Gelandang pengangkut air terbaik di dunia umumnya juga tidak mendapatkan penilaian dalam rupa poin-poin yang mentereng dari lembaga pengamat statistik sepak bola. Jarang sekali menorehkan nama di *scoring board* sebagai pencetak gol. Namun, konsistensinya akan membuka mata orang banyak seiring waktu. Contoh terbaru yang masuk dalam nama ini adalah N'Golo Kante, gelandang Chelsea FC dan juga pemain timnas Prancis. Badannya kecil, tingginya tak semenjulang pemain lain. Bukan pencetak gol yang subur. Namun, kontribusinya dalam tim dipuji mulai dari yang berkaliber pandit hingga penonton kelas warung kopi. Bahkan kesederhanaan hidup yang ia praktikkan di luar lapangan pun luar biasa.

Pusaran Digitalisasi

Seiring waktu pula peran Kominfo bukan lagi hanya sebatas gelandang pengangkut air, namun juga memainkan posisi *striker* alias tukang eksekusi serangan. Setidaknya ini yang saya rasakan sejak ditugaskan di BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) Kominfo, sebelumnya di BP3TI (Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika).

Mungkin Kominfo merupakan satu-satunya institusi negara

yang langsung berada dalam pusaran arus deras digitalisasi. Baik dari sisi regulasi, teknologi, maupun konten. Digitalisasi dalam berbagai lini tiba-tiba harus masuk ke dalam ranah kerja Kominfo. Mungkin kita ingat bahwa tukang ojek *online* pernah demo di kantor Kominfo, demikian pula pihak taksi tradisionalnya. Tukang jual pulsa pun juga pernah mendemo Merdeka Barat 9. Belum pula demo yang sifatnya politis berkaitan dengan konten. Bahkan tak kalah banyaknya komplain di dunia maya, yang berkaitan dengan hajat berkomunikasi masyarakat.

Dalam tsunami teknologi dan konten digital ini, Kominfo dipaksa bersikap. Tak hanya berkuat dalam zona nyaman di balik meja birokrasi. Tak lagi hanya mengandalkan peran sebagai gelandang pengangkut air. Namun, maju dengan mengeksekusi serangan ke gawang di depan.

Executing Agency

Peran sebagai "*striker*" sangat saya rasakan ketika bertugas di BAKTI. Mulanya mengemban amanah sebagai pelayan masyarakat di belakang meja, tiba-tiba saya harus merasakan betapa deg-degannya menuju lokasi pembangunan BTS (Base Transceiver Station) BAKTI dalam ancaman tembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Sebelumnya, bertemu preman pun tidak pernah.

Saya jadi ingat becandaan dengan Menteri Rudiantara selama kunjungan ke salah satu kabupaten di pelosok Papua dalam rangka meninjau pembangunan BTS. Akses satu-satunya adalah helikopter. Tempatnya tergolong rawan karena masih ada KKB

berkeliruan. Kepada semua yang ikut, Chief RA saat itu dengan entengnya bilang, "ya kalo nanti ditembaki dari bawah, tinggal kita pindahkan saja vest anti-peluru ini ke atas kursi agar pelurunya nggak tembus ke atas."

Jika dulu berkuat dengan regulasi dan mengelola PNPB dari industri seluler, kini Kominfo melalui BAKTI bergerak membangun infrastruktur dasar sebuah operator seluler, yaitu BTS. Bukan cuma puluhan, bahkan sampai total 9.113 unit yang harus dicapai per tahun 2022. Dengan pembangunan sebanyak itu, praktis BAKTI sudah bagaikan operator terbesar kelima dari sisi kepemilikan BTS (dengan catatan dua operator melakukan *merger*). Tetapi, BAKTI kan bukan operator.

Kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar BAKTI sebagai "executing agency" makin membunyah dengan ikut *chip-in*-nya negara dalam pembangunan infrastruktur digital melalui alokasi APBN besar-besaran. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengakselerasi transformasi digital nasional. Kebutuhan warga untuk terkoneksi tak dapat ditunda lagi.

Apabila menimbang segi geografis dan besarnya demografi Indonesia yang mayoritas berasal dari generasi usia produktif, bukan pekerjaan mudah memastikan semuanya terangkut dalam gerbong digitalisasi. Namun, Pak Johnny G. Plate selaku Menteri Kominfo aktif begitu fokus menggapai visi agar tak ada seorang pun yang tertinggal. Beliau kerap kali menyerukan, "no one will be left behind". Apalagi ketika pandemi Covid-19 menuntun keutamaan interaksi virtual. Pemerataan sinyal 4G di wilayah 3T (terluar, tertinggal, terdepan) yang seharusnya selesai 2032, dipercepat 10 tahun hingga ditarget selesai pada tahun 2022. Semua ini dilakukan agar tidak ada lagi kesenjangan digital, khususnya di daerah Indonesia timur.

Saling Bantu

Dengan metafora pemain sepak bola ini bukan berarti saya sedang mengkotak-kotakkan peran di kementerian kita. Bukan untuk menonjolkan peran satu di atas yang lain. Justru sebaliknya. Legenda sepakbola Belanda dan Barcelona FC yang juga sudah dianggap sebagai filsuf sepakbola, Johan Cruyff, pernah mengatakan: *In my teams, the goalkeeper is the first attacker, and the striker the first defender*. Penjaga gawang, pada suatu saat adalah pembangun serangan pertama. Pada saat yang lain, seorang *striker* juga merupakan penghalau serangan pertama sejak bola ada di depan. Baik yang ada di garis depan maupun di depan gawang, harus bisa saling memainkan peran teman satu tim kita. Saling bahu-membahu, tidak saling tunggu, apalagi saling cemburu.

Itulah yang kita harapkan bersama sebagai refleksi 20 tahun usia institusi kita tercinta, Kementerian Kominfo. Bersyukur karena peran Kominfo semakin strategis, terutama dalam hajat hidup digitalisasi di negeri ini. Mari buktikan bahwa kita berkomitmen dan mampu melayani pekerjaan besar percepatan transformasi digital menuju Indonesia yang terkoneksi. Makin digital, makin maju.

05



Selintas Komunikasi Publik di tahun 2016 - 2019

Oleh:

Rosarita Niken Widiastuti
Staf Khusus Menkominfo Bidang IKP, Transformasi Digital,
dan Hubungan Antar Lembaga

Pada tahun 2016, pasca Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Legislatif, komunikasi publik Pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan, mengingat dampak dari pesta demokrasi tersebut membutuhkan penanganan komunikasi publik yang sangat serius agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Dalam rangka memberikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi kepada publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), melanjutkan program sebelumnya dan mengembangkan program-program baru dengan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Untuk menyebarluaskan informasi tersebut, kemudian kami menginisiasi program-program baru yaitu : optimalisasi website Indonesia.go.id, Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9), Jaringan Pemberitaan Pemerintah (JPP), Government Public Relation TV (GPR), dan Majalah GPR News.

Terkait optimalisasi website Indonesia.go.id, yang awalnya dikelola oleh Sekretariat Negara, kemudian atas kesepakatan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri kominfo (Bapak Rudiantara), pengelolaan website Indonesia.go.id dialihkan kepada Direktorat Jenderal IKP. Kemudian dibuat desain konten web Indonesia.go.id yang tujuannya adalah memberikan informasi tentang ke-Indonesiaan dengan konten program terkait eksekutif, yudikatif, legislatif, masyarakat, budaya, pariwisata, ekspor, investasi dan imigrasi, hal ini dilandasi konsep Nation Branding Hexagon¹.

Dalam rangka membuka akses informasi mengenai program-program Pemerintah kepada seluruh masyarakat terutama yang berada di daerah pelosok dan perbatasan yang selama ini tidak bisa menjangkau jaringan TV nasional,



akhirnya terwujud, kami menginisiasi mendirikan GPR TV. Awalnya hanya berupa streaming yang kemudian berkembang menjadi TV berbasis satelit. Hadirnya GPR TV di platform TV satelit merupakan wujud dari pemerataan sumber informasi yang menjadi bagian dari program Pemerintah selama ini. Beberapa program lain seperti program Sudut Istana yang menyiarkan berita seputar kegiatan Presiden dan Wakil Presiden,

1) <https://publicandculturaldiplomacy3.files.wordpress.com/2012/04/untitled1.jpg>



program Bincang Menteri yang memuat program kebijakan para Menteri di setiap Kementerian, program Kabar Daerah yang memberikan informasi mengenai kemajuan pembangunan di setiap Provinsi, program Kupas Tuntas Lugas mengenai kebijakan baru Pemerintah, program Bhineka Tunggal Ika yang menyajikan keberagaman dan kekayaan budaya Indonesia, serta program Indonesia Jaya yang merupakan program pencapaian prestasi anak bangsa di ajang nasional dan internasional.

GPR TV memfasilitasi Kementerian, Lembaga, dan Daerah yang memiliki konten dalam format video dapat ditayangkan melalui GPR TV. Visi dari GPR TV adalah untuk mencerahkan, memberdayakan dan mengokohkan NKRI antara lain lewat pengenalan ragam potensi dan keunggulan Indonesia yang begitu kaya. GPR TV diharapkan dapat menjawab distorsi informasi yang beredar di media sosial karena siaran televisi ini dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat termasuk mereka yang tinggal di daerah yang sulit mendapatkan siaran televisi maupun radio. GPR TV hadir sejak 2016 menyediakan siaran televisi satelit tanpa berbayar yang dapat diakses di berbagai daerah yang selama ini tidak tersentuh siaran televisi.

Kominfo memiliki markas yang bernama "Forum Merdeka Barat 9." Pada program itu Kominfo mendatangkan Narasumber primer (A1) seperti para Menteri terkait untuk memberikan Pers Briefing terkait program, dan kebijakan pemerintah. FMB 9 awalnya dikelola oleh Sdri. Meiningsih Direktur Pengelolaan Media dan Sdri. Dewi Maharani, juga sebagai ajang cek fakta dari adanya hoaks. Selain itu dibuat pula program Indonesiabaik.id yang digawangi oleh Dimas Aditya, berupaya menyampaikan berbagai informasi positif dari negeri Indonesia dengan cara kekinian sesuai dengan perkembangan zaman.

Program ini dimaksudkan untuk membangun optimisme dengan sajian data-data akurat untuk terpenuhinya informasi masyarakat. Program Indonesiabaik.id juga diutamakan menyasar kaum milenial yang sekitar 70 juta penduduk Indonesia di kisaran usia itu. Bonus kaum milenial ini diperkirakan akan terjadi di tahun 2028 yang tentunya pemilihan konten untuk suatu program perlu dikaji terus menerus sesuai perubahan zaman. Program ini juga mendorong partisipasi publik untuk ikut bersama mengisi konten-konten positif di dalamnya. Program Indonesia.baik berhasil menggondol predikat Winner dan predikat Champion untuk

11 karya lain yang dibuat Kemenkominfo bersama masyarakat pada ajang World Summit on the Information Society (WSIS) Forum pada tahun 2018 di Jenewa, Swiss. WSIS merupakan program soft campaign *Government Public Relations* (GPR) yang dilakukan Kemenkominfo di bawah naungan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dan diikuti sejak tahun 2017.

Mengacu pada tautan <https://teknologi.bisnis.com, 21/3/2018>, Rudiantara juga memiliki perangkat yang dapat meminimalkan hoaks yang beredar di Indonesia dengan menghadirkan content creator serta media jejaring konten positif. Pada tanggal 16 Juni 2019 Kominfo berhasil menerbitkan

aplikasi buku digital yang diberi nama Sakuln, yang dipimpin oleh Direktur Meiningsih, Sakuln merupakan singkatan dari Saku Informasi. Aplikasi tersebut dapat diunduh pada aplikasi Play Store, namun belum tersedia di App Store.

Pada ruang nyata, Kominfo berperan aktif pada beberapa perhelatan internasional, seperti Konferensi Tingkat Tinggi The Indian Ocean Rim Association (KTT IORA) pada Maret 2017-Indonesia menjadi poros maritim dunia. Dalam rangka Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018, Ditjen IKP berperan sebagai pengelola Media Center, sebagai ajang olah raga bergengsi di tingkat Asia Tenggara, yang digawangi oleh Sesditjen IKP Sdri. Sumiati,

Mediodedi dan tim. Ditjen IKP juga mengelola Media Center pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali pada Oktober 2018. Pada perhelatan-perhelatan tersebut, Kominfo berperan sebagai pengelola Media Center negara yang dikelola oleh Direktur Layanan Informasi Internasional Selamatna Sembiring dan tim, yang mengorganisir para awak media dan rombongan dari berbagai Negara. Selain itu, Ditjen IKP juga mengelola informasi dan komunikasi publik terkait pembangunan manusia dan kebudayaan, seperti Stunting, dana desa, kartu Indonesia sehat, dan kartu Indonesia sejahtera yang ditangani oleh Sdr. Wiryanta, Sdr. Maroli dan Tim, pengelolaan informasi dan komunikasi publik perekonomian dan kemaritiman yang dikelola oleh Sdri. Septriana Tangkary dan tim. Informasi dan komunikasi publik polhukam yang dikelola oleh Sdr. Bambang Gunawan, yang sekaligus mengelola Direktorat TKKP, yang menangani pembinaan Pranata Humas dan Penyuluh Informasi Publik (PIP) akan banyak tugasnya untuk menembus ke daerah.

Berkaitan dengan struktur organisasi, yang semula berdasarkan proses atau Lopen de Ban, berubah menjadi struktur organisasi berdasarkan sektor, agar informasi Pemerintah dapat secepatnya sampai kepada masyarakat, dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin meningkat.



Peringatan Ulang Tahun ke-20

KEMENTERIAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

**“Indonesia Terkoneksi - Makin
Digital, Makin Maju”**

Jakarta, Selasa, 28/09/2021



Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba menyatakan momentum itu menjadi saat yang tepat untuk mensyukuri semua yang telah dicapai, juga melakukan refleksi guna mengambil langkah ke depan.

20TH
KOMINFO
Indonesia Terkoneksi
Semakin Digital, Semakin Maju

**SYUKUR &
REFLEKSI**





Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba menyapa civitas Kominfo yang berada di daerah, diantaranya Loka Monitor Gorontalo, BPSDMP Medan, Monumen Pers Surakarta, STMM Yogyakarta, serta Tim AIS Jakarta dan BAKTI Kominfo di Jakarta.





Penyerahan donasi buku melalui program Kominfo Berbagi Buku secara virtual untuk taman bacaan di wilayah Kei, Maluku dan Flores, NTT





Pemenang lomba video pantun dalam rangka merayakan HUT ke-20 Kementerian Kominfo



Pemenang lomba virtual ride dalam rangka merayakan HUT ke-20 Kementerian Kominfo



Pemenang lomba stand up comedy dalam rangka merayakan HUT ke-20 Kementerian Kominfo



Pemenang lomba virtual run dalam rangka merayakan HUT ke-20 Kementerian Kominfo



Pemenang lomba vocal group dalam rangka merayakan HUT ke-20 Kementerian Kominfo



Kepala Biro Keuangan Kementerian Kominfo Bambang Sigit Nugroho sebagai pencipta lagu Kominfo Connect memberikan sambutan terkait dengan lomba vocal group pada HUT ke-20 Kementerian Kominfo



Penayangan video Perjalanan 20 Tahun Kominfo, hasil Karya Biro Humas Kementerian Kominfo

Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba, meletakkan tulisan terkait harapan terhadap Kementerian Kominfo selama satu dekade kedepan ke dalam time capsule. Time capsule ini nantinya akan disimpan, dan dibuka pada peringatan HUT Kementerian Kominfo pada tahun 2031



MINFO

Dialog bersama Menkominfo Periode 2004-2007 Sofyan Djalil; Menkominfo Periode 2007-2009 Mohammad Nuh; Menkominfo Periode 2014-2019 Rudiantara;

Hadir dalam acara tersebut, Menkominfo Periode 2004-2007 Sofyan Djalil; Menkominfo Periode 2007-2009 Mohammad Nuh; Menkominfo Periode 2014-2019 Rudiantara; Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Widodo Muktiyo; Staf Ahli Menkominfo Bidang Hukum Henri Subiakto; Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo Doddy Setiadi; Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail; Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan; Kepala Badan Litbang SDM Kominfo, Hary Budiarto; Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Usman Kansong; Direktur Utama BAKTI, Anang Achmad Latif; serta pejabat pimpinan tinggi pratama dan seluruh civitas Kementerian Kominfo.

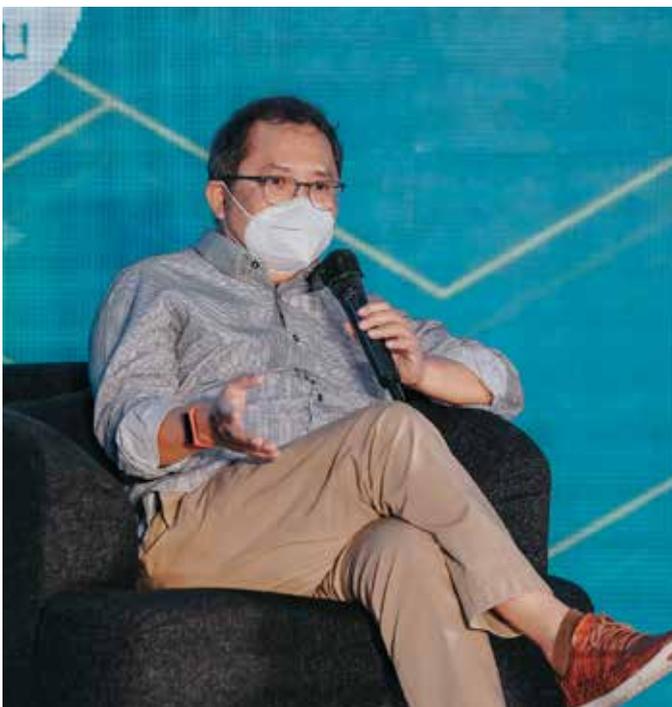


KOMINFO

Indonesia Terkoneksi

Semakin Digital, Semakin Maju

REFLE





Menkominfo Johnny G. Plate dalam sambutannya menyatakan, perjalanan 20 tahun Kementerian Kominfo telah dan terus bertransformasi secara progresif dan visioner. Hal itu tidak terlepas dari peran mantan menteri pada era sebelumnya.

Menteri Kominfo menegaskan : Kementerian Kominfo merumuskan tagline baru untuk menyambut era baru transformasi digital, yaitu Makin Digital, Makin Maju. Sejatinya, perubahan-perubahan tersebut merupakan respon yang simultan terhadap geliat perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan berbangsa



20TH
KOMINFO
Indonesia Terkoneksi
Semakin Digital, Semakin Maju

**SYUKUR &
REFLEKSI**



INDONESIA TERKONEKSI
SEMAMIN DIGITAL

Penyerahan tumpeng oleh Menteri Kominfo Johnny G Plate kepada Sekjen Kementerian Kominfo Mira Tayyiba disaksikan Menkominfo periode sebelumnya, Sofyan Djalil, Mohammad Nuh, dan Rudiantara.



Menkominfo Johnny G Plate mengapresiasi pengabdian, gagasan, visi besar, dan leadership dari para Menkominfo periode sebelumnya dalam memimpin dan menjadikan Kementerian Kominfo menjadi seperti saat ini.



Foto bersama Menteri Kominfo dan Para Eselon I Kementerian Komunikasi dan Informatika



KOMINFO

Indonesia Terkoneksi
Semakin Digital, Semakin Maju

2001-2004

Syamsul Muarif

Memimpin Kominfo melewati masa transisi dari Departemen Penerangan menuju era baru informasi

2002

↳ Lahirnya UU No. 32 Tahun 2002

2004-2007

Sofyan Djajil

Berganti nama menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika

2005

↳ Pembentukan Panitia Kerja pembahasan UU ITE

2006

2007-2010

Muhammad Nuh

2008

↳ Pengesahan UU 11/2008 tentang 14/2008 tentang No.38/2009 tentang Mula merancang Palapa Ring



Di ma pengg dan RUB dan Transaksi Elek

Di bawah kepemimpinan Menteri menurunkan tarif pulsa, setelah menduduki peringkat kedua tem

Menkominfo, Johnny G. Plate melayani doorstop media usai Kegiatan Syukur & Refleksi 20 Tahun Kominfo



Transformasi Digital pada 20 Tahun Kementerian Kominfo

Kementerian Kominfo genap berusia 20 tahun. Dengan berbagai perubahan kebijakan selama 20 tahun, Kementerian Kominfo memiliki tugas dan fungsi utama untuk merumuskan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi pos, telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi, layanan multimedia, dan diseminasi informasi. Secara filosofis, Kementerian Kominfo merealisasikan pasal 28F UUD 1945. Kementerian Kominfo memungkinkan semua masyarakat untuk bebas berkomunikasi dan mendapatkan informasi.

“

Kominfo adalah pondasi dari pembangunan digital. Apa yang kita lakukan saat ini, menyediakan infrastruktur digital, mendorong pemanfaatannya, menjaga ruang digital supaya tetap bersih dan produktif, melakukan komunikasi publik, itu adalah fondasi (*building blocks*) dari pembangunan digital

Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba pada Talkshow Virtual TokTok Kominfo – 20 Tahun Kemkominfo, “Apa Saja Transformasinya?,” pada Jumat (03/09).

Dengan adanya pandemi Covid-19 memaksa dan merubah masyarakat untuk beralih secara digital. Wabah Covid-19 mengakselerasi dan mempercepat terjadinya transformasi digital sehingga menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Tentu Kementerian Kominfo memiliki tugas untuk memimpin transformasi digital Indonesia. Menurut Mira, kecepatan dari Indonesia melakukan transformasi digital sangat tergantung dari kecepatan dan ketepatan kominfo mencapai agenda-agenda pembangunannya.

Kementerian Kominfo juga memimpin pembangunan digital untuk domestik tetapi juga dengan negara lain. "Sekarang sudah banyak perubahan, maka tugas sekarang semakin menantang karena digital bukan saja urusan di Indonesia, melainkan bagaimana Indonesia dengan negara lain. Misalnya bagaimana kita melakukan pengelolaan data, termasuk data pribadi, bagaimana kita melakukan pengelolaan data termasuk perlindungannya pada saat kita melakukan transfer lintas negara," lanjut Mira.

Mira juga menuturkan bahwa sekarang Indonesia dan dunia sudah sangat *hyper connected* dan informasi bertebaran di mana-mana seperti tsunami. Dilema masyarakat saat ini adalah kesulitan memilih dan memilah informasi. Kementerian Kominfo memiliki tugas untuk memastikan bahwa informasi yang diterima masyarakat merupakan informasi yang benar.

"Kementerian Kominfo melakukan pemberantasan hoaks dari hulu ke hilir. Dari sisi hulu Kominfo melakukan literasi digital sementara dari sisi hilir melakukan pemblokiran serta memberikan 'label' hokas disinformasi melalui Website resmi Kominfo," tutur Mira.

Kementerian Kominfo juga melakukan terobosan pelayanan yang dibagi menjadi tiga, yaitu pelayanan untuk penyelenggara, masyarakat, dan Kementerian/ Lembaga (K/L). Untuk penyelenggara Kementerian Kominfo akan memastikan sistem perizinan berjalan dengan baik.

"Sistem perizinan Kominfo sebenarnya sudah baik, hanya saja sedang ada migrasi ke OSS (Online Single Submission-red), tim Kominfo sedang memastikan bahwa migrasi tersebut berjalan dengan baik sehingga proses bisnis yang sudah terbangun selama ini tetap berjalan," ucap Mira.

Untuk pelayanan masyarakat, Kominfo memberikan berbagai kanal agar Kominfo dapat berkomunikasi langsung dengan masyarakat sebagai pengguna layanan. Sementara pelayanan untuk K/L, Kominfo memberikan banyak layanan, salah satunya adalah Pusat Data Nasional (PDN).

Mira mengenang ketika pertama kali masuk Kementerian Kominfo, tiga hal yang menjadi prioritas adalah anggaran, program kerja, dan SDM. Tugas sebagai Sekjen adalah memastikan ketersediaan bensin (anggaran) dan mesin (SDM), serta memastikan semua berjalan dengan baik sehingga bisa menggunakan anggaran dengan tepat guna dan efisien.

"Tantangan sebagai sekjen yaitu merapihkan atau memperkuat yang kontra, karena memang masih banyak ruang perbaikan walaupun sebagai pemberhati Kominfo, setidaknya dalam waktu 20 tahun akhir ini banyak perkembangan, pertumbuhan, dan inovasi yang dilakukan kominfo," lanjut Mira.



Dalam rangka 20 tahun, Kementerian Kominfo sedang meninjau organisasi Kominfo karena dunia digital yang dinamis. Hingga 2022, Kominfo akan melakukan penataan supaya sesuai dengan tuntutan saat ini.

“Sebagai organisasi, 20 tahun cukup *establish*, tetapi karena perubahan struktur organisasi terakhir pada tahun 2015, sementara *landscape* digital sudah sedemikian berubah dan sangat dinamis sehingga perlu cek apakah mobil kita (organisasi) masih fit dan sesuai dengan jalan yang sedang dijalani,” lanjut Mira

Selain Mira, Juru Bicara Kementerian Kominfo dan Staf Khusus Menkominfo Dedy Permadi pun menuturkan bahwa Kementerian Kominfo sedang bertransformasi seiring dengan tugasnya yang juga mengemban sebagai *leading sector* transformasi digital nasional.

“Kominfo saat ini fokus pada transformasi digital tapi bukan yang *latah digital*, karena banyak oknum yang masih *latah digital*. Misalnya semuanya pengen di digitalisasi, semuanya

pengen di online kan, padahal sebetulnya tidak semua harus digitalisasi, dan tidak semua itu hanya digitalisasi saja,” tutur Dedy.

Menurut Dedy, transformasi digital tidak hanya sekedar mendigitalkan sesuatu, tidak hanya sekedar membangun sistem digital, tetapi membangun ekosistem digital. Ekosistem menyangkut teknologi, tata Kelola, dan sumber daya manusia (SDM). “Walaupun kita sudah mendigitalkan semua tapi kalo manusia yang memakainya tidak siap itu Namanya *latah digital*,” ucap Dedy.

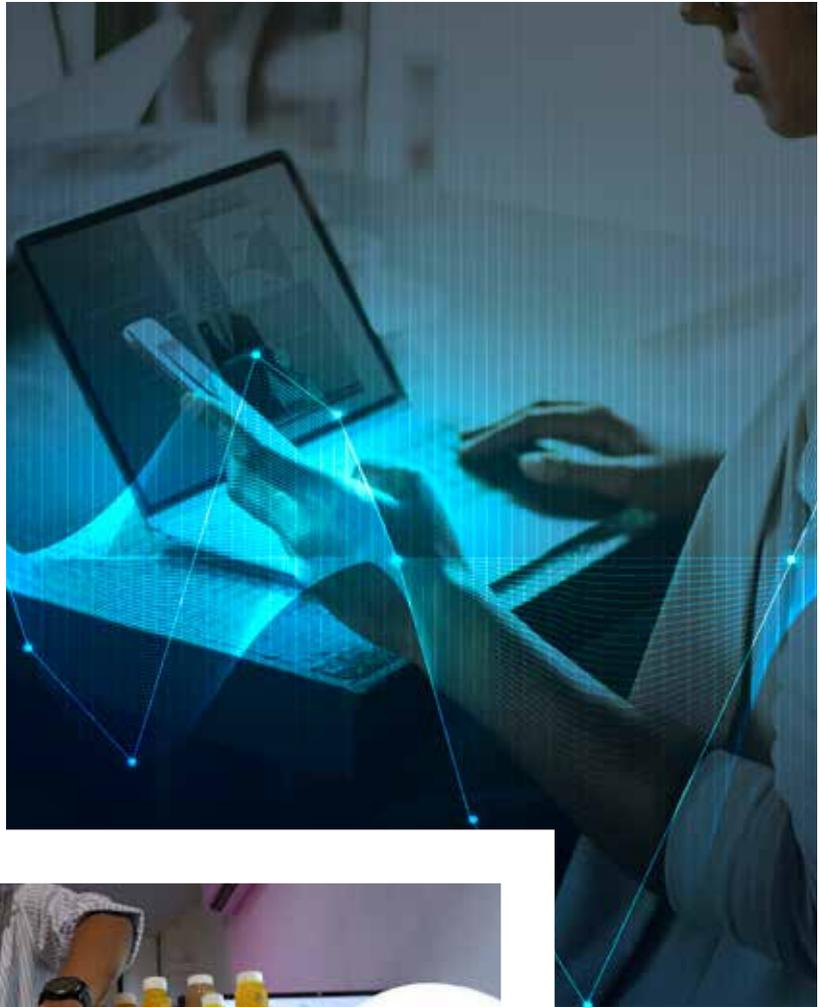
Kementerian Kominfo sedang melakukan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Perencanaan awal membangun jaringan 4G di Indonesia terselesaikan pada tahun 2033, akan tetapi dipercepat 10 tahun sehingga pengerjaan jaringan 4G selesai pada akhir tahun 2022.

Kementerian Kominfo juga mempercepat penyediaan akses layanan internet di ruang publik, seperti puskesmas, kantor kelurahan dan kantor desa. Dedy juga menjelaskan bahwa Kementerian Kominfo sedang mempersiapkan Satelit Satria 1 berkapasitas 150 GB untuk mencukupi total 150.000 titik layanan publik yang belum terjangkau internet yang memadai. Kementerian Kominfo beserta dengan stakeholders dan masyarakat lainnya bekerja bersama mempercepat akses internet.

“Kementerian Kominfo dengan masyarakat semua nya bekerja bersama- sama mempercepat akses internet, baik yang 4G untuk *mobile broadband* untuk handphone, maupun yang *fixed broadband* untuk titik-titik layanan publik, itu 10 tahun lebih cepat dari perencanaan awal” tambah Dedy.

Pandemi Covid-19 tentu menjadi tantangan dalam melakukan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, akan tetapi Kominfo mengambil pandemi ini sebagai peluang. Fokus Kementerian Kominfo adalah bagaimana memanfaatkan peluang di tengah tantangan pandemi Covid-19.

Salah satu peluang dari pandemi Covid-19 ada di ruang digital. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa sektor informatika dan komunikasi tumbuh dua digit selama 3 kuartal berturut



turut di tahun 2020 dan merupakan satu-satunya sektor yang masih tumbuh 2 digit di atas 10 persen.

“Contoh yang paling sederhana dari peluang tersebut yaitu digitalisasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Digitalisasi sektor perdagangan merupakan salah satu peluang luar biasa karena UMKM menyumbang total 60 persen gross domestic product (GDP) Indonesia. Artinya pertumbuhan UMKM sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia,” kata Dedy.

Sebagai Staf Khusus Menteri, Dedy memiliki tugas untuk mendukung dan membantu Menteri Kominfo dan Sekjen dalam menjalankan tugasnya. Dedy juga mendampingi beberapa program prioritas Kominfo bersama satuan kerja lainnya untuk mengevaluasi, memperbaiki, memberikan *improvement* agar memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat

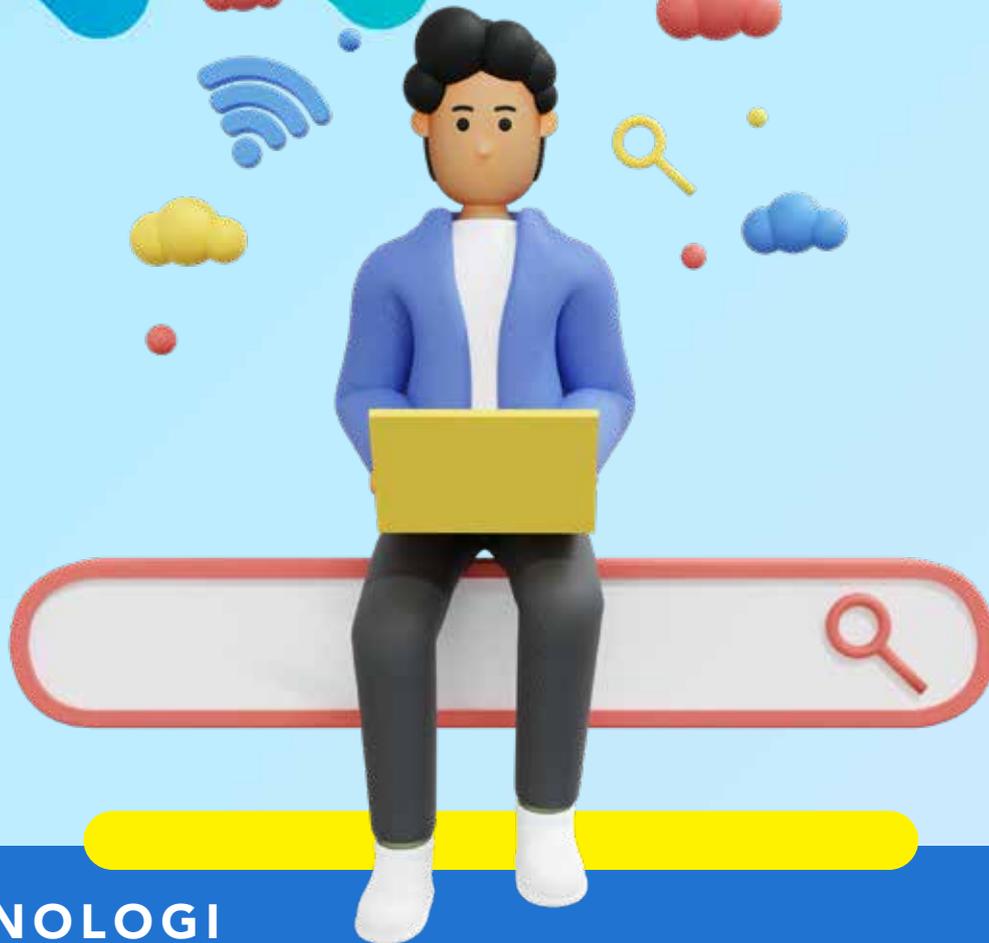
Sebagai Juru Bicara Dedy memiliki tugas untuk merespon berbagai pertanyaan dari wartawan. “Sehari bisa ada 15-20 Whatsapp dari wartawan yang harus direspon. Apabila ada isu besar, dalam sehari wartawan akan mengontak hingga 20 – 30 kali. Jadi harus standby untuk melayani teman-teman wartawan” tutur Dedy.

Transformasi 13 Tahun ASN Kemkominfo

Bulan Agustus lalu, Biro Humas mengadakan kegiatan Temu Kangen Menteri dalam rangka 20 Tahun Kementerian Kominfo melalui daring. Narasumbernya semua Menteri Komunikasi dan Informatika sebelum Bapak Johnny G. Plate, yaitu Bapak Sofyan Djalil (Menkominfo 2004-2007), Bapak Muhammad Nuh (Menkominfo 2007-2009), Bapak Tifatul Sembiring (2009-2014), dan Bapak Rudiantara (Menkominfo 2014-2019). Temu kangen ini membuat saya mengingat kembali pengalaman sebagai ASN Kemkominfo sejak 2008

sampai saat ini yang penuh drama kehidupan bagaikan sinetron tapi sayangnya tidak ada produser yang tahu.

Tahun 2008 saya diterima CPNS di Departemen Komunikasi dan Informatika dengan penempatan di Badan Informasi Publik yang dipimpin Bapak Suprawoto (Bupati Magetan 2018-2023). Ini kisah saya berdasarkan pengalaman apa yang saya dengar, lihat, alami sendiri, catat, bagikan di media sosial dan blog, sepanjang ingatan sendiri atau diingatkan teman.



TEKNOLOGI UNTUK KERJA

Tahun 2008 saya mendapat tugas di sekretariat 100 Tahun Hari Kebangkitan Nasional. Tugas saya menjawab telepon dan email yang masuk dari seluruh wilayah Indonesia Raya, serta mengisi berita di situs Peringatan 100 Tahun Hari Kebangkitan Nasional, <http://kebangkitan-nasional.id>. Sebagian besar telepon yang masuk menanyakan pidato Presiden yang akan dibacakan pada peringatan 100 Tahun Hari Kebangkitan Nasional. Pidato Presiden baru saya terima menjelang hari peringatan. Setelah saya terima, langsung saya unggah di situs dan kirim melalui faksimili. Kalau sekarang, mungkin sudah tidak ada lagi yang memanfaatkan faksimili di Kemkominfo ya.

Sebagai panitia seminar 100 Tahun Hari Kebangkitan Nasional, saya juga dinas luar. Kami naik pesawat ke Surabaya dan menginap di hotel berbintang yang pasti ada listrik, bukan di pelosok yang listriknya hanya ada malam saja. Pengalaman mind-blowing yang mungkin gak kepikiran zaman sekarang adalah

ada panitia Biro Umum yang membawa mesin ketik jadul yang besar. Alasannya karena mesin ketik itu yang bisa buat ngetik kuitansi atau berkas keuangan lainnya. Padahal di satker saja bekerja waktu itu di Pusat Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Badan Informasi Publik sudah bisa ngetik dan print kuitansi pakai komputer dan printer. Kalau sekarang mungkin sudah tidak ada lagi satker yang masih ngetik pakai mesin ketik ya.

Beberapa tahun pertama saya bekerja, ASN punya banyak waktu untuk main gim (game online) pakai komputer dan laptop kantor, nonton dan unduh film juga bisa, bahkan unduh dan nonton video porno juga bisa, kalau tidak tahu malu. Ya ada ASN senior bahkan pejabat struktural yang seperti itu. Bedanya dengan sekarang, informasi sangat banyak di internet dan konten negatif seperti pornografi sudah banyak yang diblokir. ASN di Kemkominfo sudah lebih sadar informasi positif yang layak dikonsumsi. Konten pornografi tidak lagi dikonsumsi di kantor.

JARANG KE KANTOR

Sejak saya CPNS, bukti kehadiran ASN di kantor dilakukan secara manual dan bisa dirapel. Jadi, ada ASN senior yang datang 2-3 hari sekali. Ada juga yang datang ke kantor jika ada perjalanan dinas. Bahkan ada yang datang satu kali dalam sebulan untuk mengambil gaji dan memenuhi daftar hadir dengan tanda tangannya. Hari gajian jadi ajang silaturahmi bagi mereka. Padahal kalau silaturahmi setiap hari bisa menambah panjang usia dan rezeki. ASN yang rajin datang setiap pagi dan pulang sore setiap hari bisa dihitung jari. Bahkan ASN Kemkominfo yang naik bis jemputan dengan saya hanya 3 orang saja. Lainnya, pegawai

swasta yang naik dari perkantoran di sekitar jalan MH Thamrin.

Tahun 2013 sudah mulai masa percobaan presensi kehadiran dengan mesin absensi sidik jari meskipun tunjangan kinerja belum dibayar. Di masa peralihan seperti itu, tidak semua pegawai mau belajar berubah. Menurut pengakuan seorang pejabat di Biro Kepegawaian dan Organisasi, ada yang merusak mesin dengan air. Bahkan mengejek mereka dengan kata "kafir" karena kewajiban check out setiap sore mengakibatkan pegawai melewati kewajiban salat maghrib karena masih di perjalanan.



TRANSFERAN TANPA PUNGLI

Saat saya masih CPNS, gaji masih manual diambil di ruangan kecil yang isinya hanya tiga orang pemegang keuangan pegawai di Sekretariat Badan Informasi Publik. ASN banyak yang mendadak ke kantor untuk mengambil gaji setiap hari gajian yang biasanya setiap tanggal 1 setiap bulan. Nominal receh tidak akan pernah dibayarkan, alasannya klasik karena tidak ada uang kecil. Setiap rapelan, ada kewajiban untuk ngasih sejumlah uang di laci meja mereka. Semacam pungli. Kalau tidak memberi, sudah

pasti bakal diomongin. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri sejak tahun 2002, budaya antikorupsi belum tercipta di awal saya menjadi CPNS. Paksaan transformasi digital yang memaksa ASN menghindari hal yang berpotensi (ketahuan) korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau tidak ketahuan ya saya tidak tahu lagi. Namanya juga tidak ketahuan. Sekarang, urusan keuangan seperti bayar gaji, uang makan, honorarium, perjalanan dinas, dan pulsa, sudah ditransfer ke rekening masing-masing ASN.



3T

TERDEPAN, TERLUAR, TERTINGGAL

Bagaimana Kemkominfo dapat mewujudkan transformasi digital nasional, salah satunya dengan tersedianya akses internet bagi masyarakat, baik di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) maupun non-3T. Akses internet yang wajib disediakan pemerintah terutama di lokasi layanan publik seperti sekolah, puskesmas, balai latihan kerja, ruang publik, terminal, dan pos lintas batas negara. Harapannya antara lain dapat memberikan manfaat dan

membuka akses, mengurangi kesenjangan digital (digital gap), dan tentu saja mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan program Desa Informasi yang pernah diluncurkan di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Republik Demokratik Timor-Leste, yang pernah saya kunjungi tahun 2011 dan 2019.

INFORMASI BENCANA

Pada masanya, Mobil Layanan Langsung Internet (M-PLIK) pernah digunakan sebagai mobil keliling berisi laptop yang menyediakan akses internet di Desa Informasi. Pada tahun 2009, M-PLIK digunakan pula dalam menyebarkan informasi tanggap bencana di Padang, lokasi bencana yang pernah saya kunjungi. Gempa 7,9 skala richter ini menewaskan 1.117 orang, 1.214 luka berat, 1.688 orang luka ringan, dan 1 orang hilang. Tidak kurang dari 135.448 rumah rusak berat seperti hotel, rumah ibadah, sekolah, dan permukiman warga. Listrik padam dan sinyal telepon mati di Kota Padang dan beberapa wilayah lain di Sumatera Barat.



GEN Y X GPR MILENIAL

Tahun 2017, Ibu Rosarita Niken Widiastuti (Dirjen IKP 2016-2019) ingin adanya pelatihan bagi PNS muda, yang disebut sebagai Gen Y, di Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik. Materi dan narasumber pelatihan ini disesuaikan dengan kebutuhan komunikasi publik *zaman now* yang kekinian, seperti membuat vlog dengan gawai (smartphone), membuat infografis, optimalisasi media sosial. Sebelumnya, pelatihan serupa belum pernah dilakukan untuk ASN di Ditjen IKP.

Tahun 2019, Profesor Widodo Muktiyo, waktu itu beliau Dirjen IKP, berkeinginan agar ASN di Ditjen IKP, yang beliau sebut sebagai GPR milenial, memiliki kebiasaan menggunakan media sosial untuk menyampaikan

pesan positif. Twitter, Instagram, dan Facebook, adalah tiga media sosial pribadi yang wajib digunakan dengan jumlah pengikut (*followers*) minimal 500. Pada Desember 2020, Ditjen IKP meluncurkan website djikp.kominfo.go.id dan menganugerahkan GPR Milenial kepada 10 orang ASN Ditjen IKP dengan jumlah pengikut terbanyak dan teraktif. Saya adalah salah satu ASN yang mendapatkan penghargaan tersebut.

Tidak berhenti di situ, kemudian saya juga mendapat penghargaan sebagai "Pegawai Teraktif dalam Diseminasi Informasi di Media Sosial Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Bulan Februari 2021", dari Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Profesor Widodo Muktiyo.

INFORMASI UNTUK SEMUA

Penyandang disabilitas sensorik yang memiliki keterbatasan dengar berkomunikasi dengan cara yang berbeda. Tuna rungu atau tuli membutuhkan Juru Bahasa Isyarat (JBI) untuk menerjemahkan informasi dengan mudah dan cepat mengenai pandemi COVID-19. Ditjen IKP memfasilitasi JBI di setiap konferensi pers yang

disampaikan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) sejak Maret 2020. Sampai saat ini, hampir di setiap webinar yang dilaksanakan di Ditjen IKP ada JBI. Konten video yang diproduksi selain suara juga ada teks.

KOLABORASI IPRAHUMAS

Pranata Humas memasuki babak baru sejak perubahan struktur organisasi dari Badan Informasi Publik ke Ditjen IKP, tahun 2010. Perubahan ini diikuti dengan perubahan lainnya antara lain butir kegiatan, terselenggaranya Pra Kongres Pranata Humas Indonesia pada November 2014 di Yogyakarta, sampai pembentukan Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) pada Kongres Pranata Humas Indonesia pada Agustus 2015.

Sebelum Iprahumas terbentuk, kolaborasi dengan Pranata Humas telah dilakukan dengan mengadakan Klinik Penilaian Angka Jabatan Fungsional Pranata Humas secara tatap muka saat Kongres Pranata Humas Indonesia. Pranata humas bisa berkonsultasi dengan Tim Penilai Pranata Humas. Ini menjadi awal adanya konsultasi melalui grup Whatsapp Klinik Penilaian Angka Kredit Pranata Humas. Konsultasi

daring ini dimanfaatkan Pranata Humas untuk memahami butir kegiatan dan bukti fisiknya sebelum mengumpulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).

Kolaborasi dengan Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) berikutnya mengadakan Kelas Belajar sejak Maret 2018. Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian Pranata Humas dalam menjalankan tugas pelayanan informasi dan kehumasan yang serba digital. Pelatihan kolaboratif pertama dilakukan Minggu pagi di parkir Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta, dengan tujuan belajar nge-vlog anti hoaks. Selain mendapatkan pelajaran dari narasumber, peserta langsung praktek membuat konten vlog dengan materi talkshow dan deklarasi masyarakat anti hoaks, yang difasilitasi Ditjen IKP di lokasi yang sama.

KOLABORASI PENANGANAN HOAKS

Hoaks atau berita bohong saat ini dikhawatirkan akan memperparah pandemi COVID-19 di Indonesia. Kekebalan kelompok (*herd immunity*) akan sulit dicapai, mengganggu perekonomian masyarakat dan menguras APBN. Sejak Januari 2021, Bapak Donny BU, Tenaga Ahli Menkominfo Bidang Tata Kelola dan Budaya Digital, menggagas grup Whatsapp Hoaks Buster Indonesia sebagai wadah kolaborasi penanganan hoaks khususnya tentang COVID-19 dan vaksinasinya, dengan berbagai mitra kerja tidak hanya Ditjen Aptika, Ditjen IKP, dan Biro Humas di Kemkominfo, tetapi juga dengan Kementerian Kesehatan, BNPB, Kantor Staf Presiden, Kepolisian RI, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Cek

Fakta, Facebook, Tiktok, dokter yang menangani pasien dan edukasi COVID-19.

Perjalanan panjang saya selama 13 tahun menjadi ASN di Kemkominfo tidak berhenti di sini. Terlalu banyak yang tidak bisa ditulis karena keterbatasan halaman. ASN Kemkominfo adalah bagian dari sejarah 20 Tahun Kemkominfo melayani bangsa. Meskipun tahun ini masih pandemi, tetap lakukan pekerjaan dengan sikap optimis dan bahagia. Selamat Ulang Tahun ke-20 Kementerian Komunikasi dan Informatika. Indonesia Terkoneksi! Makin Digital, Makin Maju!

Penulis: Lida Noor Meitania

Pranata Humas Ahli Muda

(Subkoordinator Produksi Konten dan Diseminasi Informasi Sosial, Direktorat IKPMK)

Dua Dekade

dari Perspektif Sivitas Kominfo

2001

2002

2003

2004

2005

2011

2016

2006

2012

2017

2007

2013

2018

2008

2014

2019

2009

2015

2020

2010

2021





Ir. Noor Iza, M.Sc.

Sekolah Tinggi Multimedia (STMM) Yogyakarta

Kehadiran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam 20 tahun terakhir telah menunjukkan betapa besar dan krusial peran Kemkominfo dalam kemajuan internet di Indonesia baik dari sisi jaringan dan keterjangkauan wilayah layanan maupun yang lebih utama adalah kemanfaatan dengan berkembangnya aplikasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat, bisnis dan pemerintahan melalui berbagai transformasi digital yang terjadi.



Sangat tepat dalam forum PBB yaitu World Summit on Information Society (WSIS) ketika Indonesia memberikan kontribusi ketentuan dalam Tunis Agenda 2005 "We reiterate our commitments to the positive uses of the Internet and other ICTs and to take appropriate actions and preventive measures, as determined by law, against abusive uses of ICTs mentioned under Ethical Dimensions of the Information Society of the Geneva Declaration of Principles and Plan of Action".

Pertimbangan dari ketentuan tersebut dengan keyakinan pertumbuhan ICT di Indonesia akan begitu pesat utamanya didukung jaringan seluler yang semakin memungkinkan menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia, sehingga pemanfaatan Internet menjadi dorongan dan digitalisasi berbagai sisi kehidupan yang tentu pada saat yang bersamaan terdapat kepentingan bersama

”

untuk menghadirkan Internet dan dunia digital yang menerus menerus positif dengan meningkatkan pengetahuan, ekonomi, dan inovasi serta menjaga dari informasi atau konten yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

”



Komang Sudiarta, s.H., M.H

Kepala Balai Monitor SFR Kelas I Denpasar

Rasanya belum terlalu lama berlalu ketika masih terngiang tentang Kantor Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, Lembaga Informasi Nasional (LIN), dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) Departemen Perhubungan.

Dua puluh tahun sudah, ketiga institusi tersebut melebur menjadi satu dalam naungan Departemen Komunikasi dan Informatika yang telah bermetamorfosis menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) guna menjawab tantangan perkembangan zaman khususnya pada bidang komunikasi dan informatika.

Rasanya belum terlalu lama Ditjen Postel yang mengawaki bidang pos dan telekomunikasi tempat kami bernaung yang sebelumnya sempat berada di dua lembaga yaitu Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dan Departemen Perhubungan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di masing-masing provinsi, selalu konsisten mengawal sektor pos dan telekomunikasi mulai dari penataan, pelayanan, pengawasan, dan pengendalian.

Sampai akhirnya pada tahun 2010, lagi-lagi untuk menjawab tantangan perkembangan zaman dan teknologi, Ditjen Postel dilebur menjadi dua direktorat, yaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI).

Kami, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Denpasar,

sebagai salah satu dari 35 UPT Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) yang bernaung di bawah Kementerian Kominfo hadir menjawab tantangan tersebut.

Kami berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penggunaan perangkat telekomunikasi dan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sebagai sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikembalikan lagi ke masyarakat dalam wujud pemerataan akses telekomunikasi dan informasi.



Pemanfaatan perangkat telekomunikasi dan spektrum frekuensi radio meliputi berbagai sektor, mulai dari pariwisata, adat dan kemasyarakatan, komunikasi seluler, media penyiaran radio maupun televisi, terrestrial ataupun satelit, sampai dengan objek-objek vital nasional.

Hal ini mendatangkan tantangan tersendiri bagi negara dalam menata, melayani, mengawasi, dan mengendalikan penggunaan perangkat telekomunikasi dan spektrum frekuensi radio agar dalam pemanfaatannya tidak saling mengganggu antar satu pengguna dengan pengguna lainnya.

Dengan didukung sumber daya manusia yang mumpuni dan mengimplementasikan nilai-nilai SDPPI (Semangat, Disiplin, Profesional, Produktif, dan Integritas). Selain SDM, kami juga didukung oleh alat dan perangkat yang terintegrasi meliputi stasiun monitoring tetap yang dapat dioperasikan jarak jauh serta kemampuan pencarian arah sumber pancaran, stasiun monitoring bergerak berupa mobile monitoring unit untuk mendapatkan data penggunaan spektrum frekuensi radio secara langsung yang juga dilengkapi

fitur pencari arah, demikian pula perangkat jinjing dengan spesifikasi yang mumpuni guna mendapatkan karakteristik pancaran secara lebih detail.

Berbagai daya upaya kami lakukan sebagai wujud komitmen dan kesungguhan untuk memberikan pelayanan, penataan, pengawasan, pengendalian, sampai dengan penegakan hukumnya dalam mengawal penggunaan perangkat telekomunikasi dan spektrum frekuensi radio di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Zainullah Manan, ST, MT

Kepala Balai Monitor SFR Kelas II Padang

*Jalan-jalan ke Sumatera Barat
Jangan lupa tanya lokasi
Dulu zaman surat menyurat
Sekarang zaman telekomunikasi*

Sebagai pembuka ada kalimat sederhana tetapi memiliki makna yang sangat dalam: "MAN JADDA WAJADA" Barangsiapa bersungguh-sungguh, maka ia pasti berhasil, sesuai filosofi hidup yang diterapkan saat ini bahwa cintailah pekerjaan kita karena mungkin itu adalah tempat untuk menuai rezeki, keberkahan, dan ibadah kita. Ketika kita diberi kepercayaan atas pekerjaan itu, maka itu adalah amanah dan kita punya kelebihan sendiri, jadi lakukan pekerjaan itu sebaik mungkin. Barakallah..

Tak kenal maka tak sayang. Saya awali perjalanan karir sebagai ASN, berawal dari penempatan CPNS di Kanwil Perhubungan tahun 1998, staf di Bidang Pos dan Telekomunikasi saat transisi perpindahan Ditjen Pos dan Telekomunikasi dari Kementerian Pariwisata dan Pos dan Telekomunikasi (Deparpostel) ke Departemen Perhubungan (Dephub), sampai promosi di tahun 2004 dimutasi ke Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura sebagai Kasi Penertiban Frekuensi Radio sampai tahun 2008.

Pengabdian berlanjut ke Subdit Analisa dan Evaluasi Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio Ditjen Postel Departemen Kominfo, dan tahun 2011 Subdit Montib Spektrum Direktorat Pengendalian Ditjen SDPPI sebagai Kasi Montib Spektrum Non DTBD dan Kasi Penertiban Frekuensi Radio Kementerian Komunikasi dan

Informatika sampai akhir tahun 2016 di Jalan Medan Merdeka Barat 9 Jakarta. Awal tahun 2017, pengabdian terus berlanjut jadi Kepala Loka Monitor Spektrum Radio Mataram hanya 9 bulan, dan pada awal tahun 2018 hingga sampai saat ini sebagai Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang. Saya jalani semua dengan sabar dan ikhlas sesuai pembuka tadi "Man Jadda Wajada" itulah resiko ASN siap ditempatkan di mana saja di wilayah NKRI sebagai pengabdian perjalanan karir saya di dua Kementerian yaitu Perhubungan dan Kominfo sampai saat ini.

Dalam perjalanan 20 tahun Kementerian Kominfo dengan slogannya "Indonesia Terkoneksi - Makin Digital, Makin Maju. Sesuai arahan Bapak Presiden RI Joko Widodo mengenai Perencanaan Transformasi Digital dan sesuai arahan Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate untuk bersama-sama menatap hari esok dengan tekad, semangat dan memancang harapan baru akan Indonesia Digital "Indonesia Toward Digital Nations". Bersama kita songsong kebangkitan sektor telekomunikasi Indonesia dengan penuh optimisme. Melaju pesat menjadi bangsa pemenang menuju bangsa digital yang gemilang dan penuh harapan.

Sejak wabah pandemi Covid-19 menyerang di Maret 2020 hingga saat ini, digitalisasi di sektor komunikasi dan informatika lebih cepat pelaksanaannya, ditandai dengan kemudahan aktivitas bekerja di kantor bisa WFO dan WFH dengan menggunakan aplikasi yang ada di Portal Kominfo. Dengan memaksimalkan fitur-fiturnya mulai dari absensi *geotagging*, disposisi surat menyurat *siMAYA*, pengajuan cuti, bahkan rapat pun bisa di mana saja via aplikasi Zoom atau aplikasi

meeting room lainnya. Kita sudah memasuki "transformasi digital" dengan apa yang dinamakan "Indonesia Toward Digital Nations", dan "Indonesia Terkoneksi - Makin Digital, Makin Maju".

Sebagai penyemangat saya dalam mengabdikan sebagai ASN Kominfo, saya kutip hadits qudsi: dari sahabat Annas bin Malik RA, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Allah ta'ala berfirman, 'Aku menurut persangkaan hamba-Ku kepada-Ku; dan Aku bersamanya jika ia memanggil-Ku (berdoa kepada-Ku).'" (HR. Ahmad) dengan kata lain: Aku menurut persangkaan hamba-Ku kepada-Ku". Jika prasangka kita baik kepada Allah maka baik pula hasilnya, jika prasangka kita buruk maka buruk pula hasilnya. Jadi selalu optimis akan mencapai keberhasilan dalam bekerja, dalam melaksanakan tugas yang diemban, dalam mengeksekusi program-program kerja yang diamanahkan pimpinan kepada saya dalam melaksanakan tugas di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang dan di manapun saya bertugas.

Akhirul kalam sebagai penutup :

*Putar musik sambil bergoyang
Bergoyang sama Pengendali
Frekuensi
Kabar baik selalu datang
Karena majunya alat telekomunikasi*

*Ada masalah ada solusi
Ada pantun ada puisi
Majunya era telekomunikasi
Memudahkan Kita Berkomunikasi*



Abdul Rahman Harahap, S.Sos, M.Si

Kepala BPSDMP Kominfo Banjarmasin



Kalimantan terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah, terdapat industri tambang, minyak bumi, dan perkebunan kelapa sawit. Kekayaan alam itu yang membuat Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalimantan sangat tergiur dengan pekerjaan khususnya di bidang pertambangan tersebut.

Sehingga, hampir semua SDM dari segala jenjang berharap dapat bekerja di dunia pertambangan dan energi, mengingat tingginya penghasilan yang diterima. Kehadiran Program Pengembangan SDM bidang Kominfo menjadi angin segar, pembeda di antara pengembangan SDM lainnya, terutama untuk pemenuhan tenaga kerja terampil bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang ternyata juga diperlukan oleh industri pertambangan dan energi.

Sejalan dengan pemenuhan tenaga kerja terampil di bidang TIK, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Litbang SDM pada tahun 2021 telah melaksanakan Program Digital Talent Scholarship (DTS).

DTS adalah peningkatan suatu kompetensi atau skill di bidang digital baik hardware, software, maupun animasi dan sesuai dengan ruang lingkupnya. Hal yang mendasari program ini adalah penelitian World Bank dan McKinsey yang menyatakan adanya kebutuhan 9 juta talenta digital di Indonesia hingga tahun 2030.

Kemudian juga, Indonesia memasuki era digital dan akan mengarah ke ekonomi digital, maka pemerintah sedang mempersiapkan orang-orang yang memiliki keterampilan dan mampu untuk bisa mengisi pekerjaan-pekerjaan di dunia digital itu hingga tahun 2030.

Di sisi lain, program DTS juga menghadapi kendala. Pertama, tentang penyebaran wilayah di mana peserta yang ikut DTS tahun 2021 itu hanya tersentral di Pulau Jawa dan Sumatera. Sedangkan di Kalimantan banyak faktor yang membuat animo masyarakat kurang bergairah ikut program DTS ini. Karena pembelajaran dilaksanakan secara daring, maka banyak peserta dari Kalimantan tidak maksimal mengikuti pembelajaran karena jaringan internet yang belum memadai di beberapa daerah.

Menghadapi kendala ini Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo Banjarmasin akan mengubah strategi perekrutan peserta dan strategi pelaksanaan. Strateginya kita ubah, misalnya pelatihan dilaksanakan secara blended sebagian jam pelajaran (JP) dilaksanakan secara daring dan sebagian lagi secara offline/luring. Kemudian, melalui rapat koordinasi

dengan Dinas Kominfo, Dinas Koperasi dan UMKM dan dinas-dinas terkait lainnya yang didukung oleh gubernur, bupati, walikota disepakati pemerintah daerah turut menentukan kuota peserta dan tema pelatihan sesuai kebutuhan daerah.

Karena tema-tema yang ada di DTS sangat dibutuhkan oleh ASN pemerintah daerah seperti Digital Leader untuk para kepala dinas, ada Government Transformation Academy untuk para ASN, Digital Entrepreneurship untuk pelaku UMKM, Digital Media Reporter untuk wartawan dan pekerja media, Professional Academy untuk para profesional dan industri, serta Vocational School Graduate Academy (VSGA) untuk lulusan SMK dan Fresh Graduate Academy untuk lulusan S1 bidang IT.

Dengan bekerja sama dan sepakat dengan pemerintah daerah, diharapkan rekrutmen peserta bisa merata dan terwakili untuk mendorong digital government dan ekonomi digital.



Dra. Betty Djuliaty

Kepala BPSDMP Kominfo Bandung



Peran sektor teknologi informasi dan komunikasi memiliki nilai strategis dalam pembangunan negara. Seperempat abad terakhir ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya menciptakan percepatan informasi namun juga berpengaruh signifikan dalam berbagai aspek kehidupan.

Mulai dari perubahan jejaring interaksi, munculnya berbagai struktur dan bentuk transaksi, konektivitas tanpa batas menjadikan atribut peran dapat berubah-ubah, bahkan mendorong tatanan industri menjadi *borderless landscape industry*. Secara implisit "anything/ anyone can be e-everything/e-anyone" dalam ruang virtual.

Keterhubungan menyambungkan entitas ke dalam platform multinasional, memunculkan standar-standar baru yang bersifat universal, dan mau tidak mau, sadar

tidak sadar disepakati serta diikuti elemen yang terlibat.

Mencermati implikasi tersebut, disadari bahwa informasi tidak hanya bernilai ekonomis, namun juga dapat menggeser sektor ekonomi yang mengandalkan produk menjadi ke arah memperluas layanan dan pengetahuan dengan mendorong masyarakat Indonesia secara bertahap menuju masyarakat informasi.

Interdependensi industri satu dan lainnya dapat muncul, namun hal ini perlu disikapi dengan "partnership" yang berdaya saing dan bernilai dalam ekosistem yang ada. Mendorong peningkatan elemen di dalam ekosistem tidak cukup hanya dari sisi keterampilan teknis saja, tetapi juga pandangan,

penerimaan, dan kesadaran bersama sebagai satu kesatuan entitas di dalam bernegara.

Indonesia sebagai bagian lanskap global juga bertransformasi di era digital. Kesadaran bersama atas kerentanan dalam era digital menjadi pondasi untuk membangun kesiapan dalam menghadapi transformasi digital.

Hal penting yang perlu terus dijaga dalam transformasi ini adalah sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara agar Indonesia tetap memiliki kedaulatan, berdaya saing, dan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.



Saya sebagai PNS sejak 1989, masa kerja sudah 32 tahun. Di era dahulu, mengenakan atribut biru-biru beremble Anantakupa (Api Nan Tak Kunjung Padam Juru Penerang (Jupen), RRI (Radio Republik Indonesia) dengan motto "sekali di udara tetap di udara" dan TVRI (Televisi Republik Indonesia) dengan motto "Menjalin Persatuan dan Kesatuan" merupakan 3 serangkai ujung tombak penyampaian pesan-pesan pembangunan yang merasuk hingga pelosok pedesaan di seluruh Indonesia.

Berbagai informasi digulirkan dan didiskusikan dan diperlombakan, baik melalui kemas Petani dan Nelayan Membangun Desa, Kelompencapir (Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa), dengan pemuncaknya berupa Pekan Penerangan Pedesaan (Pependes) yang dilaksanakan secara nasional.

Oleh karenanya masyarakat mengetahui hal apa saja yang akan dilakukan pemerintah, apa yang tengah dilaksanakan, dan sejauh mana capaian pembangunan itu bermanfaat juga bagi masyarakat yang pada gilirannya mereka mampu dan mau berpartisipasi langsung dalam pembangunan.

Terlepas dari asumsi atau opini atas pola kebijakan atau politik pemerintahan, two way traffic tercipta dinamis antara pemerintah dengan masyarakat membuat Departemen



Dr. Zulkurnain

Kepala BPSDMP Kominfo Yogyakarta

Penerangan menjadi icon sebagai juru bicara pemerintah yang handal.

Menyitir ramalan Jaya Baya yang mengatakan satu saat nanti manusia akan memasuki suatu zaman "edan", James F. Sundah dalam webinar Perlindungan Kekayaan Intelektual yang digelar STMM Yogyakarta (16/07/2020) mengatakan ciri-ciri spesifiknya yaitu (a) keadaan yang baru ada pada saat ini, sebelumnya belum pernah ada, bahkan belum terpikirkan, (b) orang harus mengikuti kondisi eDAN supaya kebagian, dan (c) harus waspada supaya selamat. eDAN sendiri merupakan kependekan dari elektronik (e-mail, e-Govt, e-KTP dst), Data, Angka-angka, dan Norma baru.

Adalah suatu niscayaan bagi siapa saja yang tidak mampu dan tidak mau beradaptasi dengannya, maka ia akan tertinggal bahkan terlindas.

Peran Kominfo selaku pengemban kuasa pengaturan lintas komunikasi maupun transaksi di segenap bidang kehidupan di era eDAN ini tentunya perlu dimaknai sebagai amanah yang lebih ditujukan pada keberpihakan kepada rakyat, dan ini tentunya tugas mulia yang tiada taranya. Sayangnya, hingga kini, belum bisa mewujudkan diri sebagai ujung tombak GPR (Government Public Relations).

Dalam hal komunikasi publiknya, pemerintah masih lebih menugaskan juru bicara perseorangan, influencer, yang kadang terlihat gagap dalam memberikan penjelasan, atau bahkan tidak berkaitan dengan substansi pertanyaan publik.

Entah dikarenakan kurang penguasaannya terhadap substansi, entah dikarenakan kurang penguasaannya atas teknik dan

strategi komunikasi, atau disebabkan hal lain. Pada sisi yang satunya lagi, sistem komunikasi ataupun transaksi secara elektronik yang terjadi (saat ini) masih dirasakan masyarakat berbiaya tinggi.

Spot yang dijadikan indikatornya, di antaranya, adalah konsumsi pulsa atau paket data yang dibatasi dengan durasi waktu. Habis atau masih tersisa kuota pulsa atau paket datanya, apabila tenggat waktu sudah dimasuki, maka ia menjadi hangus dan harus membeli lagi (kalau masih ingin berinternet-ria).

Padahal, pulsa dan paket data di era kekinian sudah menjadi kebutuhan primer, bukan lagi sekedar kebutuhan sekunder atau konsumtif.





Drs. Darsa Jaya Hedar M.Ap

Kepala BPSDMP Kominfo Manado

Pada orde baru Departemen Penerangan (Deppen RI) merupakan salah satu leading sector pemerintah pada saat itu, di mana Deppen berfungsi sebagai corong informasi pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan di pelosok tanah air NKRI. Departemen Penerangan mempunyai slogan "Api Nan Tak Kunjung Padam". Namun seiring dengan semangat reformasi di era pemerintahan Gus Dur 1999 Api Nan Tak Kunjung Padam, akhirnya padam juga.

Seiring berjalannya waktu, dibentuk Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi yang hingga saat ini menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemkominfo) yang merupakan leading sector dalam pengembangan komunikasi dan informatika khususnya di

bidang digitalisasi yang saat ini mempunyai peran sangat penting apalagi menghadapi era 4.0

Beberapa upaya yang telah dilakukan dari sekian banyak oleh Kemkominfo, yaitu (1) Kominfo terus berupaya memaksimalkan pemerataan infrastruktur TIK di seluruh pelosok NKRI, (2) Migrasi siaran tv analog ke digital, (3) 4G ke 5G, (4) Melakukan berbagai kegiatan SDM digitalisasi di beberapa sektor yang dianggap penting untuk meningkatkan tingkat literasi dan SDM masyarakat Indonesia khususnya bagi calon tenaga kerja muda dibidang TIK, para pelaku UMKM dan para ASN, dan (5) Palapa Ring.

Manado, 17 September 2021





Drs. Irbar Samekto M.Si

Kepala BBPSDMP Kominfo Medan

Kementerian Kominfo, maka literasi TIK masyarakat secara bertahap meningkat signifikan, tahun 2019-2020 (survey APJII) penetrasi pengguna internet telah mencapai 73% atau 196,71 jiwa dari 270 juta jiwa.

Pijakan penetrasi pengguna internet ini penting, untuk memperlihatkan pada warga dunia, bahwa Indonesia konsisten menyejahterakan masyarakat melalui *financial inclusive* TIK untuk penguatan demokrasi, kebebasan memperoleh informasi, dan penguatan intelektual masyarakat. Selain literasi TIK yang meningkat, juga penyiapan kompetensi digital dilakukan secara masif dan merata melalui Digital Talent Scholarship (DTS).

Berada di 20 tahun Kementerian Kominfo, menggambarkan metamorphosis sebuah lembaga informasi dan komunikasi negara dari pembuat dan yang mendiseminasi konten informasi pembangunan hingga mengurus infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke penjurur wilayah Indonesia.

Penggunaan kata informatika memberi implikasi adanya keterlibatan perangkat teknologi informasi dalam penyampaian informasi dan kebebasan memperoleh informasi bagi pengetahuan anak bangsa dari Sabang hingga Merauke. Ketika tahun 2005, penyatuan tiga Lembaga informasi (Kemeneq Kominfo, LIN dan Ditjen Postek Dephub) menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika, kemudian

Saat ini dan ke depannya, pertumbuhan pengguna internet akan mendekati jumlah penduduk Indonesia dan data ini juga menggambarkan kekuatan ekonomi digital bangsa untuk menapak di peringkat lima besar dari negara negara di dunia. Rasa optimisme itu harus ada karena Kemenkominfo telah menyiapkan ekosistem digital secara lebih terencana dan sesuai dengan kebutuhan bangsa. Sukses 20 tahun Kemkominfo, Semakin Digital, Semakin Maju.





Eka Handayani, SE, MM.

Kepala BPSDMP Surabaya



Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPSDMP Surabaya merupakan bagian terbawah dari struktur organisasi Kementerian Kominfo memposisikan kami layaknya jembatan atau perantara komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat daerah. Seperti bus pada sistem komputer memiliki fungsi sebagai media pengirim data dari komputer pusat dan mentransmisikannya ke jaringan-jaringan komputer yang lain. Terkadang memiliki fungsi untuk menerima data dan diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bit-bit agar dapat dimengerti oleh jaringan komputer yang lainnya.

Kami yang ada di tengah-tengah masyarakat daerah dengan segala problematikanya, menjembatani suara-suara mereka ketika regulasi-regulasi baru ditembakkan kepada masyarakat. Kesulitannya dalam memanfaatkan teknologi digital, keluhannya mengenai kurangnya infrastruktur yang ada, dan kepercayaannya terhadap implementasi kebijakan. Kami bangun kepercayaan masyarakat daerah terhadap lembaga pemerintah yang pada saat itu masih dinilai asing dan absurd bagi mereka, lembaga tersebut adalah lembaga tercinta kami Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Kominfo (Kemkominfo) seringkali diuji di setiap peluncuran produk Kominfo yang mengikat masyarakat untuk bertindak sesuai regulasi yang dilahirkan. Seperti halnya registrasi kartu prabayar dimana pada saat itu masyarakat masih sangat ragu menginputkan data pribadinya, ibarat menyerahkan hidup mereka kepada Kemkominfo.

Pertanyaan serta keraguan mereka tercurahkan ke UPT Balai Surabaya yang dirasa paling bisa dijangkau oleh mereka. Begitu juga dengan pemberantasan hoaks dimana UPT Surabaya mendelegasikan anggotanya ke daerah-daerah wilayah kerja untuk membawa misi meningkatkan literasi dan kompetensi digital dengan sasaran usia sekolah sampai dengan ibu rumah tangga.

Peningkatan kompetensi digital dengan hadirnya Digital Talent Scholarship (DTS) yang disambut baik oleh masyarakat daerah dengan antusiasme yang cukup tinggi. Pada akhirnya sebagai UPT dari Kemkominfo membawa harapan besar untuk bisa mengikuti dinamika yang terjadi khususnya bidang teknologi komunikasi dan menjadi bagian dari Kementerian Kominfo dalam menjawab tantangan yang dihadapi kementerian ke depan.



Hamzah, SH, MH.

Kepala Loka Monitor SFR Gorontalo



Kominfo, sering saya tulis MCI, Ministry of Communication & Informatics, telah dua dekade hadir mengabdikan. Ia telah mengalami transformasi dari yang landai hingga paling ekstrim. Dari peran reguler, biasa-biasa saja, hingga kini menjadi paling fundamental. Ya, kini manusia bertumpu penuh pada teknologi. Pandemi mengakselerasi berkali-kali lipat transformasi digital. Sedikit terbata di awal, kini kita mulai fasih, menyesuaikan laju cepat tantangan. Kominfo bisa menjalankan perannya dengan baik, membangun infrastruktur telekomunikasi, tol langit. Connecting the unconnected.

Lahir sebagai anak sulung yang masuk 2006, merasakan 3 generasi teknologi; 3G, 4G, dan saat ini mulai implementasi generasi kelima, 5G. Riset GSMA menyebutkan bahwa setiap sepuluh tahun, generasi teknologi mobile communication berganti. 1G dimulai komersialisasi di tahun 1980-an, kemudian 2G tahun 1990-an, menyusul 3G di tahun

2000-an, 4G di tahun 2010-an dan 5G di dekade 2020. Tentu saja, tantangannya adalah pemerataan. Teknologi ini di awal kelahirannya di masing-masing generasi hanya bisa diakses masyarakat perkotaan. Ingat betul ketika tahun 2006, enam tahun komersialisasi teknologi generasi ketiga, saya di Surabaya sudah bisa menikmati layanan voice, sms, dan data termasuk ketika terhubung ke Jakarta, Bandung, dan kota-kota utama lainnya di Indonesia. Namun, ketika komunikasi ke Ibu saya di desa, di ujung Sulawesi, komunikasi voice saja masih sangat terbatas. Itu dulu, kini jauh berbeda

Pemerintah melalui 'MCI' telah meluaskan jangkauan hingga ke desa-desa. Total saat ini jaringan 4G telah bisa dinikmati di 82.218 desa/kelurahan di Indonesia. Benar adanya, sebab rumah masa kecil saya yang letaknya tetap di tempat yang dulu, sangat terpencil, kini telah ter-cover jaringan 4G, setiap hari bisa video call dengan Ibu saya, melihat senyumnya yang meneduhkan.

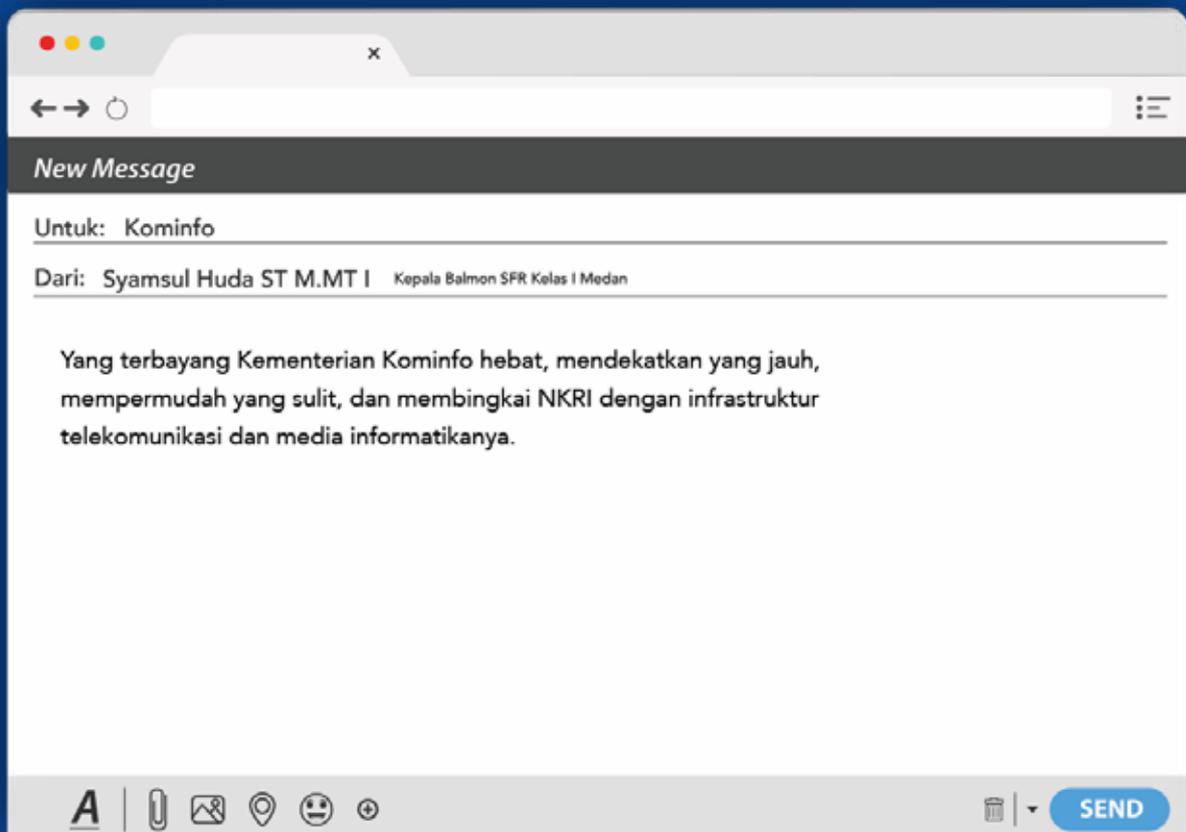
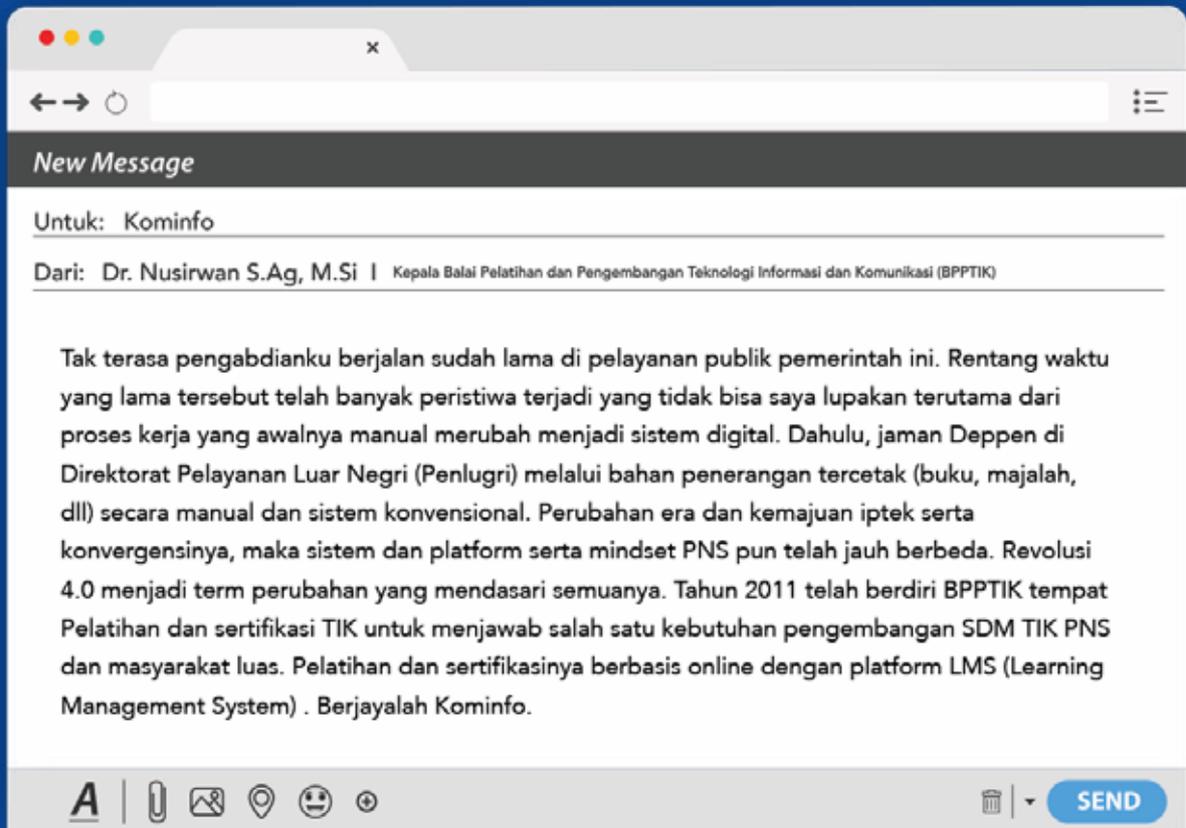
Bahkan pernah suatu kali pulang dan Zoom meeting dari sana, lancar tanpa putus. Kita telah semakin dekat dengan cita-cita Indonesia Digital, dukungan infrastruktur telekomunikasi dan ekosistem pendukungnya semakin menggembirakan. Selamat dua puluh tahun Kominfo, terus menghubungkan Indonesia...

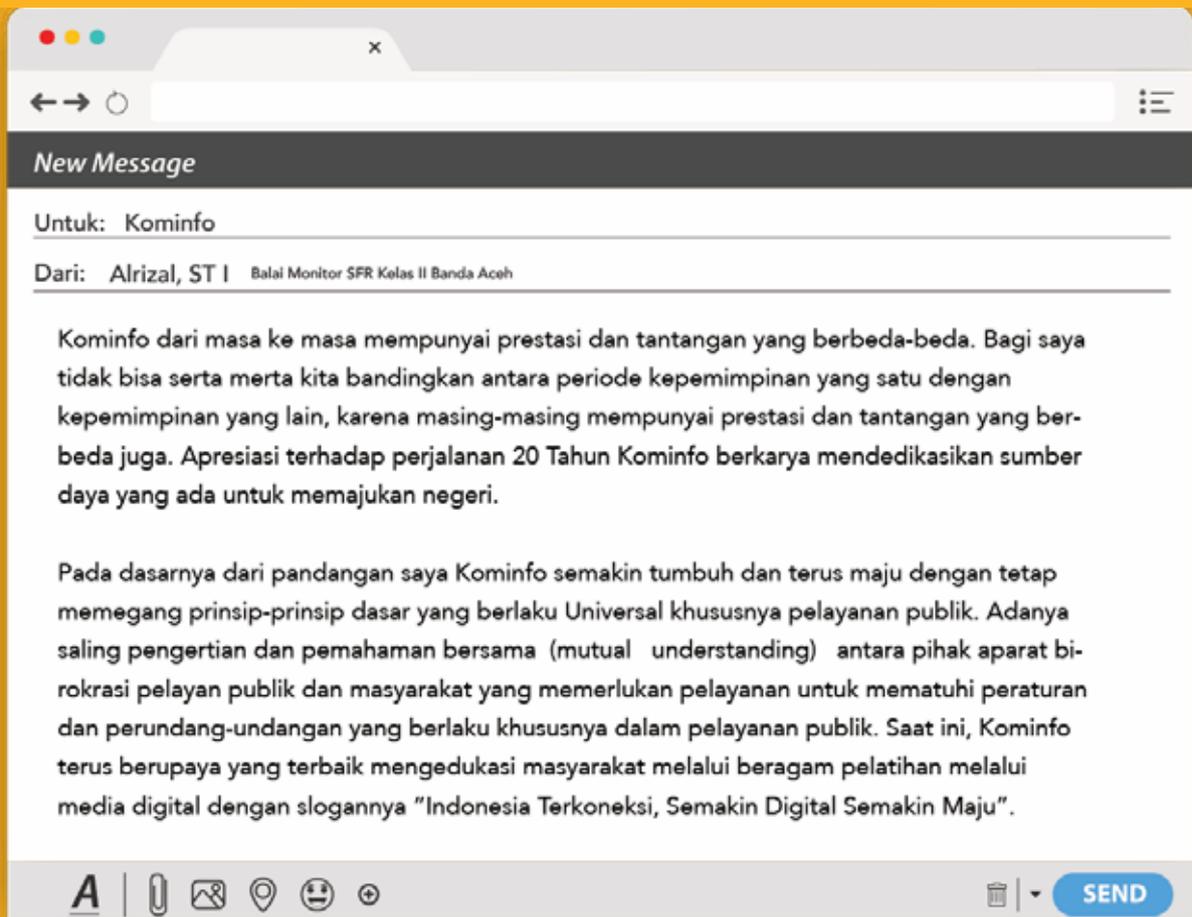
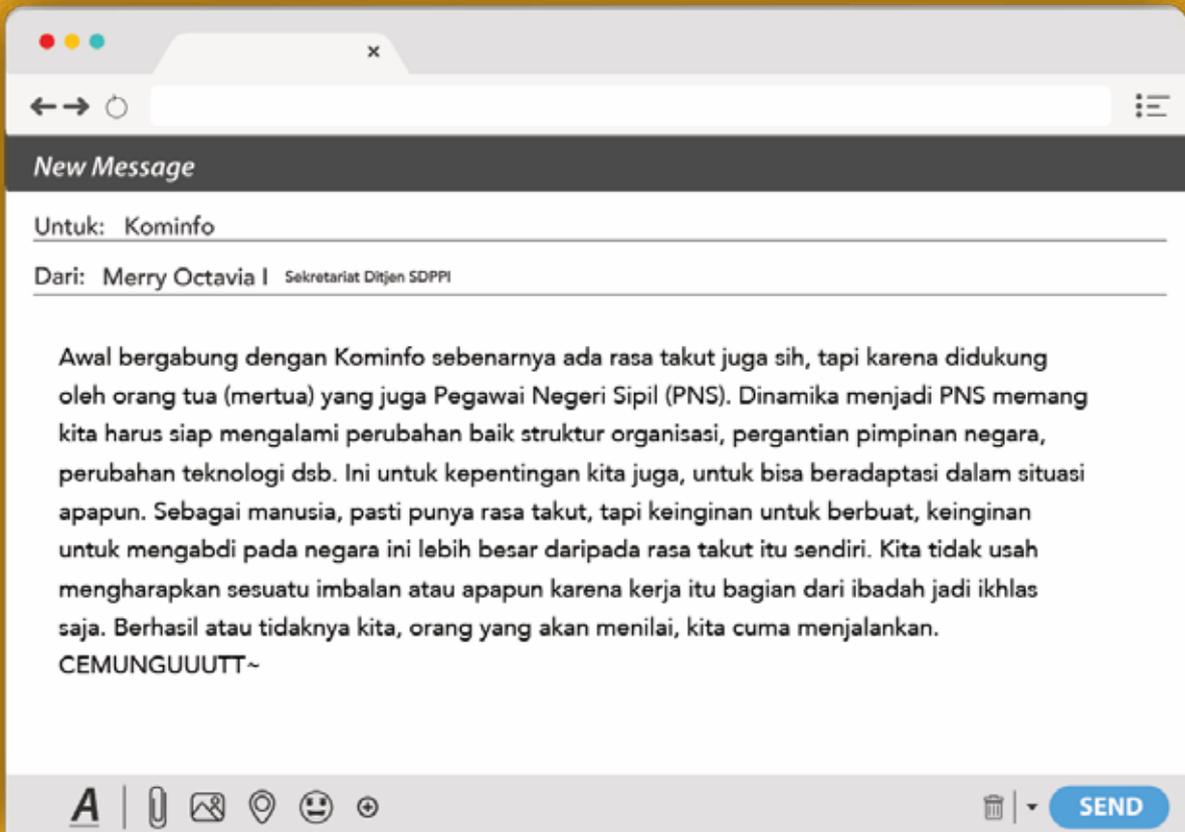


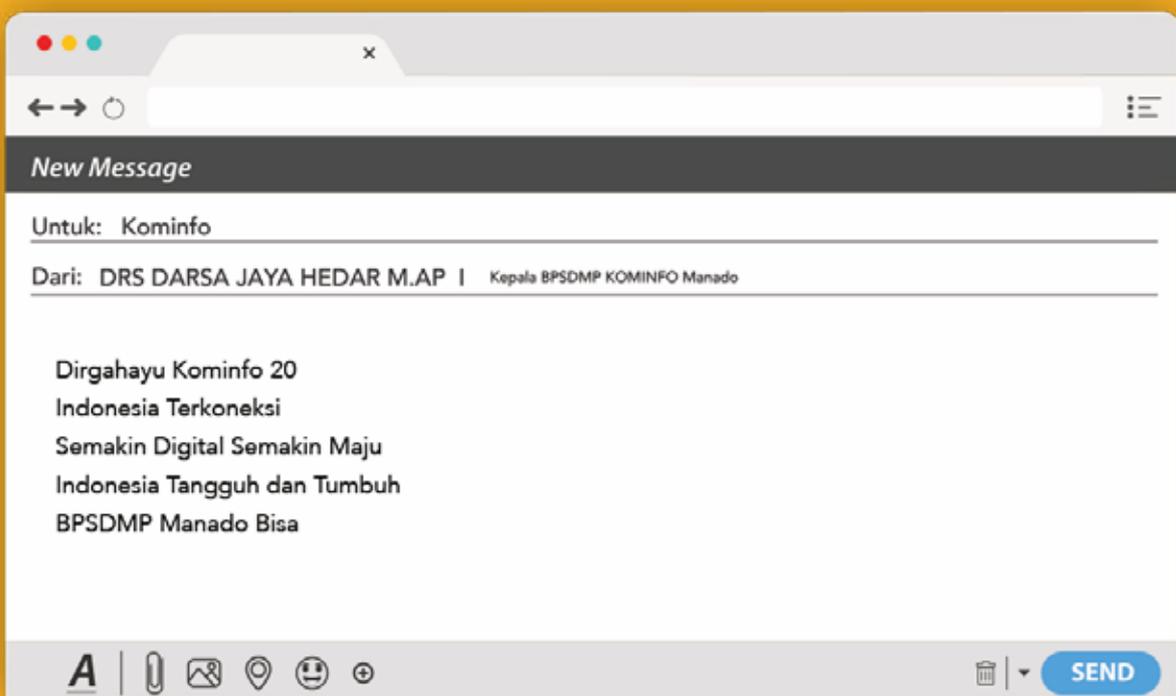
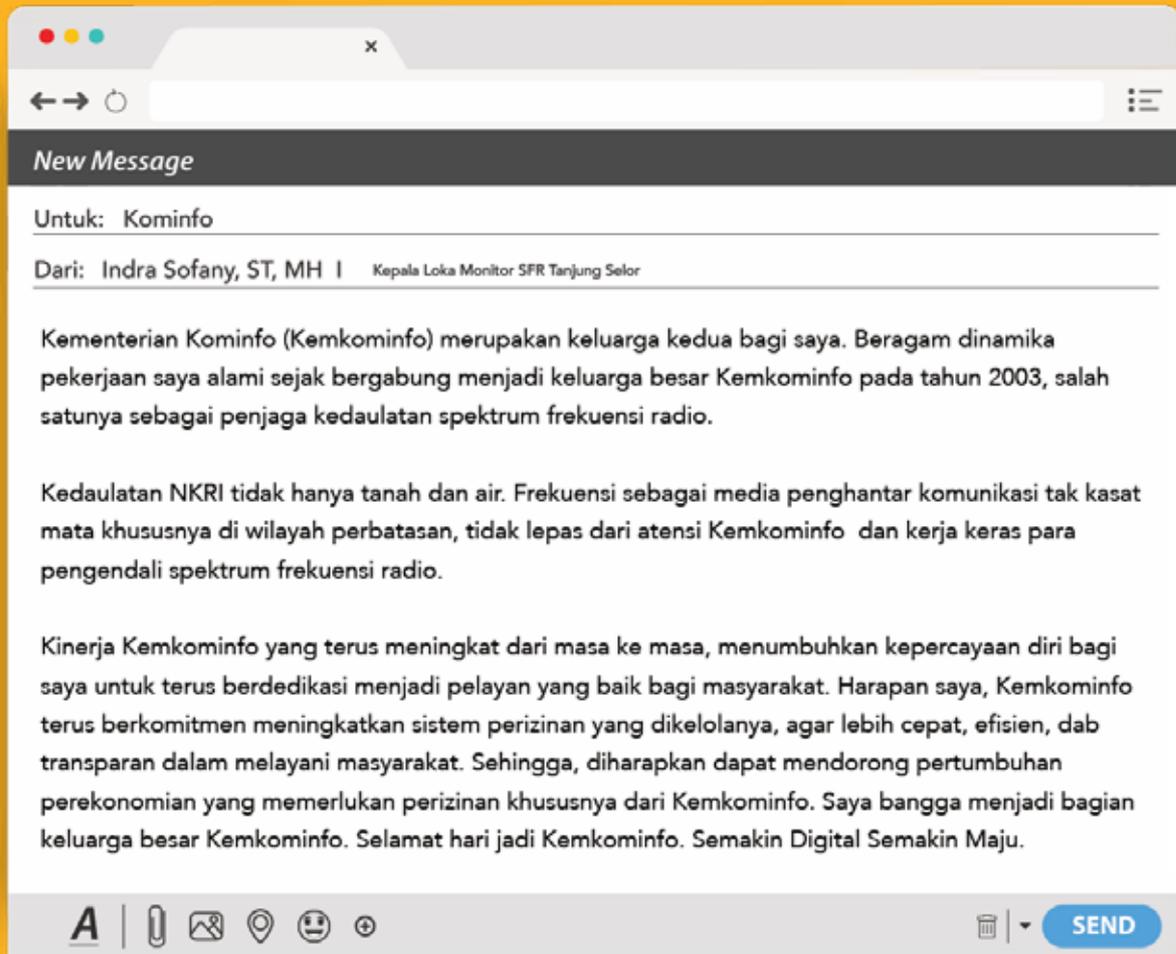


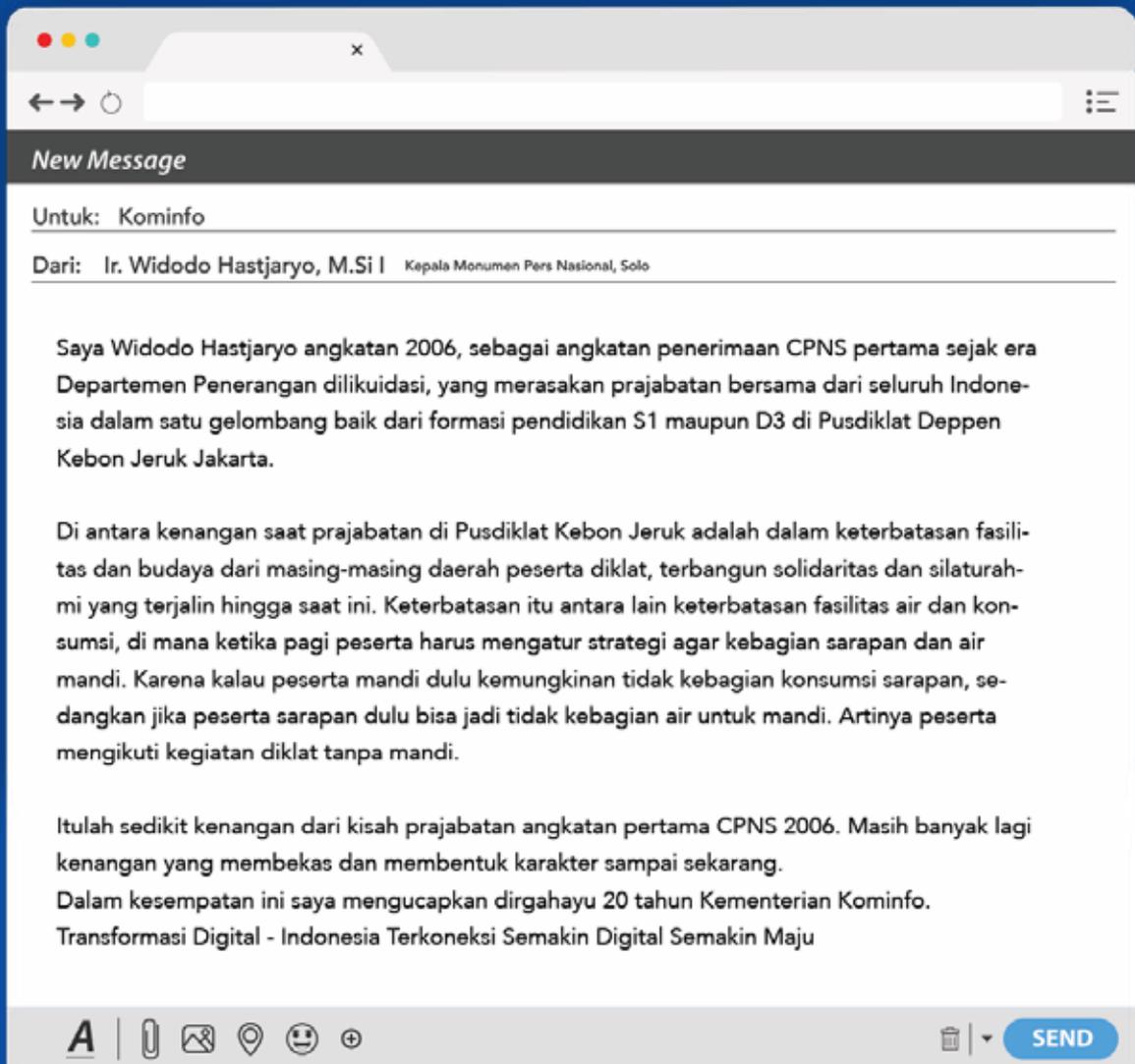
SALAM DARI SIVITAS

SELAMAT 20 TAHUN KOMINFO!
MAKIN DIGITAL, MAKIN MAJU!









New Message

Untuk: Kominfo

Dari: Ir. Widodo Hastjaryo, M.Si I Kepala Monumen Pers Nasional, Solo

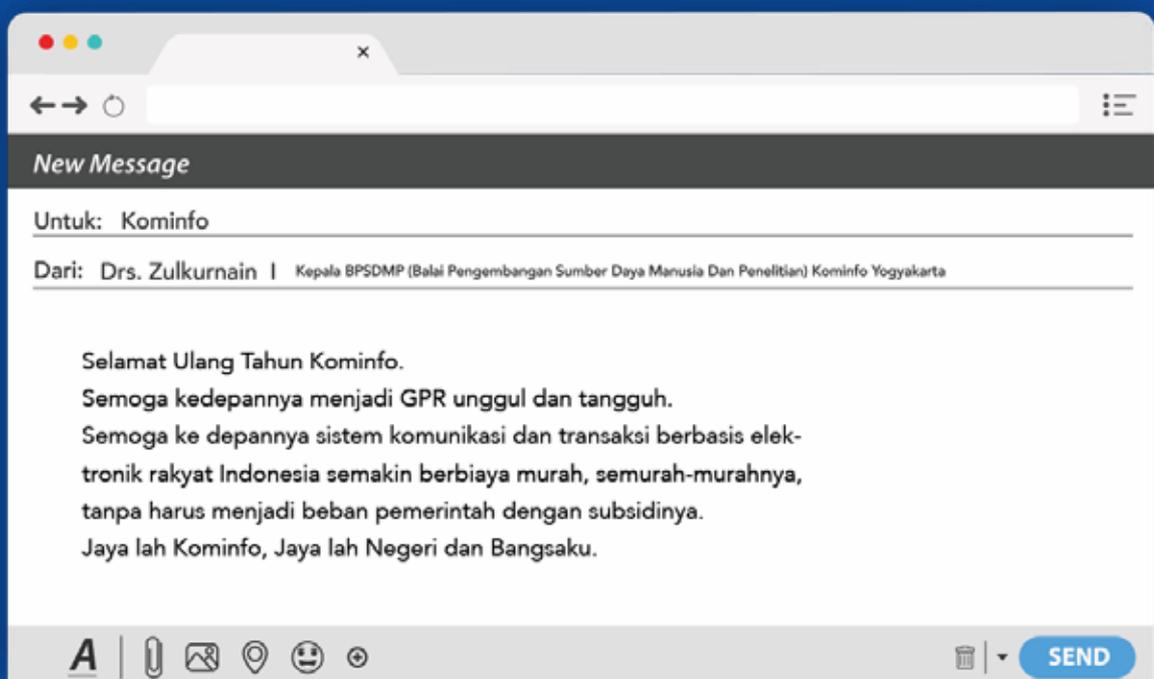
Saya Widodo Hastjaryo angkatan 2006, sebagai angkatan penerimaan CPNS pertama sejak era Departemen Penerangan dilikuidasi, yang merasakan prajabatan bersama dari seluruh Indonesia dalam satu gelombang baik dari formasi pendidikan S1 maupun D3 di Pusdiklat Deppen Kebon Jeruk Jakarta.

Di antara kenangan saat prajabatan di Pusdiklat Kebon Jeruk adalah dalam keterbatasan fasilitas dan budaya dari masing-masing daerah peserta diklat, terbangun solidaritas dan silaturahmi yang terjalin hingga saat ini. Keterbatasan itu antara lain keterbatasan fasilitas air dan konsumsi, di mana ketika pagi peserta harus mengatur strategi agar kebagian sarapan dan air mandi. Karena kalau peserta mandi dulu kemungkinan tidak kebagian konsumsi sarapan, sedangkan jika peserta sarapan dulu bisa jadi tidak kebagian air untuk mandi. Artinya peserta mengikuti kegiatan diklat tanpa mandi.

Itulah sedikit kenangan dari kisah prajabatan angkatan pertama CPNS 2006. Masih banyak lagi kenangan yang membekas dan membentuk karakter sampai sekarang.

Dalam kesempatan ini saya mengucapkan dirgahayu 20 tahun Kementerian Kominfo. Transformasi Digital - Indonesia Terkoneksi Semakin Digital Semakin Maju

A |       **SEND**



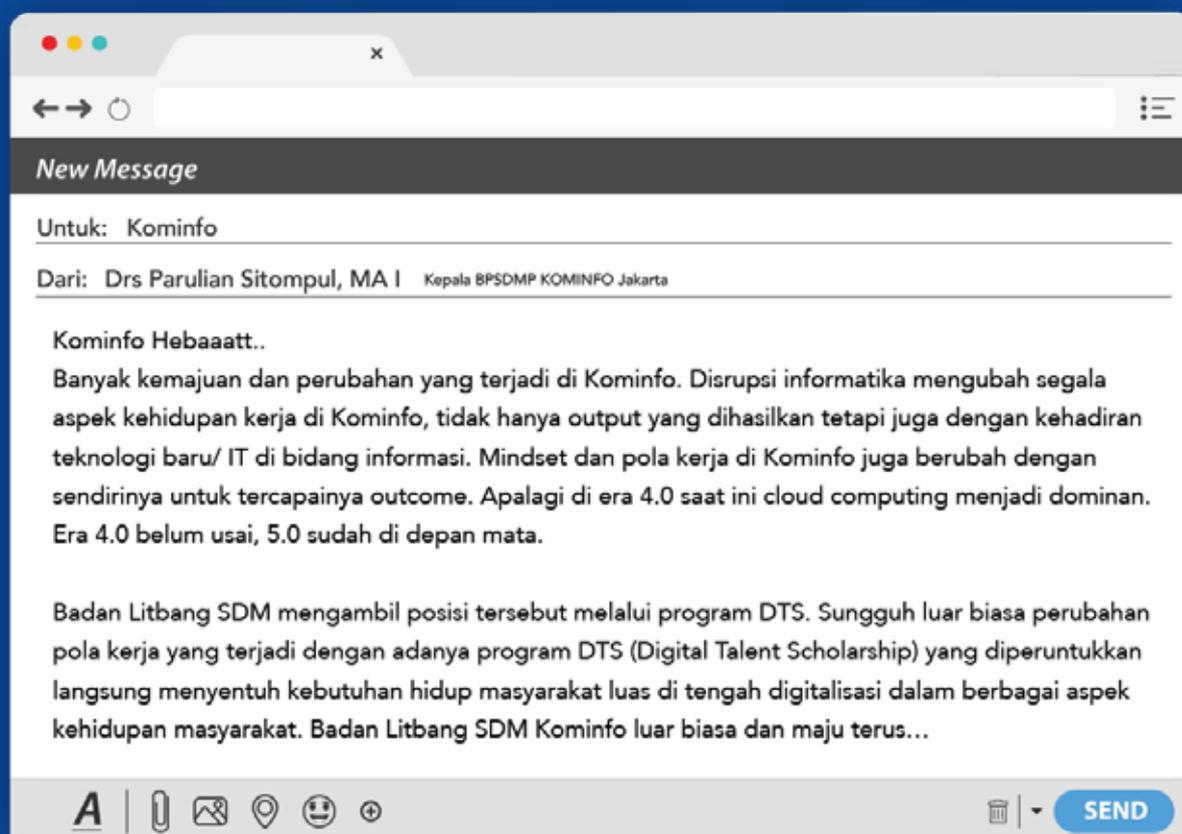
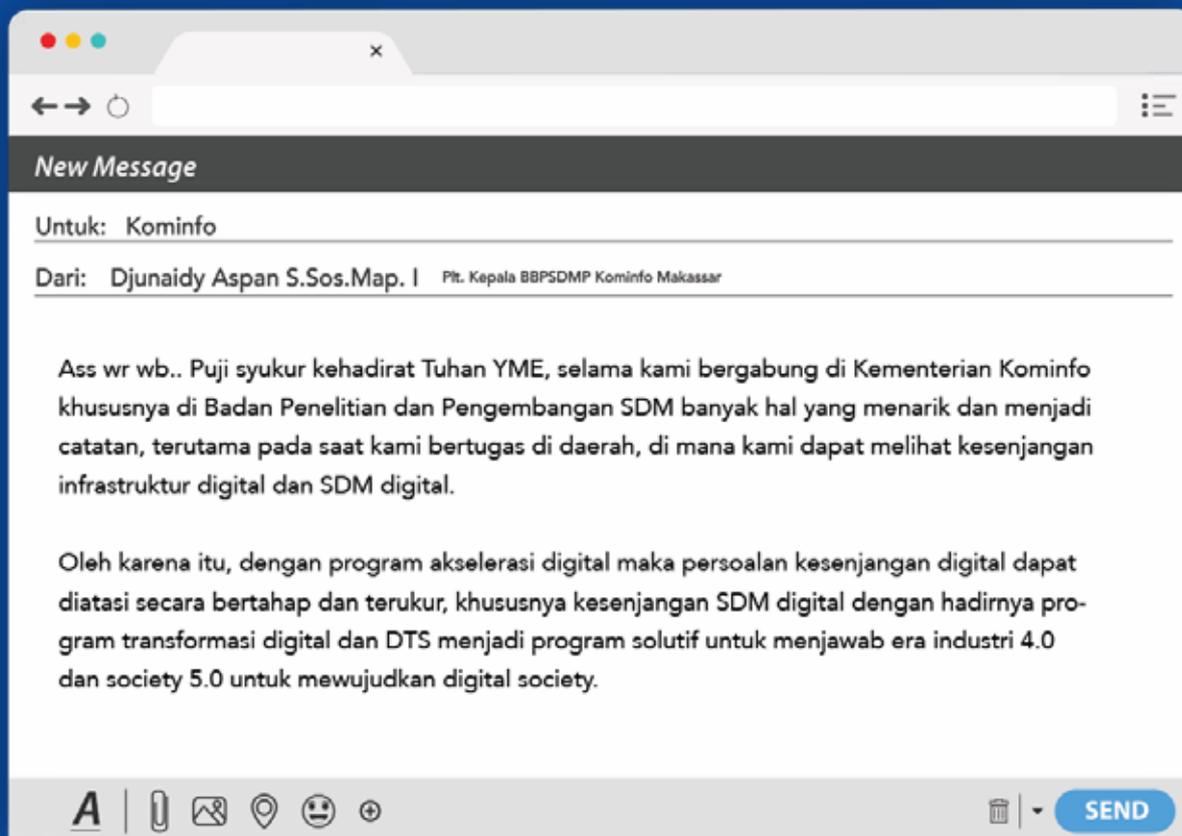
New Message

Untuk: Kominfo

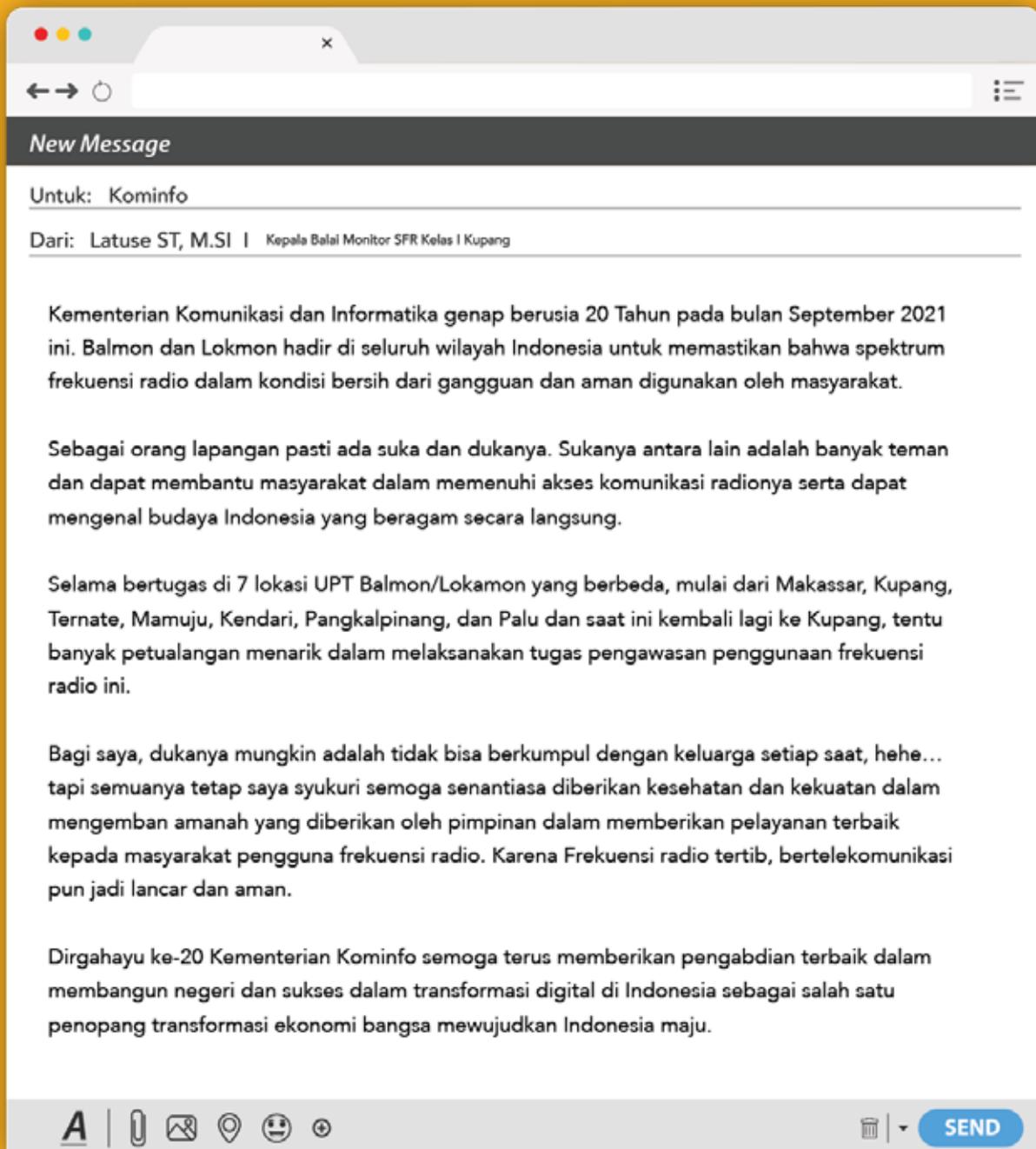
Dari: Drs. Zulkurnain I Kepala BPSDMP (Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Penelitian) Kominfo Yogyakarta

Selamat Ulang Tahun Kominfo.
Semoga kedepannya menjadi GPR unggul dan tangguh.
Semoga ke depannya sistem komunikasi dan transaksi berbasis elektronik rakyat Indonesia semakin berbiaya murah, semurah-murahnya, tanpa harus menjadi beban pemerintah dengan subsidiya.
Jaya lah Kominfo, Jaya lah Negeri dan Bangsa.

A |       **SEND**















Salam dari Sivitas





KOMINFO
Mempersembahkan

Perjalanan 20 Tahun Kominfo Menuju Transformasi Digital



Tautan Video



TIME CAPSULE
MINFO 2021 - 2031



Wajah Sivitas



Mohammad Nuh

Tifatut Sembiring



Menteri Kominfo

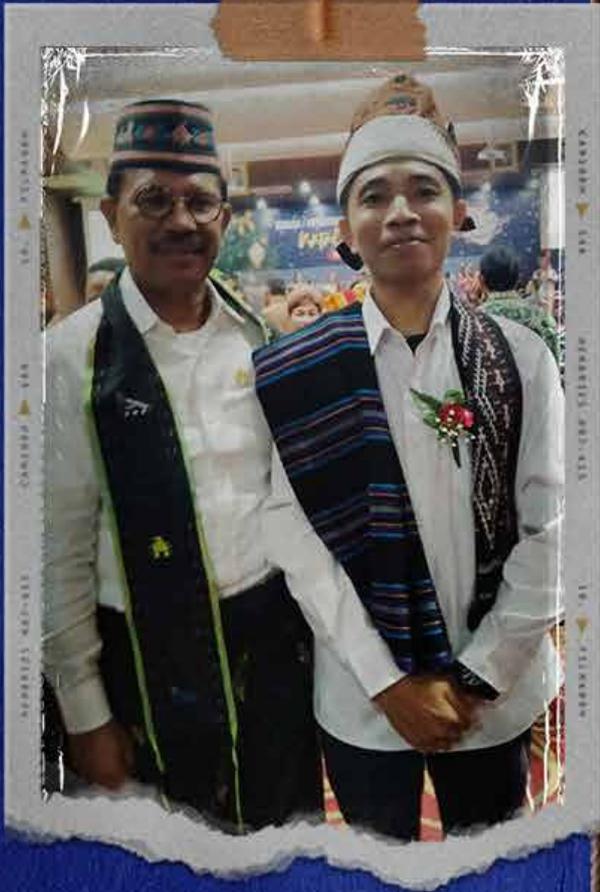


Rudiantara





Johnny G.
Plate



Empat Tahun AJK,

KOLABORASI
PENTAHELIX
WUJUDKAN
PERCEPATAN
TRANSFORMASI
DIGITAL
NASIONAL

Tahun 2021 menjadi tahun keempat penyelenggaraan Anugerah Jurnalistik Kominfo (AJK). Tahun ini, AJK mengambil tema Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju, yang menjadi representasi langsung dari lima arahan Presiden Joko Widodo terkait agenda percepatan transformasi digital Indonesia. Selain itu tema ini juga terus digelorkan dalam setiap program dan kebijakan strategis Kementerian Kominfo.





“Mengingat pentingnya transformasi digital yang menyentuh semua sektor, kami terus menggelarakan Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju pada setiap program dan kebijakan strategis. Selain diusung menjadi tema AJK 2021, semangat tersebut juga kami angkat sebagai tema besar dalam merayakan Hari Ulang Tahun ke-20 Kementerian Kominfo,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam acara Puncak Anugerah Jurnalistik Kominfo 2021 yang diselenggarakan di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (30/09/2021).

Dua dekade lahirnya Kementerian Kominfo, tidak terlepas dari peran media sebagai mitra strategis dalam mengawal pembangunan bangsa. Jurnalis berperan penting sebagai pembawa informasi bagi masyarakat umum, keakuratan dan kedalaman karya jurnalis

akan mendukung masyarakat tentang peluang dan tantangan dari pemanfaatan teknologi digital sehingga kemudian menginspirasi masyarakat agar meningkatkan kemampuan dan keahliannya dalam memanfaatkan teknologi digital.

“Melalui beragam produknya, jurnalis dapat membantu narasi-narasi yang akurat, menumbuhkan optimisme, dan mencerdaskan masyarakat Indonesia. Selain itu peran penting jurnalis dalam kolaborasi pentahelix dalam mewujudkan percepatan transformasi digital nasional,” ucap Menteri Johnny.



20TH
KOMINFO
Indonesia Terkoneksi
Semakin Digital, Semakin Maju

Meski masih berada di tengah pandemi COVID-19, animo para jurnalis dalam mengikuti AJK Tahun 2021 ini sangat besar. Hal ini terlihat dari banyaknya karya jurnalis yang ikut berpartisipasi. Total karya yang masuk sebanyak 843 karya dari 391 peserta AJK 2021, dengan rincian masing-masing kategori lomba sebagai berikut:

Liputan TV

sebanyak 72 karya dari 60 jurnalis

Liputan Radio

sebanyak 73 karya dari 62 jurnalis



GERAH
ISIAK
O

Liputan Media Online
sebanyak 296 karya dari 143 jurnalis

Liputan Media Cetak
sebanyak 99 karya dari 51 jurnalis

Liputan Foto Jurnalistik
sebanyak 303 karya dari 75 jurnalis

Apresiasi disampaikan Menteri Johnny kepada para jurnalis yang ikut mendorong masyarakat tetap produktif di tengah krisis yang menyerang hampir di semua sektor kehidupan.

“

Bahkan, selama pandemi Covid-19, masyarakat telah bermigrasi dari ruang fisik ke ruang digital, memanfaatkan berbagai platform digital untuk membangkitkan perekonomian bangsa. Jurnalis turut andil dalam mendorong masyarakat tetap produktif dan menumbuhkan optimisme,”

Apresiasi tinggi juga diberikan kepada para jurnalis yang telah mengirimkan karya-karya terbaiknya pada AJK 2021. “Selamat kepada para pemenang, dan bagi yang belum mendapatkan penghargaan, jangan patah semangat, karena tugas jurnalistik adalah mengabdikan pada kemanusiaan. Penghargaan terbesar seorang jurnalistik adalah Ketika karyanya bisa diterima dan menginspirasi masyarakat,”kata Menteri Johnny.

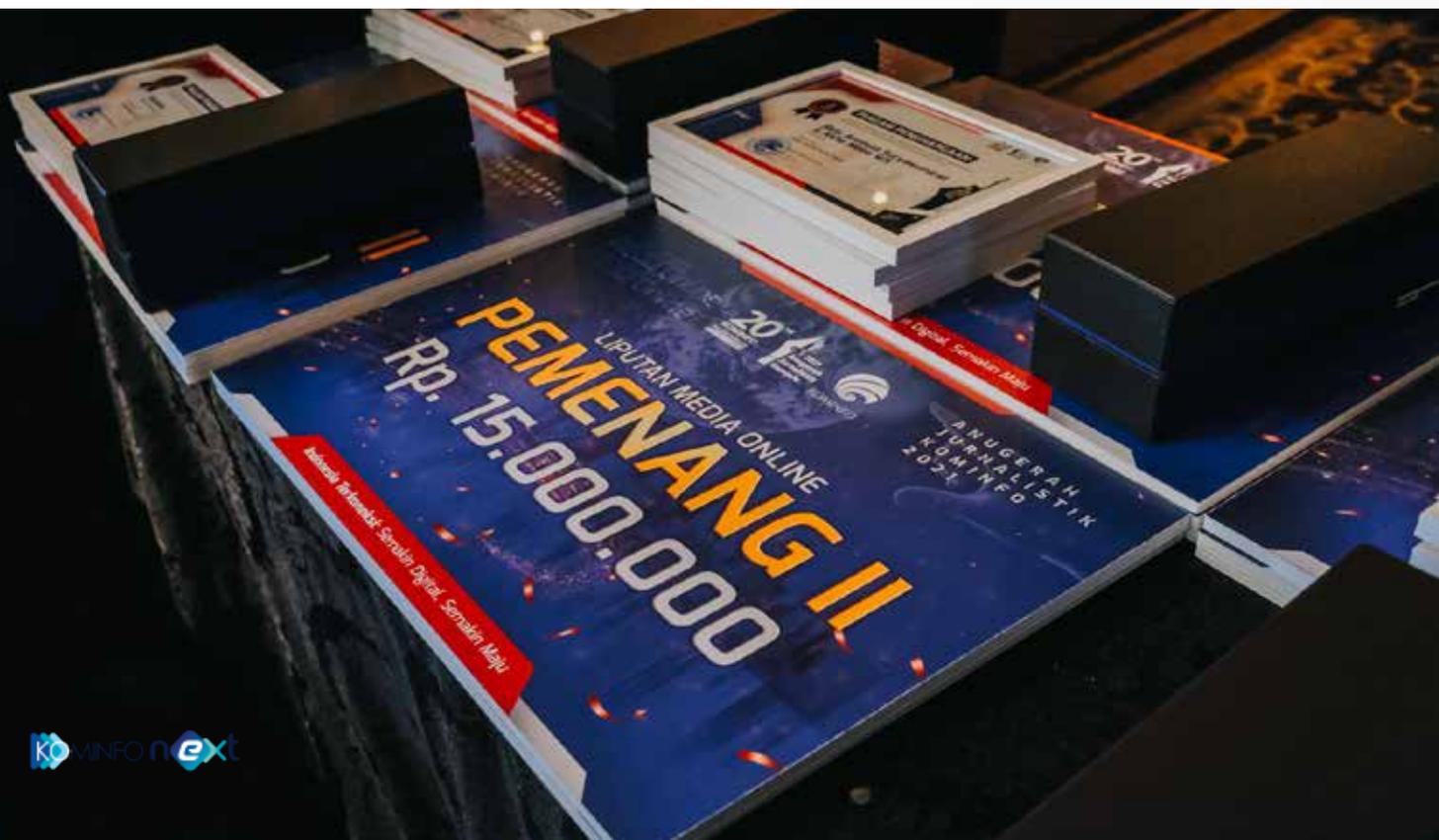


2021 Anugerah Jurnalistik KOMINFO



Pemenang 5 Kategori AJK 2021

Setelah melalui proses seleksi administrasi dan proses penilaian yang dilakukan oleh para dewan juri terhadap 843 karya dari 391 peserta untuk lima kategori yakni Liputan Media Online, Liputan Televisi, Liputan Media Cetak, Liputan Radio, dan Foto Jurnalistik, maka terpilih pemenang I, II, dan III dari masing-masing kategori sebagai berikut:



Kategori Liputan Media Online

Pemenang I: Slamet Harmoko dari sampit.prokal.co

Pemenang II: Bagus Supriadi dari Kompas.com

Pemenang III: Andy Indrayanto dari Halloriau.com





Kategori Liputan Media Cetak

Pemenang I: Wilibrordus Megandika Wicaksono
dari Harian Kompas

Pemenang II: Ester Lince Napitupulu
dari Harian Kompas

Pemenang III: Robby Patria dari Tanjungpinang Pos

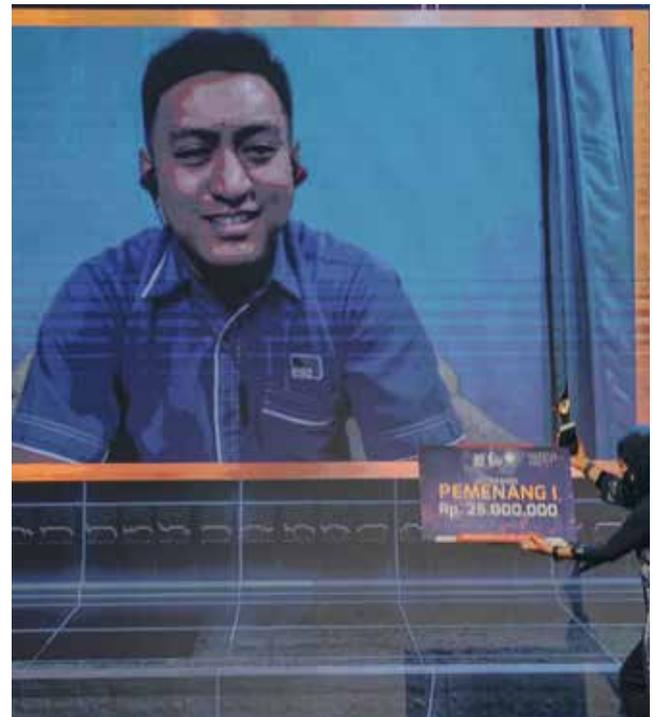
Kategori Liputan Televisi

Pemenang I: Cindy Dilapanga dari Kompas TV

Pemenang II: Muhammad Nur Rohman dari Berita Satu News Channel

Pemenang III: Ratu Annisaa Suryasumirat dan Akhe Mona WS dari Indosiar





Kategori Liputan Radio

Pemenang I: Ardi dari RRI Merauke

Pemenang II: Hikmat Raharjo Utomo dari RRI Denpasar

Pemenang III: Saortua Marbun dan Eko Susanto dari iRadio FM

Kategori Liputan Foto Jurnalistik

Pemenang I: Hilman Fathurrahman W dari Tempo.co

Pemenang II: Priyombodo dari Harian Kompas

Pemenang III: Susanto dari Media Indonesia.



Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan, karya-karya terbaik dari 50 besar dari lima kategori akan dijadikan sebuah buku dengan judul Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju.

“

Saya berharap penerbitan buku ini nantinya menjadi bagian dari sumber referensi dan khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat dalam mengenal program dan kebijakan Kementerian Kominfo.”





Dewan Juri AJK 2021

Dewan juri pada Anugerah Jurnalistik Kominfo (AJK) tahun 2021 ini diketuai oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba. Untuk dewan juri masing-masing kategori adalah sebagai berikut:

Liputan Media Cetak

Agus Sudibyو (Anggota Dewan Pers)
Primus Dorimulu (Pemimpin Redaksi Investor Daily & Berita Satu)
Phillip Gobang (Staf Khusus Menkominfo Bidang Komunikasi Politik)

Liputan Media Online

Wisnu Nugroho (Pemimpin Redaksi kompas.com)
Maman Suherman (Penulis Buku, Presenter, Konsultan Media & Kreatif)
Lathifa Al Anshori (Tenaga Ahli Menteri Kominfo)

Liputan Televisi

Aiman Witjaksono (Executive Producer & News Anchor Kompas TV)
Kabul Indrawan (News Production Manager Metro TV)
Devie Rahmawati (Tenaga Ahli Menkominfo Bid. Komunikasi dan Media Massa)

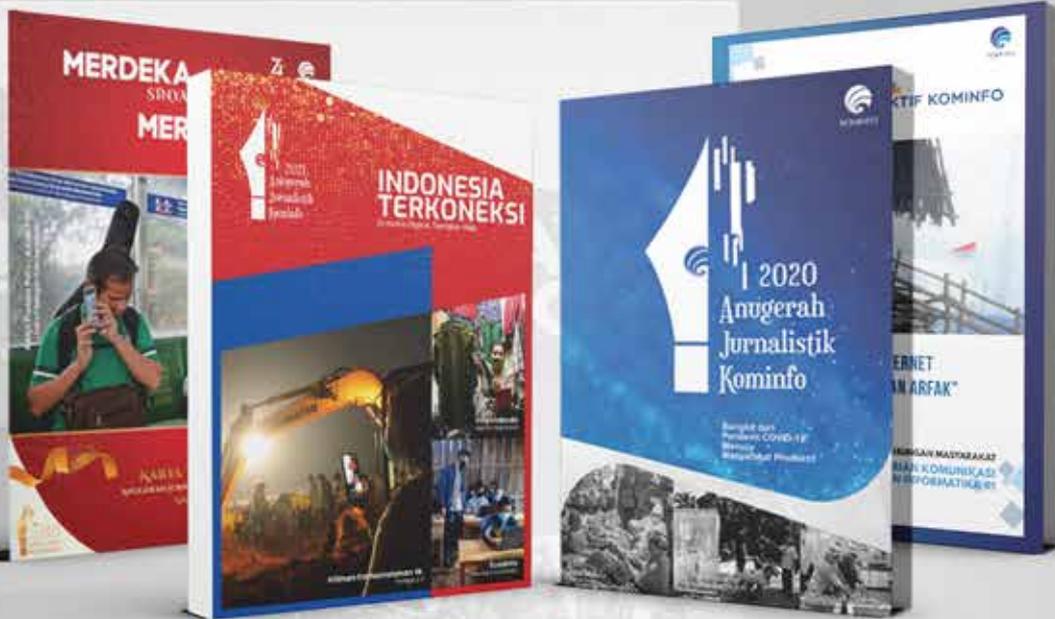
Liputan Radio

Soleman Yusuf (Direktur Pemberitaan RRI)
Rafiq (Sekretaris Umum PRSSNI)
Rosarita Niken Widiastuti (Staf Khusus Menkominfo Bid. IKP, Transformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga)

Foto Jurnalistik

Prasetyo Utomo (Redaktur Antara Foto)
Agus Susanto (Fotografer Harian Kompas)
Ramdani (Asisten Redaktur Multimedia Media Indonesia)





Akses Buku Karya Anugerah Jurnalistik Kominfo

2018 - 2021

Melalui tautan berikut:

kominfo/50KaryaTerbaikAJK

Kumpulan

50 Karya Terbaik

Setiap tahunnya, 10 karya terbaik pilihan Dewan Juri dari masing-masing kategori dicetak ke dalam Buku 50 Karya Terbaik Anugerah Jurnalistik Kominfo, sebagai bentuk apresiasi atas karsa, karya, cipta, dan rasa yang dituangkan ribuan jurnalis pada AJK dari tahun ke tahun.

Menkominfo Johnny G. Plate saat peluncuran Buku 50 Karya Terbaik AJK 2021, Kamis (30/09/21)



KILAS PERJALANAN DITJEN POSTEL

(Dari Telekomunikasi sampai Informatika)



Sumber: rubijanto.wordpress.com

”

“Atas nama pegawai PTT dengan ini, dengan disaksikan oleh masyarakat. Yang berkumpul di halaman PTT jam 11.00 tanggal 27 September 1945. Kami mengangkat Bapak Mas Soeharto dan Bapak R. Djar, masing-masing menjadi Kepala dan Wakil Kepala Jawatan PTT seluruh Indonesia. Atas nama AMPTT, Tertanda Soetoko.”

Pengambilalihan PTT oleh Angkatan Muda Pos Telegrap dan Telepon



Pada galibnya, peringatan tahunan Hari Bhakti Postel oleh semua pegawai di jajaran pos dan telekomunikasi pada tanggal 27 September bertolak dari diambil-alihnya Jawatan PTT dari kekuasaan pemerintahan Jepang oleh putra putri Indonesia yang tergabung dalam Angkatan Muda Pos Telegrap dan Telepon (AMPTT) pada tanggal 27 September 1945.

Proklamasi Kemerdekaan sudah berlangsung selama satu bulan. Para pemuda berusaha mendekati Jepang supaya menyerahkan kekuasaan di Kantor PTT karena Komandan Pasukan Jepang menginstruksikan bahwa penyerahan Kantor Pusat PTT harus dilakukan oleh sekutu. Oleh karena itu, rencana untuk merebut Kantor Pusat PTT harus lebih dimatangkan dan dirahasiakan.

Dengan digerakkan oleh Soetoko, AMPTT yang pada saat itu belum memiliki pengurus, mengadakan pertemuan pada tanggal 3 September 1945. Para pemuda AMPTT yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Soetoko, Slamet Soemari, Joesoef, Agoes Salman, Nawawi Alif dan beberapa pemuda lainnya. Untuk merealisasikan pemindahan kekuasaan, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Kantor Pusat PTT harus sudah dikuasai paling lambat akhir bulan September 1945.

Selanjutnya pada tanggal 23 September 1945, Soetoko berunding dengan Ismojo dan Slamet Soemari. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah keputusan yaitu meminta kesediaan segera dari Mas Soeharto dan R. Dijar untuk menuntut pihak Jepang supaya menyerahkan kekuasaan PTT secara damai. Bila pihak Jepang tidak mau menyerahkannya, maka akan ditempuh jalan kekerasan. Dengan kekuatan yang ada dan bantuan dari rakyat, PTT pun berhasil direbut. Setelah itu, AMPTT berencana untuk mengangkat Mas Soeharto menjadi Kepala Jawatan PTT dan R. Dijar sebagai Wakilnya.

Keesokan harinya, tanggal 24 September 1945 Soetoko meminta Mas Soeharto dan R. Dijar supaya hari itu juga, tanpa menunggu instruksi dari Jakarta, menemui pimpinan PTT Jepang, Tuan Osada, untuk berunding dan mendesak agar hari itu juga pihak Jepang mau menyerahkan pimpinan Jawatan PTT secara terhormat kepada Bangsa Indonesia. Namun perundingan yang dilakukan oleh Mas Soeharto dan R. Dijar bisa dikatakan gagal, karena hanya diperkenankan mengibarkan bendera Merah Putih di halaman belakang gedung di Jalan Ciliki. AMPTT segera menaikkan Sang Merah Putih secara khidmat pada sebuah tiang khusus, tepat di tempat tugu PTT sekarang.

Tanggal 26 September 1945 Soetoko memanggil Soewarno yang menjadi Komandan Cusin Tai dan Nawawi Alif untuk diberi tugas memimpin pekerjaan meruntuhkan tanggul dan mengelilingi kantor.

Untuk menciptakan koordinasi AMPTT dalam perebutan kekuasaan Jawatan PTT dari tangan Jepang, maka ditetapkan Soetoko sebagai ketua, dengan dibantu oleh tiga wakil ketua yang terdiri dari Nawawi Alif, Hasan Zein dan Abdoel Djabar.

Pada sore hari tanggal 26 September 1945 Soetoko menemui Mas Soeharto untuk memberitahukan rencana perjuangan AMPTT yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 September 1945. Mas Soeharto menerima dan menyetujui rencana tersebut. Malam itu juga segenap anggota AMPTT disebar untuk mencari dan mengumpulkan senjata tajam, kendaraan bermotor, senjata api dan kebutuhan lainnya. Siasat dan taktik disusun. Penduduk tua, muda dan semua organisasi perjuangan yang berkedudukan di dekat Kantor Pusat PTT dihubungi dan menyatakan kesediaan untuk memberikan bantuan kepada AMPTT.

Setelah tiga hari berturut-turut diadakan perundingan dengan pihak Jepang dan terus gagal, tibalah hari yang bersejarah yakni tanggal 27 September 1945. Sekali lagi Mas Soeharto dan R. Dijar mengadakan perundingan dengan Pimpinan Jepang di Kantor Pusat PTT. Hasilnya tetap gagal juga. Namun demikian sudah menjadi keputusan AMPTT bahwa tanggal 27 September 1945 kekuasaan atas Jawatan PTT harus direbut dengan kekerasan dari tangan Jepang.

Ketika itu AMPTT siap dengan senjatanya masing-masing. Rakyat sudah dikerahkan dan massa sudah berkumpul di halaman selatan. Soewarno dan pasukannya memasuki ruangan kantor yang dikuasai Jepang dan membuat mereka tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghalangi tekad AMPTT. Secara sukarela mereka menyerahkan senjatanya.

Setelah itu Soetoko segera membawa Mas Soeharto dan R. Djar ke depan massa. Didepan massa, kira-kira pukul 11.00, Soetoko membacakan teks yang isinya sebagai berikut :

"Atas nama pegawai PTT dengan ini, dengan disaksikan oleh masyarakat. Yang berkumpul di halaman PTT jam 11.00 tanggal 27 September 1945. Kami mengangkat Bapak Mas Soeharto dan Bapak R. Djar, masing-masing menjadi Kepala dan Wakil Kepala Jawatan PTT seluruh Indonesia. Atas nama AMPTT, Tertanda Soetoko."

Kala itu, muncul beberapa pemuda dalam Kantor Jawatan PTT yang berada di bawah pimpinan Soewondo. Mereka menurunkan bendera Jepang, dan sebagai gantinya mereka mengibarkan Bendera Merah Putih pada tiang listrik. Massa yang menjadi saksi mata dalam peristiwa yang mengakhiri kekuasaan kolonial Kantor Pusat PTT segera mengumandangkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh Jawatan PTT dengan semua eselonnya memberikan kontribusi dalam melaksanakan amanat Proklamasi Kemerdekaan yaitu: *"Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya."*

Pasukan peruntuh tanggung melanjutkan pekerjaannya. Gedung Kantor Pusat PTT siang malam dijaga oleh para pemuda. Mulai keesokan harinya bekas pimpinan Jepang tidak diperkenankan lagi masuk kantor. Mereka disuruh tinggal di rumah mereka yang telah ditemplei tulisan, *"Milik Republik Indonesia."*

Peristiwa pengambilalihan Jawatan PTT dari tangan Jepang oleh Angkatan Muda PTT pada tanggal 27 September 1945 diperingati sebagai Hari Bhakti Postel. Dengan demikian setiap tahun tanggal 27 September dilaksanakan Upacara Bendera Hari Bhakti Postel dan diperingati dengan berbagai kegiatan antara lain pemberian penghargaan Adhi Karya, Bhakti Sosial, olahraga dan lain sebagainya.

Ditjen Postel dari Telekomunikasi sampai Informatika



Sumber: Kompas.com

Melalui Keputusan Presiden No. 63 tahun 1966 tertanggal 27 Maret 1966, pemerintah era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto kembali melakukan penyempurnaan Kabinet Dwikora.

Hal ini pun berimplikasi pada berubahnya status Kementerian Pos dan Telekomunikasi menjadi Departemen Pos dan Telekomunikasi, di bawah Kementerian Perhubungan. Dari sisi garis komando, Departemen Postel yang dikepalai oleh seorang Deputi Menteri bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

Dalam perkembangan selanjutnya, Kabinet Dwikora pun dibubarkan dan digantikan oleh Kabinet Ampera, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 tertanggal 25 Juli 1966. Dalam Kabinet Ampera, Departemen Postel berubah status menjadi Direktorat Jenderal Postel yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Postel. Namun masih tetap bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

Ditjen Postel memiliki kisah yang unik. Bila banyak di antara lembaga negara pada era Orde Baru yang langsung memiliki gedung sendiri saat didirikan, Ditjen Postel sebaliknya. Divisi ini belum memiliki kantor sendiri pada awal kelahiran.

Hal ini membuat para pegawai di Ditjen Postel harus berkantor sementara di Gedung Telekomunikasi Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Barulah pada tanggal 27 September 1970, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Postel yang ke-25, Ditjen Postel pun mendapatkan gedung sendiri yang bertempat di Jalan Kebon Sirih No. 37 Jakarta Pusat. Setelah itu, Ditjen Postel pun mendapat tempat baru, yaitu di Gedung Sapta Pesona Jl. Medan Merdeka Barat 17, Jakarta Pusat.

Dari sisi organisatoris, Ditjen Postel mengalami perubahan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berdasarkan Keputusan Presiden (Perpres) No. 9/2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI, Ditjen Postel pun dipindahkan ke Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo).

Perpres yang mulai berlaku sejak ditandatangani pada 31 Januari 2005 tersebut membuat Ditjen Postel masuk dan menjadi bagian integral dari Departemen Kominfo, serta bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan Informasi, yang pada saat itu dinahkodai oleh Menteri Sofyan Djalil.

Menteri Sofyan kala itu, bahkan sampai saat ini tetap konsisten dalam penilaiannya, yaitu bahwa pemindahan Ditjen Postal ke Departemen Komunikasi dan Informasi merupakan hal yang wajar dan dinilai produktif di era konvergensi media komunikasi dan informasi.

Dari signifikansi, efektifitas, dan efisiensi, Menteri Sofyan menggaris bawahi bahwa pindahnya Dirjen Postal ke Depkominfo akan lebih memudahkan program pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), karena berada di bawah satu atap yang tersinkronisasi dari sisi teknologi dan informasi publik.



Menata Masa Depan Perangkat Pos dan Telekomunikasi Indonesia

Merujuk pada Permen Kominfo Nomor 25/PER/M. KOMINFO/07/2008, Kementerian Kominfo memiliki tiga (3) direktorat jenderal dan dua (2) badan, yaitu Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika, Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Badan Informasi Publik. Dalam perkembangan selanjutnya, tepatnya pada tahun 2010, Kementerian Kominfo pun menerbitkan Permen Kominfo Nomor 17/PER/M. KOMINFO/10/2010.

Regulasi ini membuat Ditjen Postal dimekarkan menjadi dua (2) direktorat jenderal, yaitu: Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI). Badan Informasi Publik pun diseminasikan ke dalam ditjen dan lembaga yang sudah ada. Dengan demikian, pada struktur Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2010, terdapat empat (4) Direktorat Jenderal dan satu (1) badan.

Sejak dibentuk pada tahun 2010, Ditjen SDPPI berfokus pada pengaturan, pengelolaan, dan pengendalian suatu sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang terkait dengan penggunaan oleh internal (pemerintah) maupun masyarakat luas. Jika dilihat dari kinerja SDPPI diatas dapat disimpulkan bahwa wilayah pengelolaan, fasilitas dan pengaturannya hanya berfokus pada sumber daya dan perangkat pos dan informatika saja. Untuk itu, Ditjen SDPPI mengemban tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standardisasi perangkat pos dan informatika.



Penataan Sumber Daya Frekuensi

Pada periode 2015 - 2019, terkait pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio, Ditjen SDPPI telah berhasil menata frekuensi secara optimal. Hal tersebut bahkan menghasilkan tambahan spektrum frekuensi radio untuk mobile broadband sebesar 546 MHz. Capaian tersebut 56% lebih tinggi dari target yang tercantum dalam Renstra Kemenkominfo Tahun 2015–2019 yaitu sebesar 350 MHz, sehingga total penambahan spektrum frekuensi yang dihasilkan Kemenkominfo sejak tahun 2014 sebesar 737 MHz. Dampak signifikan dari keberhasilan penataan spektrum frekuensi radio yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat adalah teknologi jaringan LTE 4G hadir lebih merata dan dengan kualitas yang lebih baik.

Dalam mendukung penggelaran jaringan 4G di Indonesia, Pemerintah melakukan antara lain penataan ulang (refarming) pita frekuensi radio 1800 MHz, 2.1 GHz dan 800/900 MHz. Refarming juga merupakan bagian dari upaya Kemenkominfo memenuhi sasaran RPJMN 2015—2019 yaitu termanfaatkannya sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka.

Ke depannya, untuk pita low band, berdasarkan laporan GSMA Intelligence, salah satu kebijakan penting yang harus diambil Indonesia adalah merilis spektrum 700 MHz. Kebijakan ini akan mendukung usaha operator dalam memperluas jangkauan layanannya dengan peningkatan trafik yang signifikan selama sepuluh tahun ke depan. Penetapan spektrum ini untuk mobile broadband akan menimbulkan manfaat ekonomi bagi Indonesia sebesar USD 11 M (sebelas miliar dolar Amerika Serikat) dalam periode 2020-2030, senilai dengan pertumbuhan PDB 1%.



Penataan Frekuensi

Sejak tahun 1977 hingga 1990, pencatatan daftar pengguna izin frekuensi radio masih dilakukan dengan cara manual, yaitu menggunakan buku besar yang bernama Blue Book yang berisi data administrasi dan teknis dari para pengguna izin frekuensi radio. Pada periode berikutnya, sejak tahun 1991 hingga 1998 pencatatan pengguna izin frekuensi radio sudah mulai beralih ke sistem yang berbasis sistem informasi manajemen spektrum yang disebut *Automated Frequency Management System* Generasi Pertama (AFMS-1) dan berlanjut dengan AFMS Generasi Kedua yang digunakan sejak tahun 1999 hingga tahun 2005. Selanjutnya, pada tahun 2004 dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Frekuensi (SIMF) yang dioperasikan pada tanggal 17 Maret 2005 dan merupakan generasi baru dari sistem informasi manajemen yang sebelumnya dikenal sebagai AFMS.

Seiring dengan perkembangan waktu, implementasi SIMF dirasakan kurang mendukung sistem perizinan spektrum frekuensi radio dan pelayanan ISR, sehingga dipandang perlu mengembangkan SIMS yang telah digunakan dan diresmikan pada tanggal 17 April 2013.

Menteri Kominfo saat itu, Rudiantara pun meresmikan sistem perizinan penggunaan frekuensi radio yang berbasis *machine to machine* (M2M) yang terintegrasi di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI, Lt 11 Gedung Menara Merdeka, Jakarta, Selasa (19/05/2015). Sistem perizinan tersebut merupakan pengembangan dari sistem pelayanan perizinan penggunaan frekuensi radio melalui SIMS (Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika).

Secara fungsional, SIMS ini mengintegrasikan seluruh jenis pelayanan publik yang dikelola oleh Ditjen SDPPI yang meliputi integrasi perizinan yang meliputi frekuensi radio, sertifikasi operator radio dan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Namun dengan semakin meningkatnya kebutuhan dan pemegang izin pengguna spektrum frekuensi radio yang membutuhkan percepatan, akurasi dan efisiensi dalam penanganan proses perizinan frekuensi radio, maka diputuskan untuk mengembangkan sistem perizinan penggunaan frekuensi radio berbasis M2M yang merupakan bentuk inovasi pelayanan perizinan frekuensi radio dari Ditjen SDPPI dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sistem perizinan frekuensi radio yang berbasis M2M ini diharapkan dapat mempercepat proses perizinan dan meningkatkan akurasi data perizinan karena selain melibatkan partisipasi pengguna layanan dalam peningkatan pelayanan perizinan frekuensi radio, juga dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat, fleksibel dan transparan.

Dengan diresmikannya sistem perizinan frekuensi radio berbasis M2M ini, maka permohonan perizinan frekuensi radio dapat dilakukan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI secara luring (*offline*), sistem daring (*online*) dan melalui Sistem M2M. Peresmian sistem perizinan frekuensi radio berbasis M2M ini dihadiri oleh perwakilan operator seluler, undangan, dan stakeholder serta mitra kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Selain itu, dalam peresmian tersebut juga dilakukan demo penggunaan Sistem M2M oleh PT Telkom, PT Telkomsel, PT XL Axiata, PT Indosat, PT H3I, dan PT Smartfren Telecom yang merupakan pengguna frekuensi radio dengan jumlah yang besar.

Transformasi Pelayanan Pos di Indonesia

Dalam penyelenggaraan kegiatan layanan pos di Indonesia, sebuah badan usaha memerlukan izin sebagai syarat untuk dapat melakukan aktivitas penyelenggaraan layanan di bidang pos. Berdasarkan data per tahun 2019, penyelenggaraan pos yang telah direkonsiliasi jumlah badan usaha yang memiliki izin penyelenggaraan pos berjumlah 669 yang mana tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebaran penyelenggara pos di Indonesia saat ini masih terpusat di Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan, sementara di wilayah timur belum banyak badan usaha yang belum melakukan kegiatan penyelenggaraan pos. Hal ini menyebabkan tidak meratanya layanan pos di seluruh Indonesia, oleh karena itu diperlukan kebijakan-kebijakan dalam mendorong pertumbuhan industri pos dan layanan pos di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah melalui Kemenkominfo memiliki peran untuk mendorong pemerataan jangkauan layanan pos dengan melaksanakan Layanan Pos Universal (LPU) di daerah-daerah non komersial dan wilayah 3T serta kawasan prioritas. LPU dilaksanakan oleh penyelenggara pos yang ditunjuk (*designated operator*) oleh Pemerintah sesuai ketentuan perundang undangan. Sebagai *designated operator*, penyelenggara LPU bertugas untuk membuka dan menyelenggarakan layanan khususnya ketersediaan layanan pos dasar pada daerah-daerah non komersial dan wilayah 3T serta kawasan prioritas.

Sebaran Kantor Pos Cabang Layanan Pos Universal (KPCLPU) sudah mengalami peningkatan, namun sebaran ini masih banyak di Pulau Jawa. Sehingga ke depan, Kemenkominfo akan fokus pada kebijakan yang dapat mendorong sebaran KPCLPU di seluruh wilayah Indonesia. Ditjen PPI mencatat bahwa dari tahun 2015 hingga 2019, terdapat peningkatan jumlah KPCLPU, yaitu: 2360 (2015), 2385 (2016), 2470 (2017), 2450 (2018), dan 2446 (2019).

Dalam hubungan dengan ekspansi layanan pos di Indonesia, pada Jumat (17/10/2015) terjadi pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, yang dulunya pernah menjadi Menkominfo dengan Ditjen Postel di bawahnya, serta Pelaksana Tugas Dirut PT Pos Indonesia, Poernomo.



Dalam pertemuan yang terjadi di Jakarta tersebut, Rudiantara dan Sofyan Djalil meminta agar PT Pos Indonesia bisa membuka lini usaha di jasa pengantaran logistik dari perdagangan daring atau *e-commerce*. Ekspansi bisnis ini penting, mengingat omset transaksi perdagangan daring di Indonesia yang pada 2016 dapat melebihi 20 miliar dolar AS, sehingga harus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh PT Pos.

Kala itu, Rudiantara meyakini jasa logistik dari perdagangan daring ini bisa menjadi lini bisnis yang potensial untuk menggenjot pendapatan PT Pos. Hal itu juga didukung oleh kapasitas dan pengalaman PT Pos sekian lama di sektor pengantaran logistik. Senada dengan Rudiantara, Sofyan Djalil menilai bahwa perluasan bisnis ke perdagangan daring ini juga dapat menjadi terobosan dalam mereformasi ceruk bisnis pendapatan PT Pos. Ia mengingatkan potensi bisnis pengantaran logistik perdagangan daring sangat besar. Jika PT Pos tidak sigap, bukan tidak mungkin pelaku usaha dari swasta bergerak lebih cepat dan akhirnya menguasai bisnis di jasa logistik itu.

Menyikapi permintaan dua menteri itu, Pelaksana Tugas Dirut PT Pos Indonesia Poernomo mengaku siap jika ditugaskan pemerintah untuk memasuki bisnis jasa perdagangan daring. PT Pos bahkan sudah menyiapkan anggaran belanja modal untuk mempersiapkan sistem teknologi dan informasi guna merambah bisnis jasa daring. Namun usulan perluasan bisnis PT Pos sepenuhnya diserahkan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai pemegang saham PT Pos. Sementara itu Kemenkominfo dan Bappenas baru membahas mengenai regulasi dan perencanaan jangka panjang dari sektor jasa logistik tersebut.

Teknologi Jejak Lacak POS



Enam tahun setelah itu, Kementerian Kominfo masih tetap berjuang mengekspansi domain pos Indonesia ke arah digital. Dalam sebuah rapat virtual pada Senin (04/01/2021) dengan tema "**Menkominfo Menyapa: Indonesia Terkoneksi, Semakin Digital Semakin Maju,**" Dirjen PPI saat itu, Ahmad M. Ramli, menyatakan bahwa bidang Pos dan Informatika menjadi pilar utama tidak hanya untuk ekonomi digital, tetapi juga untuk seluruh sendi kehidupan terkini. Dirjen Ramli pun menegaskan bahwa seluruh jajaran Ditjen PPI yang mempunyai tugas di bidang penyelenggaraan akan berjuang secara konsisten untuk menjadikan pos dan logistik itu sebagai pilar ekonomi digital.

Ia juga menyatakan bahwa tahun 2021 akan mengintensifkan monitoring dan evaluasi untuk *quality of service* bidang Pos dan Logistik. Menurutnya, hal itu sejalan dengan arahan yang memiliki perhatian terhadap *coverage* dan *quality of service*.

Sementara itu Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo, Ismail dalam "**Acara Sosialisasi Pemanfaatan Sistem Tracking oleh Penyelenggara Pos: Transformasi Digital Industri Pos Nasional,**" di Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis (03/06/2021), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi lacak jejak kiriman akan meningkatkan efisiensi dalam bisnis pos.

Melanjutkan apa yang disampaikan Dirjen Ismail, Direktur Pos, Ikhsan Baidirus pun mengelaborasi bahwa penggunaan teknologi lacak jejak juga menjadi kewajiban penyelenggara layanan pos sesuai Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos.

Menurutnya, pemerintah telah memiliki strategi dalam mendorong penggunaan jejak lacak oleh Penyelenggara Pos. Dijelaskan juga bahwa pemerintah juga tengah berupaya membuat aplikasi operasional Penyelenggara Pos sehingga dapat digunakan oleh Penyelenggara Pos untuk memproses dan melacak kiriman serta dapat terhubung dengan ekosistem *e-commerce*.

Baidirus pun berharap agar penerapan teknologi jejak lacak dapat meningkatkan kualitas layanan pos di Indonesia. Bahkan, dengan teknologi yang sama, *customer service* dapat lebih fokus pada isu pelayanan yang lebih penting. Mengingat mereka (*customer service*) tidak perlu menjawab pertanyaan terkait posisi barang dan mengurangi kecemasan pelanggan dan penyesalan pembeli, karena adanya kepastian layanan serta meningkatkan proses penanganan pada kasus barang hilang atau salah kirim. (Emild Kadju)

Pesan Tak Tersampaikan Karena Salah Penulisan

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, seorang Aparatur Sipil Negara menghasilkan berbagai teks, misalnya surat, kerangka acuan kerja, kajian, rancangan peraturan, dan artikel. Teks-teks tersebut dapat digolongkan sebagai dokumen pemerintahan yang berterima dan sesuai kaidah bahasa.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan mengatur penggunaan bahasa Indonesia, di antaranya dalam peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, pidato kepala negara, pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan, dan laporan instansi. Kementerian Kominfo juga berkewajiban menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan jelas dalam penyusunan dokumen pemerintah. Tulisan ini membahas contoh-contoh penggunaan bahasa Indonesia di tingkat kata dan kalimat yang kerap ditemui.



Penulisan Kata Asing Bidang Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menimbulkan banyak istilah baru yang perlu diserap ke dalam bahasa Indonesia untuk peningkatan pemahaman masyarakat. Di samping itu, istilah serapan bidang TIK dapat memperkaya kosakata Bahasa Indonesia. Penyerapan istilah baru ini dapat dilakukan dengan berbagai metode.

Penyerapan secara utuh adalah metode penyerapan istilah asing secara utuh, contohnya 'internet' dan 'modem'. Kita juga mengenal penyerapan melalui penerjemahan seperti 'pos-el' atau 'surel' untuk 'e-mail' dan 'peramban' untuk 'browser'. Penulis harus berhati-hati karena tidak semua serapan mempunyai arti yang sama, misalnya 'communicant' dengan 'komunikasikan'.

Namun, penggunaan istilah terjemahan ini tidak bisa sepenuhnya digunakan dalam petunjuk pengoperasian komputer atau peralatan yang tombolnya masih menggunakan bahasa asing. Kita perhatikan contoh petunjuk salin-tempel berikut ini.

Bahasa Inggris:

Select the text you want to copy, then click the Copy button on the Home tab. Afterward, click where you want to paste the text, then click the Paste button.

Bahasa Indonesia:

Pilih teks yang Anda ingin salin, kemudian klik tombol Copy di menu Home. Selanjutnya, klik di tempat yang Anda ingin tempelkan teks tersebut, lalu klik tombol Paste.

Jika istilah dalam teks tersebut diterjemahkan seluruhnya, pembaca akan kesulitan menjalankan petunjuk yang diberikan.



Penulisan Kalimat Efektif

Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh pembacanya dengan tepat. Persyaratan untuk membuat kalimat efektif adalah kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, kehematan kata, kecermatan penalaran, dan kelogisan bahasa. Mari kita perhatikan berbagai contoh di bawah ini.

Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kalimat yang tidak memiliki subjek di atas sering kita temui di naskah dinas. Penyunting dapat memperbaiki kalimat tersebut seperti di bawah ini.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami menyampaikan terima kasih.

Penulis juga harus menggunakan logika dalam membuat kalimat agar terhindar dari pengaburan subyek.

Informasi terkait pengisian online di website dapat menghubungi operator di nomor yang tersedia.

Kalimat tidak logis tersebut dapat dibenahi menjadi berikut ini.

(1) Informasi mengenai pengisian daring di situs web dapat diperoleh dari operator di nomor yang tersedia.

(2) Anda dapat menghubungi operator di nomor yang tersedia untuk mendapatkan informasi pengisian daring di situs web.

Satu contoh ketidaklogisan sering ditemui dalam acara resmi.

Waktu dan tempat kami persilakan untuk memberikan paparan.

Subjek kalimat tersebut tidak bisa melakukan pemaparan. Kita dapat mengubahnya seperti di bawah ini.

Kami mempersilakan Bapak/Ibu Direktur untuk menyampaikan pemaparan.

Melalui penulisan kata yang sesuai ejaan dan kalimat yang efektif, pesan dapat diterima dengan baik oleh pembaca. Oleh karena itu, seorang penulis perlu terus meningkatkan kemampuannya melalui pembacaan pedoman, jurnal, kamus, dan artikel bahasa. Selamat menulis.

Jadikan Hari Bakti Posel ke-76 Semangat Membangun Inovasi

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo menyatakan peringatan Hari Bhakti Posel ke-76 menjadi momentum semangat dalam membangun lebih cepat lagi infrastruktur telekomunikasi dan mengakselerasi transformasi digital.

"Semangat dari pelaksanaan Hari Bakti Posel ke-76 ini, kita ejawantahkan dalam keadaan dan kondisi yang sekarang berlangsung. Semangat para pahlawan AMPPT nasional terus berkobar dari seluruh insan pos dan telekomunikasi," ujarnya usai Upacara Hari Bakti Posel ke-76, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (27/09/2021).



Jelang PON XX Papua, Refarming Frekuensi 2,3 GHz Rampung



Penataan ulang (*refarming*) pita frekuensi radio 2,3 GHz di sembilan klaster, termasuk sebagian Papua, sudah rampung. Pemerintah berharap masyarakat mendapatkan layanan teknologi 4G maupun 5G yang semakin baik dan optimal. "Manfaat refarming adalah perbaikan kualitas layanan 4G, menambah jaringan 4G, dan peningkatan kemudahan upgrade menjadi 5G," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam Konferensi Pers Penutupan Kegiatan Penataan Ulang (Refarming) Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz, di Jakarta, Selasa (29/09/2021).

Refarming berlangsung mulai 14 Juli hingga 28 September 2021, dengan melakukan perubahan frekuensi pada 15.577 Base Transceiver Station (BTS). "Perubahan frekuensi dilakukan bertahap di sembilan klaster, yakni Kepri, Sumatera bagian utara, Jawa bagian tengah, Sulawesi bagian utara, Banten & Jabodetabek, Jawa bagian barat, sebagian Jawa bagian timur, Papua, serta Maluku & Maluku utara," jelas Menteri Johnny.



Serah Terima Presidensi G20 Berlangsung Akhir Oktober 2021

Indonesia telah ditetapkan sebagai Presidensi G20 Tahun 2022 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 ke-15 Riyadh, Arab Saudi, pada tanggal 22 November tahun lalu. Serah terima dari Presidensi G20 saat ini, yaitu Italia ke Indonesia akan dilakukan pada KTT G-20 yang akan dilaksanakan di Roma, Italia.

"Serah terima Presidensi G20 dari Italia kepada Indonesia akan dilaksanakan pada KTT G20 atau G20 Leader Summit di Roma, Italia, pada tanggal 30-31 Oktober tahun 2021 ini," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam Keterangan Pers Bersama mengenai Presidensi Indonesia di G20 Tahun 2022, di Jakarta, Selasa (14/09/2021).

Setiap tahunnya, para negara anggota G20 bergilir untuk menjadi tuan rumah rangkaian kegiatan pertemuan organisasi tersebut. Setelah serah terima dari Italia, Indonesia akan memegang Presidensi G20 Tahun 2022 selama satu tahun. "Ini merupakan kali pertama Indonesia terpilih sebagai Presidensi G20 sejak dibentuknya G20 pada tahun 1999," ungkap Menkominfo.



Pertemuan ke-18, Indonesia Malaysia Bahas Harmonisasi Spektrum

Kementerian Kominfo melakukan pertemuan dengan Malaysian Communications and Multimedia Commission membahas Spectrum Harmonization.

“Kegiatan koordinasi ini sudah diadakan sebanyak 18 kali antara Indonesia dan Malaysia yang kali ini membahas tentang Spectrum Harmonization dan juga interferensi yang ada di perbatasan. Semoga kedepannya tidak lagi ada interferensi baik dari sisi Indonesia maupun Malaysia,” ucap Koordinator Harmonisasi Spektrum Frekuensi Radio Arifah, Kamis (30/09/2021).

Pada kesempatan yang sama, Subkoordinator Penataan Alokasi Dinas Penyiaran Benny Elian menjelaskan setidaknya ada tiga pokok pembahasan utama pada pertemuan kali ini, yaitu interferensi di perbatasan Indonesia Malaysia, TV Digital dan rencana untuk digitalisasi radio siaran, sekaligus interferensi radio penerbangan.



IoT Creation 2021, Talenta Digital untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

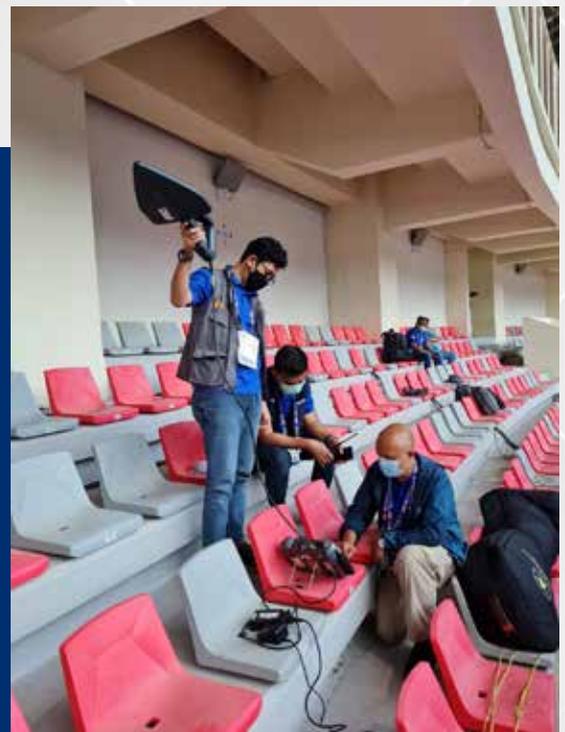
Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo menyatakan peringatan Hari Bhakti Posel ke-76 menjadi momentum semangat dalam membangun lebih cepat lagi infrastruktur telekomunikasi dan mengakselerasi transformasi digital.

“Semangat dari pelaksanaan Hari Bakti Posel ke-76 ini, kita ejawantahkan dalam keadaan dan kondisi yang sekarang berlangsung. Semangat para pahlawan AMPPT nasional terus berkobar dari seluruh insan pos dan telekomunikasi,” ujarnya usai Upacara Hari Bakti Posel ke-76, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (27/09/2021).

Tim Ditdal SDPPI Amankan Jalur Komunikasi PON Papua

Jayapura (SDPPI) – Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika bersama tim dari Balai Monitor diterjunkan untuk melakukan pengamanan komunikasi radio yang digunakan sebagai jalur komunikasi sepanjang Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-20 yang berlangsung di Papua.

Koordinator Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio, Andi Faisa Achmad menjelaskan pengamanan dilakukan sejak 1 Oktober hingga perhelatan PON berakhir pada 16 Oktober 2021. Khusus saat PON dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Stadion Lukas Enembe Jayapura, Sabtu (2/10/2021), diterjunkan delapan tim yang terdiri dari empat tim inner untuk memonitor di dalam stadion, dan empat tim outer untuk memonitor luar stadion dan sekitarnya.



Pelatihan Digital untuk Bantu UMKM NTT Bangkit dari Pandemi



Kementerian Kominfo melakukan pelatihan kepada para UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk bangkit dari krisis pandemi Covid-19. Targetnya, para UMKM tersebut dapat aktif melakukan transaksi penjualan.

“Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat signifikan bagi para UMKM lokal di sini. Cara untuk bangkit sekaligus meningkatkan usahanya dengan dapat memanfaatkan digital, untuk itu kami melakukan pelatihan intensif,” kata Koordinator Pelatihan UMKM Active Selling, Ignasius Marni saat pendampingan UMKM di Komunitas Rumah Pekerti, Manggarai Barat, Kamis (30/09/2021).

NTT khususnya di Kabupaten Manggarai Barat, lanjut Ignasius, memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan para UMKM lokal. Mulai dari kain tenun, pembalut yang bisa dipakai ulang, kopi, berbagai macam snack, souvenir, hingga olahan ikan.

Pemerintah Antisipasi Penyebaran Covid-19 Varian Mu

Pemerintah bergerak cepat mengantisipasi masuknya virus Covid-19 varian Mu ke tanah air dengan meningkatkan pengawasan di seluruh area pintu masuk ke Indonesia dari luar negeri. “Pemerintah bergerak cepat dan tepat untuk mengantisipasi masuknya Covid-19 varian Mu atau B.1.621. Semua ini dilakukan agar Indonesia tidak mengalami gelombang ketiga Covid-19,” tutur Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, di Jakarta, Selasa (07/09/2021).

Menurut Menkominfo, pengawasan dilakukan di seluruh pintu masuk, seperti bandara dan pelabuhan. Pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan whole genome sequencing kepada seluruh WNI atau WNA yang memiliki riwayat perjalanan ke negara dengan tingkat penyebaran varian Mu tinggi, seperti Kolombia, Jepang, India, Hongkong, Ekuador. Whole genome sequencing merupakan upaya untuk mengetahui penyebaran mutasi virus SARS-Cov2 atau Covid-19.



Masifkan Gerakan Literasi Digital, Dirjen Aptika: Ada 200 Kegiatan per Hari



Program Gerakan Literasi Digital Nasional yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2021 lalu, hingga kini terus berlangsung dan melibatkan masyarakat di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan, saat ini sudah hampir 200 aktivitas kegiatan berlangsung setiap hari.

"Ada hampir 200 aktivitas di seluruh Indonesia, jadi teman-teman atau yang ingin ngikutin, silahkan dan ini terbuka, bisa juga diakses lewat event.literasidigital.id," ujarnya dalam sesi diskusi Forum Tata Kelola Internet Asia Tenggara (SEA IGF) 2021 di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (01/09/2021).

ASO Perbaiki Kualitas Layanan Internet, Dirjen IKP: Manfaatkan Pita Frekuensi 'Emas'

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong menyatakan, migrasi siaran televisi analog ke digital atau Analog Switch Off (ASO) merupakan bagian penting dalam memperbaiki kualitas layanan internet. "Kita mempunyai pita 700 Mhz yang kita sebut frekuensi 'emas' untuk peningkatan internet *broadband*," ujarnya dalam program Safari Jurnalistik Batch Kedua oleh Persatuan Wartawan Indonesia, dari Bali, Kamis (02/09/2021).

Menurut Dirjen Usman Kansong, melalui digitalisasi sistem penyiaran televisi terestrial, pita frekuensi 328 Mhz yang saat ini seluruhnya digunakan untuk siaran televisi analog, akan dihasilkan efisiensi spektrum *digital dividen* yakni sebesar 112 Mhz dan 90 Mhz lainnya digunakan untuk internet *broadband* atau internet cepat.





Top 10 Hoaks September

➔ Diteruskan

Selamat Pagi Bapak/Ibu Camat Group LTI DAN Diskominfo ini di buat dalam Rangka Perbaikan KABEL BAWAH LAUT PALAPA RING TENGAH LINK ONDONG TAHUNA YG RENCANA AWALNYA TGL 29 Agustus-06 Sept tapi karena sesuatu dan lain Hal maka rencananya tgl 24-30 Sept 2021 sehingga jaringan akan Down utk itu di Mohon Kesediaan. Para Camat utk dapat edukasi dan mengsosialisasi kpd Masyarakat dan apabila ada pertanyaan dapat di komunikasikan di Group ini nti dari Team PT LTI yg akan menjawab, terima kasih 🙏🙏

Internet akan mati 🖐 dri tgl 24-30 Sept 2021.

17.00

1 [HOAKS] Jaringan Internet akan Mati Dalam Rangka Perbaikan Kabel Bawah Laut Palapa Ring

Beredar sebuah informasi melalui pesan berantai WhatsApp yang mengklaim bahwa akan ada perbaikan kabel jaringan bawah laut Palapa Ring, yang mengakibatkan jaringan internet mati pada tanggal 24-30 September 2021.

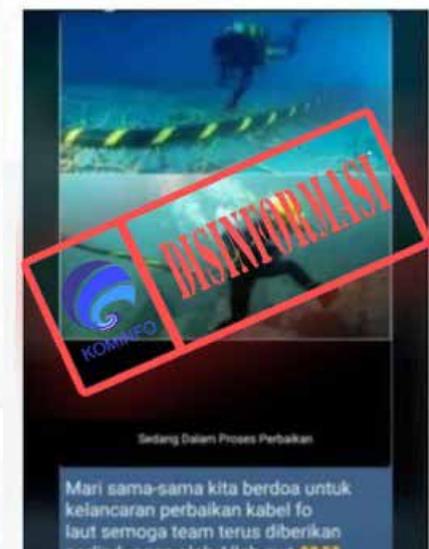
Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah keliru. Dilansir dari portalsitaro.com, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sitaro menjelaskan bahwa Palapa Ring paket tengah memang akan mengalami perbaikan dalam waktu dekat. Selama perbaikan kabel fiber optik Palapa Ring, layanan jaringan internet di Kabupaten Kepulauan Sitaro akan terus diupayakan tersedia, bukan mati total.



2 [HOAKS] Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Tidak Ditanggung Kemenkes Mulai 1 Oktober 2021

Beredar di media sosial sebuah narasi yang menyebutkan bahwa mulai 1 Oktober 2021, biaya pasien Covid-19 tidak ditanggung Kemenkes lagi dan BPJS hanya menanggung biaya maksimal Rp 18 juta. Narasi tersebut juga berisi imbauan agar memiliki alternatif lain seperti asuransi sendiri.

Faktanya, dilansir dari liputan6.com, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kementerian Kesehatan RI, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid. mengatakan informasi tersebut adalah tidak benar. Ia menegaskan, bahwa biaya perawatan pasien Covid-19 tetap ditanggung oleh pemerintah dan sumber anggaran masih dari Kementerian Kesehatan RI. Lebih lanjut, dr. Nadia juga menambahkan, tidak benar bahwa besaran perawatan biaya pasien Covid-19 dibatasi Rp 18 juta. Mekanisme perhitungan penggantian biaya menggunakan metode INA-CBGs dan besarnya bervariasi. Penghentian penjaminan biaya pasien Covid-19 dilakukan, apabila masa isolasi Covid-19 sudah dinyatakan selesai.



4 [DISINFORMASI] Foto Perbaikan Kabel Internet Bawah Laut IndiHome

Beredar sebuah narasi pada pesan berantai WhatsApp mengenai foto yang diklaim sebagai perbaikan kabel internet bawah laut IndiHome. Foto tersebut menampilkan rangkaian foto seorang penyelam yang membawa benda panjang berwarna hitam dan kuning.

Setelah ditelusuri, foto yang beredar dan diklaim sebagai perbaikan kabel internet bawah laut IndiHome adalah salah. Faktanya, foto pertama telah beredar sejak 2016, sebelum gangguan pada kabel bawah laut IndiHome terjadi, sedangkan foto kedua, penyelam dalam foto tersebut adalah Perwira Kecil Kelas 3 Bryan Myers, ditugaskan ke Mobile Diving and Salvage Unit 2, yang sedang melakukan operasi penyelaman di Valparaiso, Chili, pada 29 Juni 2011.



3 [DISINFORMASI] Gangguan Jaringan Massal, Internet Indonesia Ternyata di-Hack

Beredar sebuah video di media sosial TikTok dengan narasi, "sedikit informasi, saat ini sedang ada gangguan massal se-Indonesia untuk pengguna jaringan wifi Indihome dari Telkom dan juga jaringan Telkomsel, XL, Indosat, dikarenakan provider yang ada di Indonesia lagi kena Hack".

Berdasarkan penelusuran, informasi bahwa operator layanan telekomunikasi yang ada di Indonesia telah di-hack atau diretas adalah tidak benar atau hoaks. Faktanya, gangguan jaringan atau sinyal yang terjadi bukan karena adanya aktivitas hacking, melainkan terjadi masalah teknis pada sistem komunikasi kabel. SVP Corporate Communication & Investor Relation Telkom Ahmad Reza mengungkapkan gangguan yang terjadi pada IndiHome dan Telkomsel terjadi akibat adanya problem sistem komunikasi kabel laut Jawa, Sumatera, dan Kalimantan ruas Batam-Pontianak.



5 [DISINFORMASI] Video Rekaman Hiu Penyebab Jaringan Telkomsel Down

Sebuah akun media sosial TikTok mengunggah video yang menampilkan seekor ikan hiu menggigit sebuah kabel di dasar laut. Unggahan tersebut disertai narasi “PENJARAKAN DIA YANG BIKIN JARINGAN DOWN” dengan membubuhkan tagar #telkom #jaringan #down #fyp #viral.

Faktanya video dalam unggah tersebut tidak berkaitan dengan kejadian yang menyebabkan jaringan Telkomsel down sebagaimana yang disebutkan dalam narasi. Video tersebut merupakan video rekaman di bawah laut yang terekam pada tahun 2014 lalu dan berlokasi di Samudra Pasifik. Dilansir dari pikiran-rakyat.com, video serupa pernah diberitakan The Guardian, di mana kabel yang digigit hiu dalam video adalah milik Google, yang setelahnya menyebabkan perbaikan besar-besaran.



7 [DISINFORMASI] Imbauan Menkes terkait Larangan Bepergian dan Berkumpul karena Varian Baru Covid-19

Beredar sebuah pesan berantai di media sosial WhatsApp, informasi yang berisi imbauan dari Menteri Kesehatan (Menkes) agar tidak bepergian ke luar kota atau melakukan kegiatan kumpul-kumpul karena adanya varian baru Covid-19.



6 [HOAKS] Bill Gates Serukan Penarikan Vaksin Covid-19 karena Berbahaya

Beredar di media sosial Facebook, sebuah unggahan foto yang menyebutkan bahwa Bill Gates menyerukan penarikan semua Vaksin Covid-19 dengan alasan “Vaksin jauh lebih berbahaya daripada yang dibayangkan siapa pun”.

Faktanya, dilansir dari liputan6.com, informasi di atas adalah hoaks. Dikutip dari theeexpose.uk, pihak redaksi The Expose menjelaskan bahwa artikel yang mereka unggah adalah satire atau sindiran. Satire tersebut adalah fiktif karena Bill Gates tidak pernah membuat pidato seperti itu. Di sisi lain, Gates Foundation yang dimiliki Bill Gates justru mendukung program vaksinasi Covid-19.

Faktanya, dilansir dari liputan6.com, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid. mengatakan bahwa pesan berantai tersebut tidak benar. Ia menjelaskan pesan dari Menteri Kesehatan bahwa masyarakat tidak boleh terlena dengan keadaan yang semakin membaik dan harus tetap menjaga protokol kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga mengingatkan tentang mobilitas masyarakat akan meningkat seiring dengan pelonggaran kegiatan masyarakat. Masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan karena ada varian Covid-19 lain yang bisa mengancam.



8 [DISINFORMASI] Kematian Remaja Akibat Suntikan Vaksin Covid-19 di Lahad Datu

Beredar di media sosial Facebook, unggahan video berdurasi 1 menit 38 detik yang menginformasikan bahwa terdapat dua orang remaja yang meninggal karena suntikan vaksin Covid-19 di Lahad Datu, Malaysia.

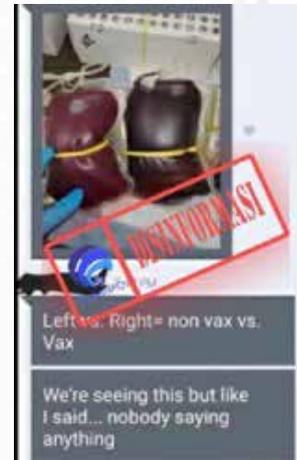
Faktanya, dilansir dari wartaoriental.com, Direktur Kesehatan Negara Bagian Sabah, Dr. Rose Nani Mudin membantah kematian seperti yang dituduhkan. Rose mengatakan bahwa informasi dalam video tersebut adalah pesan palsu. Dikutip dari edisi9.com, penyebab dua remaja yang meninggal adalah infeksi virus Covid-19 serta mempunyai komorbid diabetes sejak kecil, dan penyebab kematian yang satu lagi tidak diketahui, namun remaja tersebut telah berusia 18 tahun dan memenuhi syarat untuk menerima vaksin di bawah Program Imunisasi Nasional Covid-19 (PICK) untuk orang dewasa.



10 [HOAKS] Air Jeruk Nipis Dapat Bersihkan Paru-Paru Perokok

Beredar sebuah informasi pada media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa air jeruk nipis dapat membersihkan paru-paru perokok.

Dikutip dari cek fakta liputan6.com, klaim tentang air jeruk nipis dapat membersihkan paru-paru perokok ternyata adalah salah. Faktanya, tidak ada bahan-bahan alami yang bisa membersihkan paru-paru dan teori tersebut tidak berdasarkan bukti yang jelas.



9 [DISINFORMASI] Warna Darah Pasien yang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Berubah

Beredar sebuah postingan yang menyebutkan warna darah pasien yang sudah disuntik vaksin Covid-19 berbeda. Pengunggah foto itu menyebut warna darah merah marun merupakan darah milik orang yang belum divaksin. Sementara yang merah gelap milik pasien yang sudah divaksin. Dari foto tersebut kemudian beredar narasi darah orang yang telah divaksin tidak aman, termasuk untuk donor darah.

Dilansir dari kumparan.com yang mengutip dari Reuters, narasi yang ada dalam postingan tersebut tidak benar. Ahli menyebut tidak ada hubungannya warna darah dengan vaksin Covid-19. Menurut Asisten Profesor di Departemen Onkologi Radiasi Institut Kanker Huntsman, Fakultas Kedokteran Universitas Utah Amerika Serikat, Skyler Johnson menegaskan bahwa gambar tersebut salah. Hal yang sama juga disampaikan oleh ahli yang menyebutkan warna darah seseorang berasal dari molekul protein yang membawa oksigen ke dalam darah. Karena itu, warna darah seseorang bisa berwarna merah, biru, hijau, dan ungu. Sementara itu, antibodi yang terbentuk dari vaksinasi tidak memiliki warna tertentu.

Hari Bhakti Postel ke-76

“

Mari kita terus perkuat kolaborasi meneruskan semangat perjuangan Bapak dan Ibu Veteran Postel dalam memberikan bhakti yang berkontribusi terhadap kemajuan sektor pos dan telekomunikasi Indonesia.

Bersama-sama kita wujudkan transformasi digital Indonesia demi ketangguhan dan pertumbuhan nasional Indonesia yang semakin maju.

**Indonesia Terkoneksi:
Semakin Digital, Semakin Maju!**

Johnny G. Plate

Menteri Kominfo RI

Jakarta, 27 September 2021